



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2023



Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2023 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

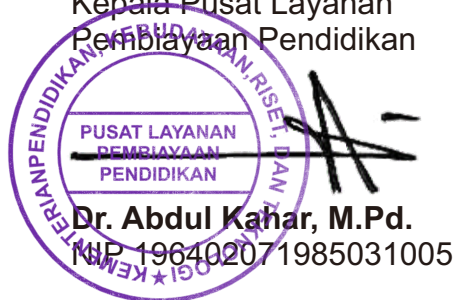
Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan tahun 2023. Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan pada tahun 2023 menetapkan 5 (lima) sasaran dan 7 (tujuh) indikator kinerja.

Secara umum Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Laporan kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan pada tahun 2023. Selain itu, tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja juga dijabarkan, yang kemudian menjadi acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja kedepannya.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan pada tahun 2023.

Jakarta, 29 Januari 2024
Kepala Pusat Layanan
Pembiayaan Pendidikan

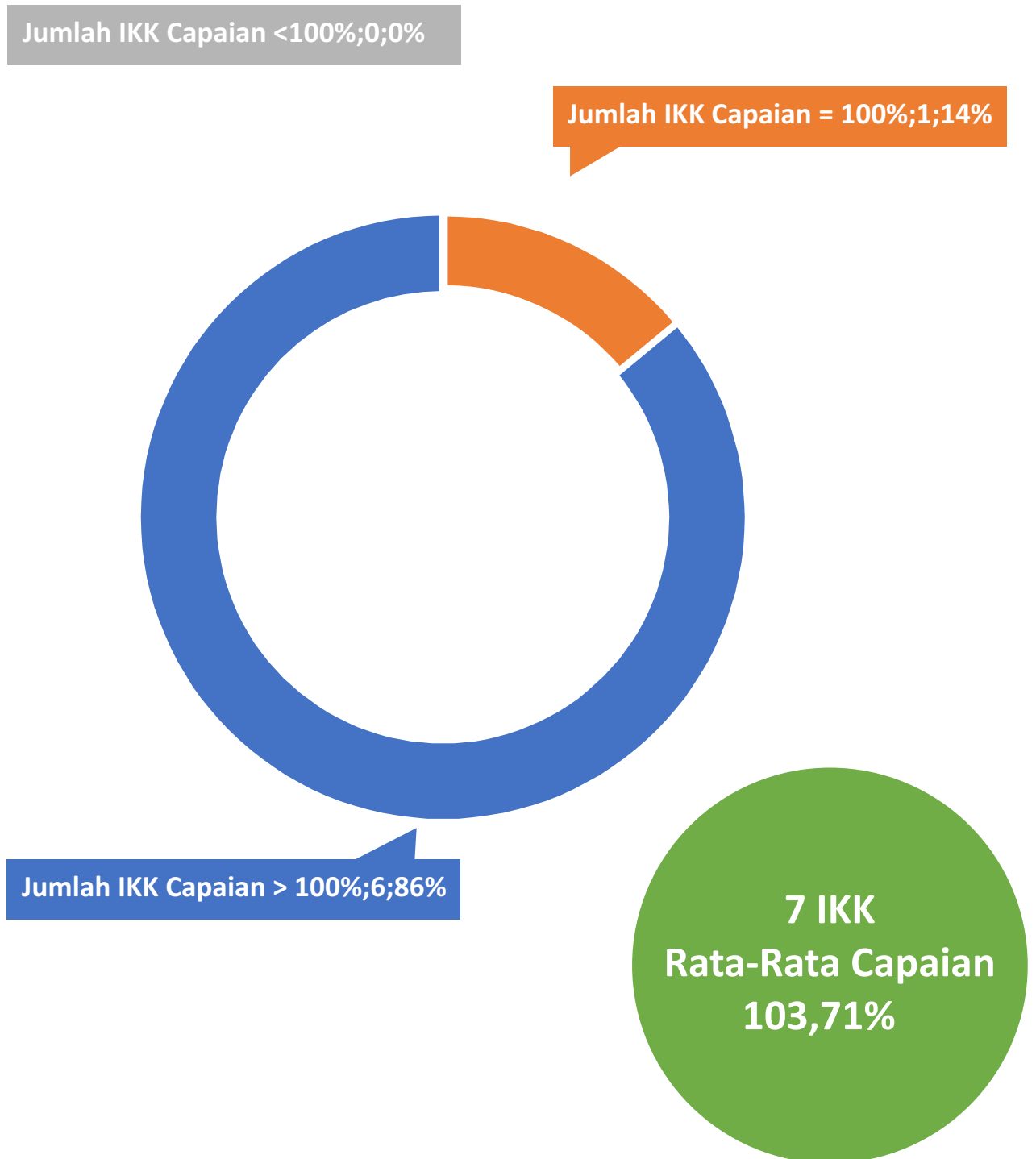


Dr. Abdul Kahar, M.Pd.
NIP. 196402071985031005

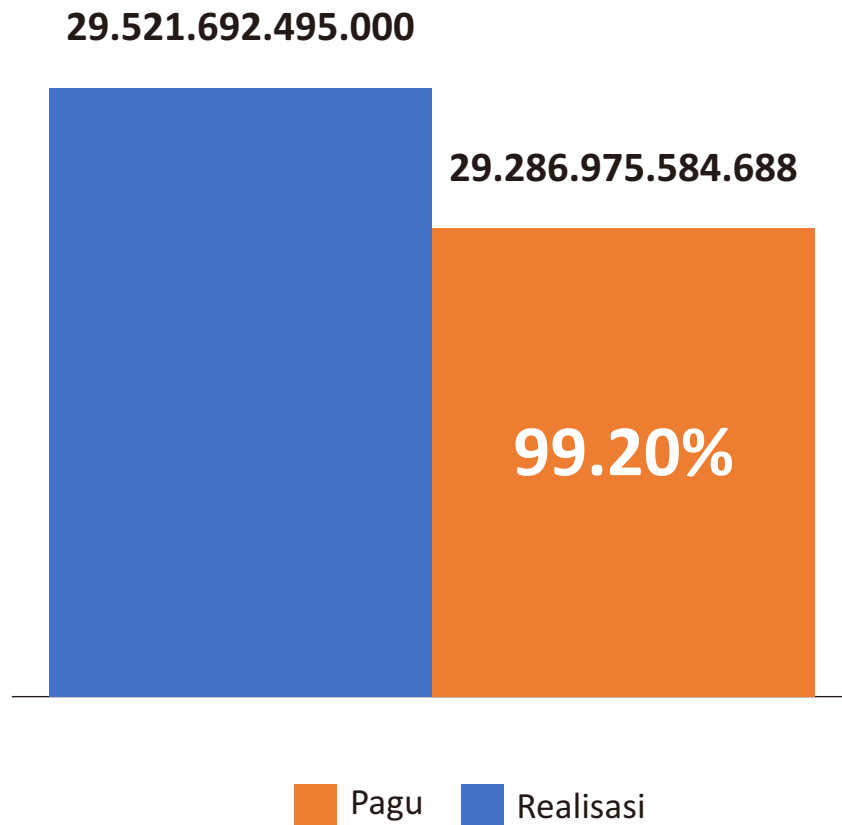
Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ikhtisar Eksekutif	1
 BAB I PENDAHULUAN	 9
A. Gambaran Umum	10
B. Dasar Hukum	11
C. Struktur, Tugas dan Fungsi Organisasi	12
1. Struktur Organisasi	12
2. Tugas dan Fungsi	13
D. Isu Strategis	14
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 19
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 29
A. Gambaran Umum	30
B. Realisasi Anggaran Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	62
C. Efisiensi Anggaran Pendidikan	63
D. Inovasi, Penghargaan, dan Program crosscutting/collaborative	65
 BAB IV PENUTUP	 77
A. Ringkasan Kinerja	78
B. Langkah Kerja Kedepan	80
 LAMPIRAN	 81

Ikhtisar Eksekutif

Capaian Kinerja



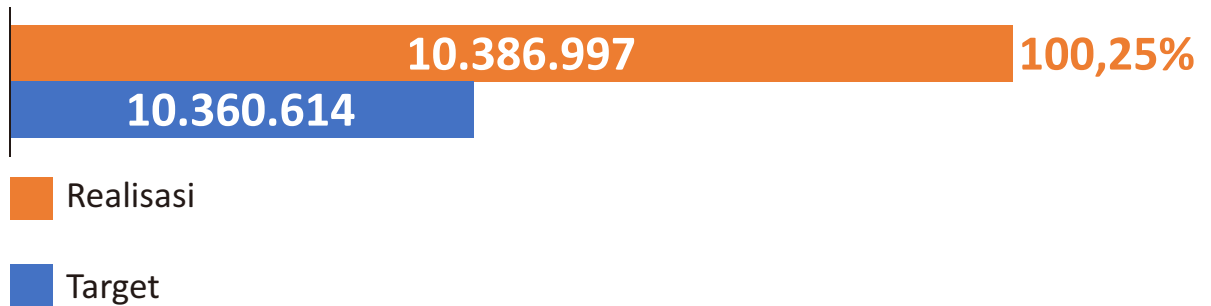
Penyerapan Anggaran



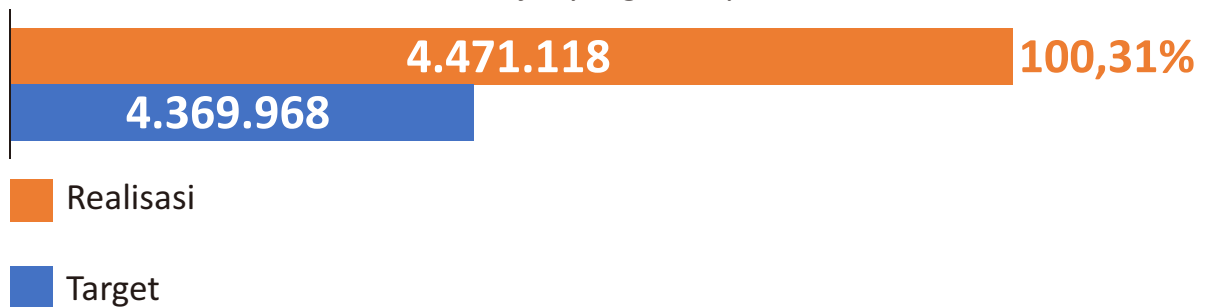
SK.1

Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar

Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang memperoleh PIP



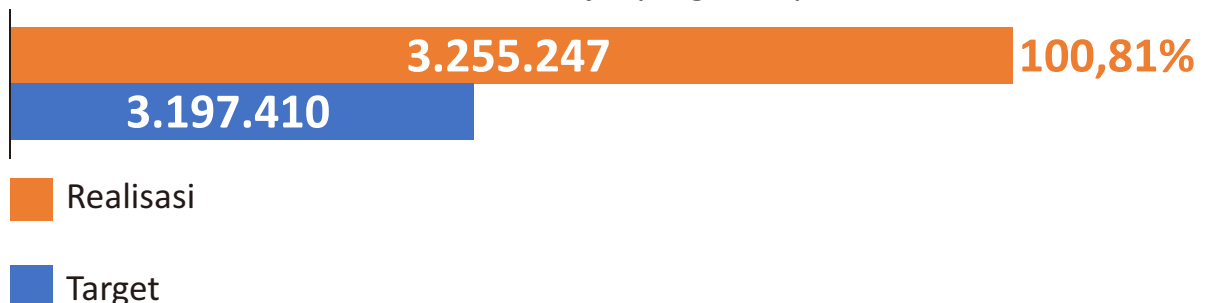
Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat yang memperoleh PIP



SK.2

Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat menengah

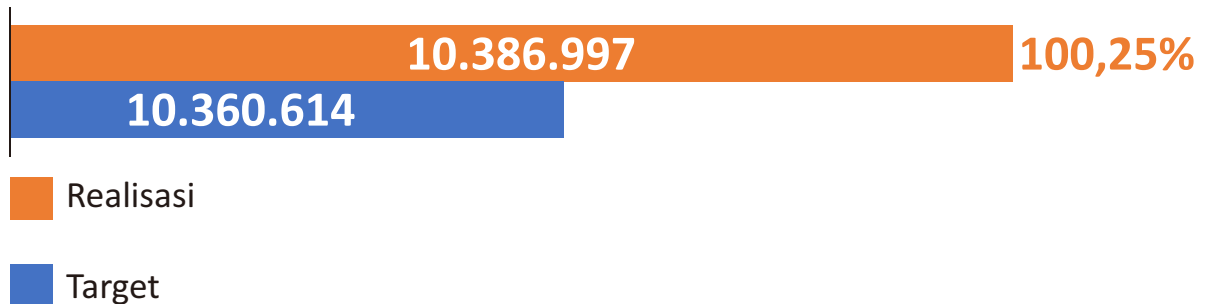
Jumlah siswa SMA/SMK/SMLB/Sederajat yang memperoleh PIP



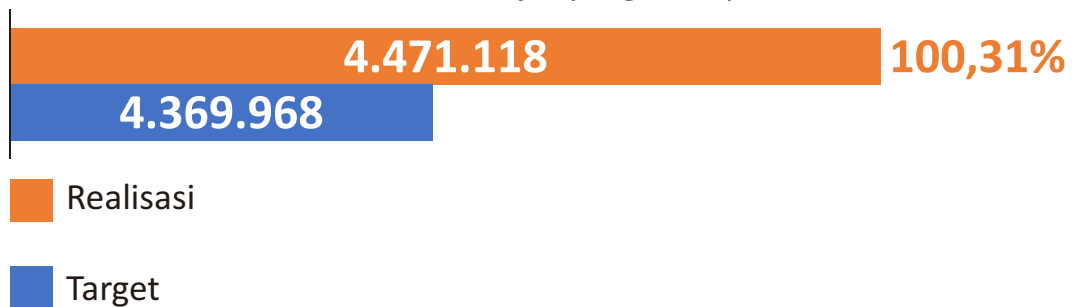
SK.1

Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar

Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang memperoleh PIP



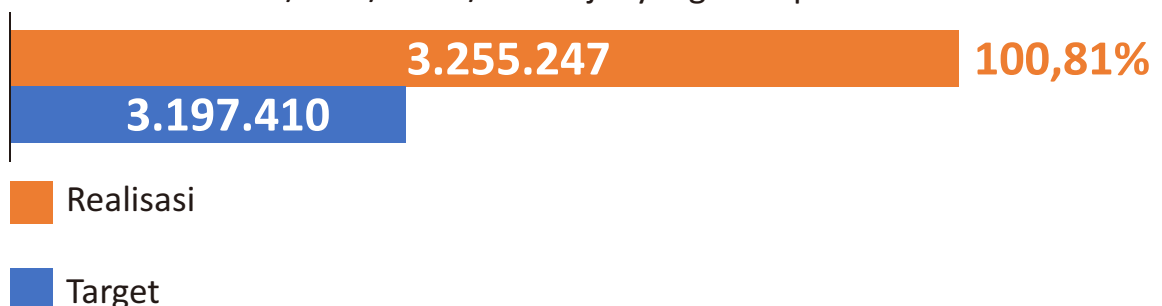
Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat yang memperoleh PIP



SK.2

Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat menengah

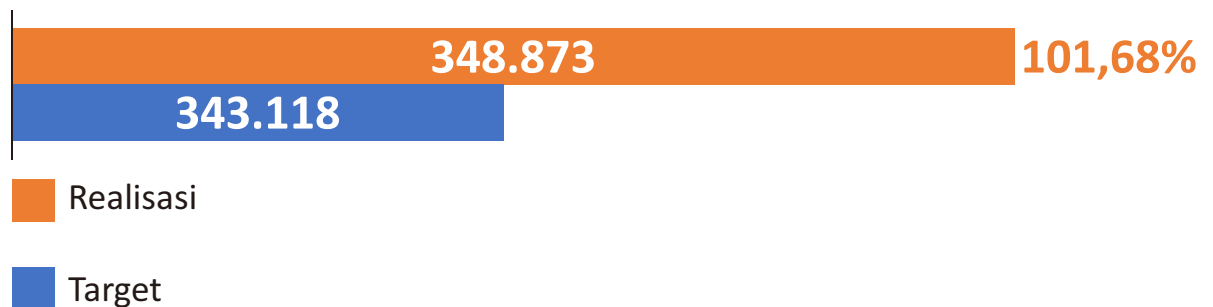
Jumlah siswa SMA/SMK/SMLB/Sederajat yang memperoleh PIP



SK.3

Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional

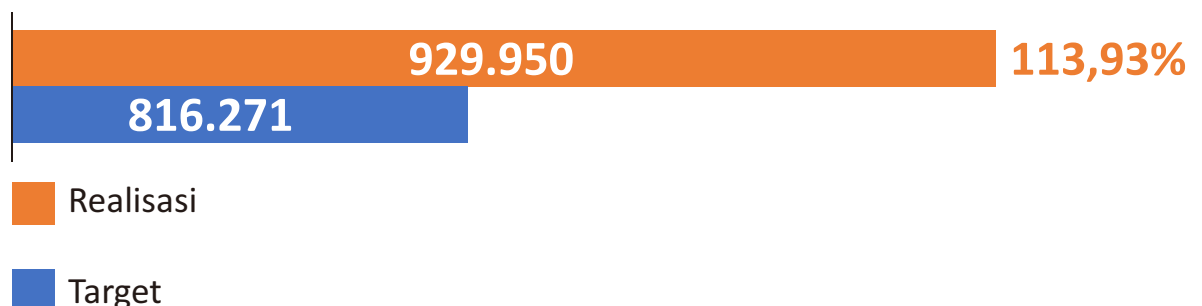
Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang memperoleh tunjangan/bantuan



SK.4

Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi

Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi



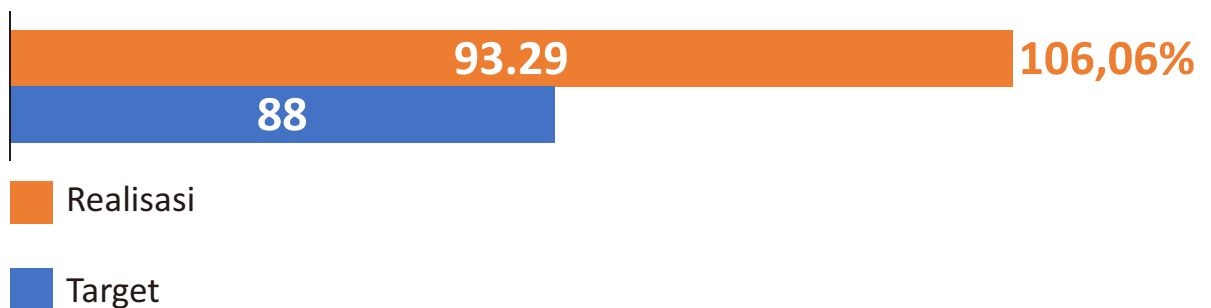
SK.5

Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB



Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L
Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85



PERMASALAHAN UMUM

Penetapan sasaran pada penerima bantuan beberapa program masih terkendala terkait data siswa di Dapodik maupun di Dukcapil, DTKS dan P3KE

Jumlah unit kerja operasional bank penyalur belum mampu melayani proses aktivasi rekening penerima PIP secara optimal.

Keterbatasan kapasitas penyimpanan atau storage serta memory pada server sistem KIP Kuliah dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Terdapat beberapa kendala di Perguruan Tinggi (PT) dalam mengusulkan KIP Kuliah, misalkan tidak ada alokasi dana pengelolaan untuk memverifikasi calon penerima KIP Kuliah, PT terlambat mengusulkan penerima KIP Kuliah, banyak PT yang mengalami perubahan (penggabungan, berubah bentuk PT, dan tutup)

Program Aneka Tunjangan diantaranya memiliki kendala guru yang tidak memperbaharui data di Dapodik dan perpindahan status guru non PNS ke PPPK.

LANGKAH ANTISIPASI

-  1 Meningkatkan koordinasi kepada pihak terkait (Kemensos, Kemenko PMK, Kemenag, Kemendagri, Pusdatin, Dinas Pendidikan, bank penyalur dan Pihak terkait lainnya) yang memiliki data.
-  2 Menyempurnakan proses dan/atau prosedur dalam hal penetapan sasaran penerima bantuan sehingga lebih optimal.
-  3 Menganalisis hambatan-hambatan yang masih terjadi sehingga mendapatkan informasi wilayah-wilayah dengan hambatannya masing-masing untuk kemudian menjadi dasar dalam penetapan solusi bersama
-  4 Berkoordinasi dengan mahasiswa, Pusdatin, PDDIKTI, perguruan tinggi, LLDIKTI, dan pihak lain yang terkait, baik dalam penetapan penerima bantuan dan beasiswa, penyaluran dana, maupun dalam pelaporan
-  5 Meningkatkan integrasi dan koordinasi dengan Pusdatin (Dapodik) dan PD Dikti secara berkala terkait pemadanan data dan pengadaan server.
-  6 Memberikan layanan untuk menerima komplain dan mengatasi berbagai permasalahan KIP Kuliah mulai dari pendaftaran hingga penyaluran melalui berbagai kanal pengaduan, seperti ULT, Lapor.go.id serta meningkatkan sosialisasi melalui media sosial dan Pemuda Pelajar Merdeka.
-  7 Melakukan monitoring pada akun mahasiswa pada system pelaporan, serta melaksanakan monitoring dan supervisi ke perguruan tinggi dan mahasiswa penerima bantuan dan beasiswa.
-  8 Menginventarisir data guru yang masih belum valid dan segera menginformasikan kepada dinas pendidikan



BAB I

PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

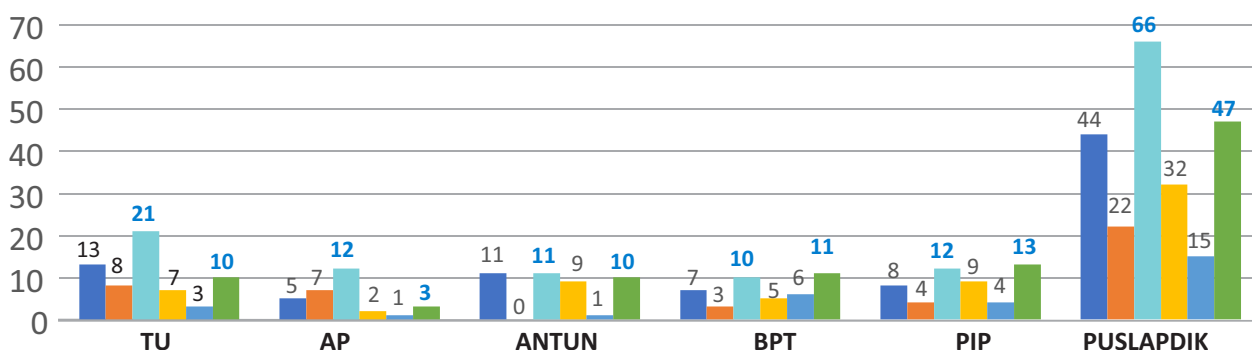
A. Gambaran Umum

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) merupakan unit kerja di bawah naungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang dipimpin oleh Kepala Pusat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan bertugas untuk melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang layanan pembiayaan pendidikan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Puslapdik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Menyiapkan kebijakan teknis di bidang layanan pembiayaan pendidikan;
2. Melaksanakan layanan pembiayaan pendidikan;
3. Melakukan koordinasi pelaksanaan layanan pembiayaan pendidikan;
4. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan pembiayaan pendidikan; dan
5. Melaksanakan urusan ketatausahaan Pusat.

Puslapdik terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan beberapa Tim Kerja dengan total jumlah pegawai 113 orang. Data sebaran pegawai pada masing-masing Tim Kerja dan Sub Bagian Tata Usaha dapat dilihat pada grafik berikut:

	TU	AP	ANTUN	BPT	PIP	PUSLAPDIK
■ Laki-Laki PNS	13	5	11	7	8	44
■ Laki-laki PPNP	8	7	0	3	4	22
■ Jumlah Laki-Laki	21	12	11	10	12	66
■ Perempuan PNS	7	2	9	5	9	32
■ Perempuan PPNP	3	1	1	6	4	15
■ Jumlah Perempuan	10	3	10	11	13	47



Puslapdik mengelola banyak program Prioritas Nasional sehingga dibutuhkan pengelolaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel dalam mendukung proses pengelolaan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat guna.

Sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilakukan oleh Puslapdik, maka dilakukan penyusunan Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja juga dilakukan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab kepada publik seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan tahun 2023 antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
6. Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
7. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2020-2024 Revisi Tahun 2022;
8. Rencana Strategis Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Tahun 2020-2024 Revisi Tahun 2022.

C. Struktur, Tugas dan Fungsi Organisasi

1. Struktur Organisasi

Pelaksanaan program pada Puslapdik dapat tercapai dengan baik dengan didukung oleh struktur organisasi yang efektif dan efisien. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan dipimpin oleh Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Dalam pelaksanaan programnya, Puslapdik membentuk 4 (empat) Tim Kerja menggunakan kriteria program besar yang bernaung di dalamnya. Tim Kerja tersebut yakni:

- Tim Kerja Program Indonesia Pintar (PIP) Dikdasmen
- Tim Kerja Beasiswa Pendidikan Tinggi (BPT)
- Tim Kerja Aneka Tunjangan Guru Non PNS (Antun)
- Tim Kerja Afirmasi Pendidikan (AP)

Tim Kerja tersebut dipimpin oleh Koordinator dan dibantu oleh pejabat fungsional tertentu dan para pegawai pelaksana. Struktur organisasi Puslapdik dapat dilihat pada gambar berikut:



2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 tahun 2021, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan bertugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang layanan pembiayaan pendidikan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Puslapdik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kebijakan teknis di bidang layanan pembiayaan pendidikan;
- b. pelaksanaan layanan pembiayaan pendidikan;
- c. koordinasi pelaksanaan layanan pembiayaan pendidikan;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan pembiayaan pendidikan; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan Pusat.

Kemudian, secara lebih detail, rincian tugas Puslapdik berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 50/O/2022 tahun 2022 antara lain:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Pusat;
- b. melaksanakan penyiapan kebijakan teknis layanan pembiayaan pendidikan;
- c. melaksanakan pengolahan data usul penerima layanan pembiayaan pendidikan;
- d. melaksanakan analisis usul penerima layanan pembiayaan pendidikan;
- e. melaksanakan penetapan penerima dan penyaluran bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik;
- f. melaksanakan penetapan penerima tunjangan bagi guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan aparatur sipil negara daerah;
- g. melaksanakan penetapan penerima dan penyaluran tunjangan/insentif bagi guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan non-pegawai negeri sipil;
- h. melaksanakan penetapan penerima dan penyaluran bantuan biaya pendidikan untuk peningkatan kualifikasi akademik bagi masyarakat;
- i. melaksanakan penetapan penerima dan penyaluran bantuan biaya pendidikan untuk peningkatan kualifikasi akademik sumber daya manusia di lingkungan Kementerian;
- j. melaksanakan koordinasi pelaksanaan layanan pembiayaan pendidikan;
- k. melaksanakan penyusunan data dan informasi penerima layanan pembiayaan pendidikan;

- l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan pembiayaan pendidikan;
- m. melaksanakan penJrusunan laporan pelaksanaan layanan pembiayaan pendidikan;
- n. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Pusat; dan
- g. melaksanakan penyusunan laporan Pusat.

D. Isu-Isu Strategis

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) memiliki tugas dan fungsi yaitu melaksanakan pelayanan bidang Pendidikan serta koordinasi dengan satuan kerja di lingkungan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan memiliki isu strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun isu strategis yang di hadapi adalah:

1. Isu-Isu Strategis

a. Pendidikan Dasar dan Menengah

- 1) Meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas tahun);
- 2) Mencegah Siswa dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi;
- 3) Menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan, satuan pendidikan nonformal lainnya atau Balai Latihan Kerja; dan pendidikan menengah universal/rintisan

b. Pendidikan Tinggi

- 1) Meningkatkan angka partisipasi kasar Pendidikan tinggi;
- 2) Memberikan kesempatan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi dan keterbatasan akses untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Pendidikan tinggi melalui jaminan biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup yang disalurkan;

- 3) Memberikan kesempatan bagi masyarakat berprestasi untuk melanjutkan pendidikan tinggi pada jenjang sarjana maupun pasca sarjana melalui Program Beasiswa Unggulan (BU), dengan komponen bantuan yang diberikan meliputi biaya pendidikan, biaya hidup, dan biaya buku sesuai dengan standar biaya masukan Kementerian Keuangan;
- 4) Memberikan peluang bagi mahasiswa agar dapat bersaing dalam bidang akademik maupun non akademik tidak hanya di dalam negeri, melainkan di ranah internasional sekaligus memberikan peluang kepada masyarakat berprestasi khususnya pegawai di lingkungan Kemendikbudristek untuk meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.

c. Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan

Pemerintah telah menetapkan guru sebagai suatu profesi, artinya suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus yang tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Guru yang profesional adalah guru yang terdidik dan terlatih sehingga memiliki kemampuan mumpuni sehingga bisa melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. Isu strategi Aneka Tunjangan Guru Non PNS:

- 1) Guru memegang peranan yang penting dalam pembangunan pendidikan suatu negara sesuai UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Selanjutnya, sesuai ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 14 Tahun 2005, Pemerintah wajib memfasilitasi tenaga pendidik untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Penetapan guru sebagai suatu profesi mewajibkan Pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sebagai penerima tunjangan profesi Non ASN. Tunjangan profesi tidak hanya diberikan kepada guru yang berstatus ASN, tetapi juga diberikan kepada guru yang berstatus Non ASN. Tunjangan profesi guru Non ASN atau TPG Non ASN diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru bagi guru Non ASN yang telah memiliki SK Inpassing/Penyetaraan, bagi guru yang belum memiliki SK Inpassing/penyetaraan diberikan sebesar Rp. 1,500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) per bulan. Tunjangan profesi guru Non ASN ini disalurkan setiap triwulan.

- 2) Sesuai amanat PP Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, Pemerintah memberikan tunjangan khusus bagi guru Non ASN yang bertugas di daerah khusus dan memenuhi persyaratan penerima tunjangan khusus Non ASN. Daerah khusus yang dimaksud adalah daerah khusus yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi yang tertuang dalam Kepmendikbudristek No. 160 Tahun 2021 tentang Daerah Khusus Berdasarkan Kondisi Geografis. Guru Non ASN yang telah mendapatkan tunjangan profesi, juga mendapatkan tunjangan khusus jika guru tersebut bertugas di daerah khusus sebagaimana terlampir dalam Kepmendikbudristek Nomor 160 Tahun 2021.
- 3) Pemerintah tidak hanya memperhatikan guru Non ASN yang telah mendapatkan tunjangan profesi dan tunjangan khusus, tetapi guru/pendidik yang belum memiliki sertifikat pendidik (belum mendapatkan tunjangan profesi) juga diapresiasi oleh pemerintah dengan cara diberikan bantuan insentif. Bantuan insentif diberikan sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) bagi pendidik formal dan Rp200.000 (dua ratus ribu) bagi pendidik Non Formal.

2. Peran Strategis Organisasi

a. Pendidikan Dasar dan Menengah

- 1) Berperan penting dalam menetapkan sasaran penerima PIP Dikdasmen melalui pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), pemadanan Data Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), usulan dari Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan kepada siswa yang layak menerima bantuan PIP.
- 2) Berperan penting dalam menyalurkan dana bansos PIP Dikdasmen kepada 17.927.992 siswa.
- 3) Berperan penting dalam memberikan supervisi kepada dinas pendidikan, sekolah, dan lembaga penyalur dalam hal pelaksanaan PIP.
- 4) Berperan penting dalam menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan UPT di bawah Kemdikbudristek dan lintas K/L untuk mendukung pelaksanaan Program

b. Pendidikan Tinggi

- 1) Menetapkan sasaran penerima KIP Kuliah dan Beasiswa Unggulan melalui pemanfaatan data penerima PIP Dikdasmen, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), dan data sasaran dari pemangku kepentingan, serta pendaftaran mandiri kepada mahasiswa yang layak menerima beasiswa sesuai syarat dan ketentuan dari masing-masing program.
- 2) Menyalurkan bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup kepada 922.286 mahasiswa yang terdiri dari 916.827 penerima Program KIP Kuliah yang tidak mampu secara ekonomi, namun memiliki potensi akademik baik serta mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar atau tertinggal, dan/atau menempuh studi pada perguruan tinggi wilayah yang terkena dampak bencana alam atau konflik sosial serta 5.459 penerima Program Beasiswa Unggulan yang merupakan putra/putri terbaik bangsa.
- 3) Berperan penting dalam menanamkan mindset dan cara berpikir mahasiswa bahwa pendidikan tinggi adalah investasi masa depan bagi mahasiswa sendiri maupun bangsa Indonesia. Bantuan biaya untuk menempuh pendidikan tinggi yang diberikan pemerintah adalah stimulus sehingga di masa depan dapat terus berkembang dan memberikan multiplier effect yang positif bagi keluarga dan masyarakat serta berkontribusi bagi pembangunan bangsa.
- 4) Melakukan pendampingan kepada mahasiswa penerima dan supervisi kepada pengelola Perguruan Tinggi dan LLDIKTI terkait penyelenggaraan program KIP Kuliah dan Beasiswa Unggulan.

C. Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan

- 1) Puslapdik telah menetapkan penerima tunjangan profesi guru Non ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyalurkan ke guru yang berhak menerima sebanyak 252.627 orang. Tunjangan profesi yang diterima guru Non ASN Sebagian dapat digunakan untuk: (1) meningkatkan kompetensi guru tersebut sehingga mutu pembelajaran di sekolah semakin baik; (2) membiayai pelaksanaan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang mendukung pelaksanaan tugas sebagai Guru yang profesional;

- (3) mengangkat martabat dan menjamin kesejahteraan guru, sehingga guru lebih tenang, disiplin, dan fokus dalam menjalankan tugasnya.
- 2) Puslapdik telah menetapkan penerima tunjangan khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyalurkan ke guru yang berhak menerima sebanyak 28.141 orang. Tunjangan khusus yang diterima guru diharapkan dapat untuk: (1) memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu di daerah khusus; (2) meningkatkan martabat dan menjamin kesejahteraan guru yang bertugas di daerah khusus, sehingga guru lebih tenang dan fokus dalam menjalankan tugasnya; (3) memacu guru untuk kreatif dan inovatif dalam pembelajaran sehingga kualitas pendidikan di daerah khusus dapat bersaing dengan pendidikan di daerah lainnya (4) digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan IT (membeli HP, Laptop, Kuota, Pulsa dll) yang dapat mendukung kelancaran pembelajaran.
- 3) Puslapdik telah menetapkan penerima bantuan insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyalurkan kepada guru yang berhak menerima sebanyak 67.126 orang. Bantuan insentif diharapkan dapat menambah penghasilan guru di luar gaji/upah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan guru dan pendidik lainnya dan dapat mendorong guru untuk bertanggung jawab terhadap tugas yang diembannya.
- 4) Puslapdik melakukan supervisi dan evaluasi proses penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan bantuan insentif, yang hasilnya akan digunakan sebagai acuan perbaikan pelayanan di tahun berikutnya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis (Renstra) Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) 2020-2024 berfokus pada meningkatkan mutu dan perluasan akses pendidikan melalui layanan pembiayaan untuk menjangkau setiap warga negara dalam berbagai usia dan jenjang untuk mendapatkan akses pendidikan dan memfasilitasi warga negara yang ingin melanjutkan pendidikan di berbagai jenjang baik yang berprestasi ataupun yang terkendala ekonomi serta akses untuk tetap dapat menimba ilmu sesuai dengan jenjang yang ditempuh.

Langkah untuk mewujudkan peningkatan akses pendidikan melalui layanan pembiayaan pendidikan adalah dengan menyediakan berbagai program/ bantuan yang di antaranya adalah:

1. Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), merupakan biaya personal peserta didik miskin dan rentan miskin, guna menjamin kepastian belajar mereka.
2. Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang Pendidikan Tinggi (Dikti) yang lebih dikenal dengan KIP Kuliah, merupakan biaya personal dan non personal bagi mahasiswa miskin dan rentan miskin, guna meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi mahasiswa warga negara Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi.
3. Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) merupakan biaya personal dan non personal bagi siswa jenjang pendidikan menengah guna menjamin keberlangsungan studi siswa yang berasal dari daerah khusus berdasarkan kondisi geografis, Orang Asli Papua (OAP), serta anak-anak di daerah perbatasan.
4. Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik), merupakan biaya personal dan non personal bagi mahasiswa, guna menjamin keberlangsungan studi mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar atau tertinggal, dan/atau menempuh studi pada perguruan tinggi wilayah yang terkena dampak bencana alam atau konflik sosial.
5. Beasiswa Unggulan (BU), merupakan biaya personal dan non personal bagi mahasiswa, guna membantu putra-putri terbaik bangsa Indonesia melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi di perguruan tinggi dalam dan/atau luar negeri dan pemberian bantuan khusus/penghargaan sesuai arahan presiden.
6. Aneka Tunjangan dan Bantuan Insentif guru Non Aparatur Sipil Negera (Non ASN), berupa Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru (TKG).

Tunjangan Profesi Guru bertujuan untuk memberikan penghargaan guru sebagai tenaga professional dalam melaksanakan sistem pendidikan nasional. Tunjangan Khusus diberikan kepada guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam menjalankan tugas di daerah khusus. Bantuan insentif bagi Pendidik non ASN diberikan kepada pendidik formal dan non formal yang belum memiliki sertifikat pendidik sebagai penambah penghasilan di luar gaji/upah dan menambah kesejahteraan dalam melaksanakan tugasnya

Renstra Puslapdik disusun untuk mendukung pencapaian dari Visi dan Misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020–2024.

Visi dan Misi Kemendikbudristek tersebut adalah sebagai berikut:

VISI DAN MISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

VISI

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif

MISI

Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.

mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.

mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi

Sebagai Satuan Kerja (Satker) di bawah Sekretariat Jenderal (Setjen), Puslapdik tidak memiliki visi dan misi tersendiri, akan tetapi sepenuhnya mendukung visi dan misi dari Kemendikbudristek dengan melaksanakan tugas dan fungsi dari Puslapdik.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut Puslapdik memiliki target kinerja dalam Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang tertuang dalam Rencana Strategis Kemendikbudristek Tahun 2020–2024.

Pada Tahun 2021 terjadi perubahan Struktur, Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di lingkungan Kemendikbudristek. Hal ini mengakibatkan Renstra Kemendikbud mengalami perubahan dalam rangka menyesuaikan dengan perubahan SOTK tersebut. Perubahan Renstra Kemendikbudristek 2020-2024 tersebut tertuang dalam Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

Dalam Renstra tersebut terdapat perubahan SK dan IKK pada tahun 2020 – 2021 dan tahun 2022 – 2024. Perubahan SK dan IKK tersebut dapat dilihat pada matriks di bawah ini:

Matrik Kinerja Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan 2020-2021

Kode	No	Sasaran Kegiatan (SK) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target	
				2020	2021
SK	1	Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan			
IKK	1.1	Jumlah siswa yang memperoleh KIP-Dikdasmen	orang	17.927.992	17.927.992
IKK	1.2	Jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP-Kuliah	orang	773.064	1.102.587
IKK	1.3	Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non-PNS yang memperoleh tunjangan/insentif	orang	311.577	321.024
SK	2	Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan			
IKK	2.1	Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB	predikat	BB	BB
IKK	2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85	nilai	85	86

Matrik Kinerja Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan 2022-2021

Kode	No	Sasaran Kegiatan (SK) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target		
				2022	2023	2024
SK	1	Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar				
IKK	1.1	Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang memperoleh PIP	Orang	10.360.614	10.360.614	10.360.614
IKK	1.2	Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat yang memperoleh PIP	Orang	4.369.968	4.369.968	4.369.968
SK	2	Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat menengah				
IKK	2.1	Jumlah siswa SMA/SMK/SMLB/Sederajat yang memperoleh PIP	Orang	3.197.410	3.197.410	3.197.410
SK	3	Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional				
IKK	3.1	Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang memperoleh tunjangan/bantuan	Orang	355.500	346.262	341.599
SK	4	Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi				
IKK	4.1	Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP - Kuliah/Afirmasi/Prestasi	Orang	775.620	816.271	927.627
SK	5	Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan				
IKK	5.1	Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB	Predikat	A	A	A
IKK	5.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA -K/L Pusat Lavanan Pembiavaan Pendidikan minimal 85	Nilai	86,00	88,00	90,00

Untuk mewujudkan target kinerja tersebut, Kepala Puslapdik, sebagai penanggungjawab program dan kegiatan telah berkomitmen kepada Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek.

Komitmen tersebut diwujudkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) antara Kepala Puslapdik dengan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek. Di dalam PK tersebut terdapat penugasan dari Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan target yang akan dicapai selama tahun 2023.

Berikut adalah ringkasan dari PK awal Tahun 2023 Kepala Puslapdik dengan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek (PK awal terlampir):

Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
dengan
Sekretaris Jenderal

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK 2023
1	[SK 1] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar	[IKK 1.1] Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang memperoleh PIP	10.360.614
		[IKK 1.2] Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat yang memperoleh PIP	4.369.968
2	[SK 2] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat menengah	[IKK 2.1] Jumlah siswa SMA/SMK/SMLB/Sederajat yang memperoleh PIP	3.197.410
3	[SK 3] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional	[IKK 3.1] Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang memperoleh tunjangan/bantuan	343.118
4	[SK 4] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi	[IKK 4.1] Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi	816.271
5	[SK 5] Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	[IKK 5.1] Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB	A
		[IKK 5.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85	88

Alokasi Anggaran

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4269	Layanan Pembiayaan Pendidikan	Rp 29.975.079.000
2	4464	Layanan Pembiayaan Pendidikan Kesejahteraan Guru Non PNS	Rp 8.027.879.624.000
3	4465	Layanan Pembiayaan Pendidikan Dasar Menengah	Rp 8.386.822.697.000
4	4469	Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi	Rp 12.062.396.603.000
Total			Rp 28.507.074.003.000

Pada PK awal Tahun 2023 tersebut, Puslapdik mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 28.507.074.003.000,-. Seiring berjalannya pelaksanaan program dan anggaran di tahun 2023, terjadi perubahan anggaran di Puslapdik. Perubahan tersebut berupa pengurangan maupun penambahan anggaran, baik dari sumber internal maupun dari eksternal. Penambahan diantaranya adalah dengan pengembalian anggaran Program Indonesia Pintar (PIP) jenjang SD/ sederajat, serta penambahan anggaran untuk menambah sasaran mahasiswa baru program KIP Kuliah. Selain itu terdapat pengembalian anggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non PNS yang dikembalikan ke Kementerian Keuangan. Hingga akhir tahun 2023 total alokasi anggaran Puslapdik menjadi Rp.29.521.692.495.000,-.

Oleh karena perubahan anggaran tersebut, Puslapdik mengajukan revisi PK tahun 2023. Berikut adalah ringkasan revisi PK Tahun 2023 (Revisi PK tahun 2023 terlampir):

Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Dengan Sekretaris Jenderal

Target Kinerja

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK 2023
1	[SK 1] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar	[IKK 1.1] Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang memperoleh PIP	10.360.614
		[IKK 1.2] Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat yang memperoleh PIP	4.369.968
2	[SK 2] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat menengah	[IKK 2.1] Jumlah siswa SMA/SMK/SMLB/Sederajat yang memperoleh PIP	3.197.410
3	[SK 3] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional	[IKK 3.1] Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang memperoleh tunjangan/bantuan	343.118
4	[SK 4] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi	[IKK 4.1] Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi	816.271
5	[SK 5] Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	[IKK 5.1] Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB	A
		[IKK 5.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85	88

Alokasi Anggaran

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi	
1	4269	Layanan Pembiayaan Pendidikan	Rp	29.975.079.000
2	4464	Layanan Pembiayaan Pendidikan Kesejahteraan Guru Non PNS	Rp	7.606.586.446.000
3	4465	Layanan Pembiayaan Pendidikan Dasar Menengah	Rp	9.779.934.947.000
4	4469	Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi	Rp	12.105.196.023.000
Total			Rp	29.521.692.495.000

Di dalam PK tersebut, Puslapdik memiliki banyak program prioritas, baik itu sebagai Prioritas Nasional (PN) maupun prioritas kementerian. Program prioritas tersebut bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel
Program Prioritas di Puslapdik Tahun 2023

Kode		Program / Kegiatan / KRO / RO	Target Sasaran	Satuan	Anggaran
01-Program	023.01.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun			9.779.934.947.000
02-Kegiatan	4465	Layanan Pembiayaan Pendidikan Dasar Menengah			9.779.934.947.000
1-KRO	4465.QEK	Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah[Base Line]	17.931.040	Orang	9.779.934.947.000
2-RO	4465.QEK.001	Siswa SD/Paket A Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	10.360.614	Orang	4.223.762.199.000
2-RO	4465.QEK.002	Siswa SMP/Paket B Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	4.369.968	Orang	2.726.502.381.000
2-RO	4465.QEK.003	Siswa SMA/Paket C Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	1.368.243	Orang	1.183.707.440.000
2-RO	4465.QEK.004	Siswa SMK Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	1.829.167	Orang	1.538.461.070.000
2-RO	4465.QEK.005	Siswa Penerima Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)	3.048	Orang	107.501.857.000
01-Program	023.01.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran			7.606.586.446.000
02-Kegiatan	4464	Layanan Pembiayaan Pendidikan Kesejahteraan Guru Non PNS			7.606.586.446.000
1-KRO	4464.QEK	Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah[Base Line]	343.118	Orang	7.606.586.446.000
2-RO	4464.QEK.001	Guru TK/TKLB Non-PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	52.086	Orang	1.561.599.892.000
2-RO	4464.QEK.002	Guru Dikdas Non-PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	83.205	Orang	2.081.373.528.000

Kode		Program / Kegiatan / KRO / RO	Target Sasaran	Satuan	Anggaran
2-RO	4464.QEK.003	Guru Dikmen Non-PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	66.378	Orang	1.775.757.784.000
2-RO	4464.QEK.004	Kepala Sekolah Non-PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	43.600	Orang	1.440.586.055.000
2-RO	4464.QEK.005	Guru TK/TKLB yang Menerima Tunjangan Khusus	393	Orang	8.944.767.000
2-RO	4464.QEK.006	Guru Dikdas yang Menerima Tunjangan Khusus	23.975	Orang	450.064.316.000
2-RO	4464.QEK.007	Guru Dikmen yang Menerima Tunjangan Khusus	3.379	Orang	67.756.967.000
2-RO	4464.QEK.008	Kepala Sekolah yang menerima Tunjangan Khusus	393	Orang	9.298.337.000
2-RO	4464.QEK.009	Guru TK/TKLB/Dikmas Non-PNS yang Menerima Insentif	41.065	Orang	108.086.400.000
2-RO	4464.QEK.010	Guru Dikdas Non-PNS Yang Menerima Insentif	25.794	Orang	92.858.400.000
2-RO	4464.QEK.011	Guru Dikmen Non-PNS yang Menerima Insentif	2.850	Orang	10.260.000.000
01-Program	023.01.DK	Program Pendidikan Tinggi			12.105.196.023.000
02-Kegiatan	4469	Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi			12.105.196.023.000
1-KRO	4469.BEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi[Base Line]	4.464	Orang	184.540.000.000
2-RO	4469.BEJ.001	Beasiswa Unggulan	4.464	Orang	184.540.000.000
-KRO	4469.QEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi[Base Line]	921.053	Orang	11.920.656.023.000
2-RO	4469.QEJ.001	Mahasiswa Yang mendapatkan KIP Kuliah	913.636	Orang	11.912.856.603.000
2-RO	4469.QEJ.002	Mahasiswa Yang mendapatkan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)	7.417	Orang	7.799.420.000
01-Program	023.01.WA	Program Dukungan Manajemen			6.486.402.000
02-Kegiatan	4269	Layanan Pembiayaan Pendidikan			6.486.402.000
-KRO	4269.BEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi[Base Line]	108	Orang	6.486.402.000
2-RO	4269.BEJ.001	Beasiswa Unggulan	108	Orang	6.486.402.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Gambaran Umum

Kinerja Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) tahun 2023 diukur dari pencapaian 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 oleh Kepala Puslapdik. Secara umum, capaian kinerja Puslapdik melampaui target yang telah ditetapkan. Adapun capaian kinerja Puslapdik tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
[SK 1] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar	[IKK 1.1] Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang memperoleh PIP	10.360.614	10.386.997	100,25
	[IKK 1.2] Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat yang memperoleh PIP	4.369.968	4.471.118	102,31
[SK 2] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat menengah	[IKK 2.1] Jumlah siswa SMA/SMK/SMALB/Sederajat yang memperoleh PIP	3.197.410	3.255.247	101,81
[SK 3] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional	[IKK 3.1] Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang memperoleh tunjangan/bantuan	343.118	348.873	101,68
[SK 4] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi	[IKK 4.1] Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi	816.271	929.950	113,93
[SK 5] Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	[IKK 5.1] Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB	A	A	100
	[IKK 5.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85	88	93,29	106,01

Setiap Sasaran Kegiatan (SK) pada perjanjian kinerja memiliki indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi yang disebut Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Pengukuran ketercapaian IKK dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Perbandingan capaian IKK Puslapdik dengan tahun sebelumnya (tahun 2022) dan target renstra (tahun 2024) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2023

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja 2023	Capaian Tahun 2023		Capaian 2022	Target 2024
				Realisasi	%		
1	Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar	1.1 Jumlah siswa SD/SDLB/ Sederajat yang memperoleh PIP	10.360.614 Orang	10.386.997	100,3	10.360.614	10.360.614
		1.2 Jumlah siswa SMP/SMPLB/ Sederajat yang memperoleh PIP	4.369.968 Orang	4.471.118	102,3	4.369.968	4.369.968
2	Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat menengah	2.1 Jumlah siswa SMA/SMK/ SMLB/ Sederajat yang memperoleh PIP	3.197.410 Orang	3.255.247	101,81	3.222.686	3.197.410
3	Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional	3.1 Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang memperoleh tunjangan/ bantuan	343.118 Orang	348.873	101,68	346.622 (107,97%)	341.599
4	Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi	4.1 Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP-Kuliah/ Afirmasi/ Prestasi	816.271 Orang	929.950	113.93	792.913 (102,23%)	927.627
5	Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	5.1 Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB	A	A	100	A	A
		5.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA - K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85	86	93,29	106,01	86,16 (100,2)	90

Mayoritas perhitungan target IKK pada Puslapdik dicapai dengan non kumulatif, kecuali IKK 4.1 dihitung secara kumulatif. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah penjelasan dari masing-masing capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan:

Sasaran Kegiatan 1

Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar

Capaian Sasaran Kegiatan terkait ketersediaan layanan pembiayaan pendidikan tingkat dasar (SK 1) melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian SK 1 dapat dilihat pada gambar berikut.

	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PIP SD/Paket A/Sederajat	10.360.614	10.386.997	100,25%
PIP SMP/Paket B/Sederajat	4.369.968	4.471.118	102,31%

Pada SK 1 terdapat 2 (dua) IKK yaitu terkait penyaluran PIP kepada siswa SD/SDLB/Sederajat dan penyaluran PIP kepada siswa SMP/SMPLB/ Sederajat. Dana bantuan PIP pada jenjang tersebut disalurkan kepada siswa berusia 6 s.d 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin/rentan miskin yang tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota dan Pemangku Kepentingan untuk membantu biaya personal pendidikan dalam rangka meningkatkan akses bagi usia tersebut untuk mendapatkan layanan pendidikan sekolah dasar sampai tamat satuan pendidikan sekolah dasar dalam mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

IKK 1.1

Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang memperoleh PIP

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2023		Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Target Renstra (2024)
			Target	Realisasi			
1	Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar	Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang memperoleh PIP	10.360.614	10.386.997	10.411.608	10.360.614	10.360.614

Capaian IKK 1.1 tahun 2023 melebihi target yang telah ditetapkan. Namun dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, capaian tahun 2023 lebih rendah dari capaian tahun 2021.

Tahun 2023 bisa melebihi target karena disebabkan karena realisasi siswa SD/Paket A/SDLB/Sederajat pada kelas awal dan kelas akhir melebihi target yang direncanakan, dimana untuk siswa penerima PIP kelas awal dan kelas akhir diberikan dana bansos untuk 1 semester atau setengah dari biaya satuan bansos yang ditetapkan, sehingga jumlah penerima bisa melebihi target yang direncanakan sebanyak 26.383 siswa atau 0,25 % dari target yang direncanakan pada tahun 2023 dan pada tahun 2021 sebanyak 50.994 Siswa atau 0,49% dari target yang direncanakan tahun 2021.

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan dalam mendukung pencapaian target kinerja antara lain:

- 1) Pengolahan data hasil pemadanan antara siswa Dapodik dengan DTKS serta data P3KE.
- 2) Pengolahan data usulan dinas pendidikan dan pemangku kepentingan.
- 3) Penetapan SK Nominasi PIP yang ditindaklanjuti dengan pengaktifasian rekening secara maksimal.
- 4) Penetapan SK Pemberian PIP kepada siswa yang sudah memiliki rekening aktif.
- 5) Pelaksanaan koordinasi dengan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan pemangku kepentingan.
- 6) Pelaksanaan penyaluran dana PIP melalui bank penyalur yang diatur dalam perjanjian kerja sama.
- 7) Penyiapan perangkat TIK dan sistem informasi yang mendukung pelaksanaan PIP

Faktor Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja antara lain:

- 1) Kondisi data siswa hasil pemadanan antara siswa Dapodik dengan DTKS semakin valid dari tahun-tahun sebelumnya.
- 2) Kondisi data usulan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan pemangku kepentingan sesuai dengan target sasaran.

Kondisi data siswa di Dapodik yang dinyatakan layak PIP oleh satuan pendidikan

Sedangkan faktor penyebab kegagalan pencapaian target kinerja antara lain:

- 1) Masih terdapat data siswa hasil pemadanan antara siswa Dapodik dengan DTKS yang memiliki NIK belum valid dukcapil, tanggal lahir belum valid, nama ibu kandung belum valid, dan NISN belum valid.
- 2) Masih terdapat data usulan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan pemangku kepentingan yang memiliki NIK belum valid dukcapil, tanggal lahir belum valid, nama ibu kandung belum valid, dan NISN belum valid.

Hambatan

Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja antara lain:

- 1) Satuan pendidikan belum optimal dalam melakukan pemutakhiran data NIK, NISN, nama ibu kandung dan tanggal lahir siswa sehingga mempengaruhi penetapan calon siswa penerima PIP.
- 2) Dinas pendidikan belum optimal dalam mendorong sekolah untuk melakukan pemutakhiran data NIK, NISN, nama ibu kandung, dan tanggal lahir siswa. Karakteristik DTKS yang dinamis dan selalu berubah.
- 3) Karakteristik Dapodik yang dinamis dan selalu berubah.
- 4) Keterlambatan satuan pendidikan dalam melakukan pembaharuan data Siswa dan sinkronisasi Dapodik.
- 5) Masih ditemukannya data NIK Siswa yang tidak valid dukcapil pada Dapodik.
- 6) Kondisi geografis jarak yang jauh dalam mengakses layanan perbankan.
- 7) Pembatasan aktivasi rekening secara kolektif hanya kepada siswa yang memenuhi kondisi persyaratan sesuai persesjen, sehingga menyebabkan antrian yang ramai di bank penyalur.
- 8) Beberapa Satuan pendidikan tidak aktif mengakses SiPintar sehingga melewatkan informasi SK PIP atau terlambat mengetahui informasi SK.
- 9) Beberapa Satuan pendidikan tidak aktif menyampaikan informasi SK kepada Siswa penerima, sehingga Siswa telat mengetahui informasi SK.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain:

- 1) Aktif melaksanakan sosialisasi kewajiban penggunaan NIK kepada satuan pendidikan dan dinas pendidikan.
- 2) Berkoordinasi dengan Setditjen Dukcapil Kemendagri tentang mekanisme pembuatan atau pembaharuan NIK.

- 3) Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan sekolah terkait mekanisme pembuatan atau pembaharuan NIK.
- 4) Aktif melaksanakan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan satuan pendidikan terkait kewajiban penyaluran dana PIP kepada siswa yang memiliki NISN valid dan NIK valid dukcapil, tanggal lahir valid, nama ibu kandung valid.
- 5) Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan satuan pendidikan terkait mekanisme pembaharuan data NISN dan NIK pada laman verval pd.
- 6) Berkoordinasi dengan Pusdatin untuk mendapatkan data hasil padanan Dapodik dengan DTKS valid dan terbaru.
- 7) Berkoordinasi secara rutin dan intensif dengan Pusdatin Kemendikbud untuk mendapatkan data pokok pendidikan valid dan terbaru.
- 8) Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan, satuan pendidikan dan pemangku kepentingan terkait kebijakan pelaksanaan PIP tahun 2023.
- 9) Menginformasikan kepada dinas pendidikan agar menghimbau satuan pendidikan untuk melakukan pemutakhiran data di Dapodik sebelum cut off pemutakhiran data dapodik dalam rangka persiapan usulan dinas pendidikan dan pemangku kepentingan.
- 10) Menampilkan keterisian data siswa di Dapodik (NIK valid Dukcapil, DTKS, status kelayakan PIP) pada aplikasi SiPintar sebagai kontrol kualitas keterisian data siswa di Dapodik.
- 11) Melakukan koordinasi dengan bank penyalur untuk melakukan langkah-langkah percepatan proses aktivasi rekening SimPel siswa calon penerima PIP sesuai ketentuan.
- 12) Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan satuan pendidikan
- 13) Menjadikan akses SiPintar oleh satuan pendidikan sebagai salah satu indikator penilaian dalam pemberian apresiasi dinas pendidikan, guna mendorong akses SiPintar oleh satuan pendidikan.
- 14) Menginformasikan SK Nominasi kepada siswa penerima melalui SMS Blast.
- 15) Mensosialisasikan SiPintar kepada siswa terkait fitur pencarian penerima PIP di beranda SiPintar, agar siswa bisa mengetahui informasi SK tanpa harus login di

Strategi

Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja antara lain:

- 1) Melakukan penetapan kebijakan-kebijakan strategis untuk mengakomodir pelaksanaan PIP yang sesuai dengan kondisi lapangan.
- 2) Melakukan koordinasi yang rutin dengan instansi yang menjadi sumber data calon penerima bantuan PIP Dikdasmen.
- 3) Melakukan koordinasi yang rutin dan intens dengan dinas pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya baik ditingkat pusat maupun daerah untuk memastikan ketepatan sasaran, jumlah, waktu dan guna dari dana yang akan disalurkan.
- 4) Melakukan kebijakan tambahan dan/atau penjelasan teknis yang dibutuhkan untuk memudahkan proses verifikasi, validasi, pemrosesan, penetapan dan penyaluran dana PIP Dikdasmen kepada siswa.

Menerbitkan SK pemberian relaksasi bagi siswa calon penerima yang belum melakukan aktivasi dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyaluran dana PIP, sehingga penyaluran dana PIP dapat dilakukan bersamaan dengan aktivasi rekening.

IKK 1.2

Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat yang memperoleh PIP

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2023		Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Target Renstra (2024)
			Target	Realisasi			
1	Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar	Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat yang memperoleh PIP	4.369.968	4.471.118	4.401.653	4.369.968	4.369.968

Capaian IKK 1.2 pada tahun 2022 sama dengan target yang telah ditetapkan. Sedangkan capaian tahun 2021 dan 2023 melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh realisasi siswa SMP/Paket B/SMPLB/Sederajat pada kelas awal dan kelas akhir melebihi target yang direncanakan, dimana untuk siswa penerima PIP kelas awal dan kelas akhir diberikan dana bansos untuk 1 semester atau setengah dari biaya satuan bansos yang ditetapkan, sehingga jumlah penerima bisa melebihi target yang direncanakan sebanyak 101.150 siswa atau 2,31 % dari target yang direncanakan pada tahun 2023 dan pada tahun 2021 sebanyak 31.685 Siswa atau 0,73% dari target yang direncanakan tahun 2021.

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan dalam mendukung pencapaian target kinerja antara lain:

- 1) Pengolahan data hasil pemadanan antara siswa Dapodik dengan DTKS serta data P3KE.
- 2) Pengolahan data usulan dinas pendidikan dan pemangku kepentingan.
- 3) Penetapan SK Nominasi PIP yang ditindaklanjuti dengan pengaktifasian rekening secara maksimal.
- 4) Penetapan SK Pemberian PIP kepada siswa yang sudah memiliki rekening aktif.
- 5) Pelaksanaan koordinasi dengan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan pemangku kepentingan.
- 6) Pelaksanaan penyaluran dana PIP melalui bank penyalur yang diatur dalam perjanjian kerja sama.
- 7) Penyiapan perangkat TIK dan sistem informasi yang mendukung pelaksanaan PIP

Faktor Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja antara lain:

- 1) Kondisi data siswa hasil pemadanan antara siswa Dapodik dengan DTKS semakin valid dari tahun-tahun sebelumnya.
- 2) Kondisi data usulan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan pemangku kepentingan sesuai dengan target sasaran.
- 3) Kondisi data siswa di Dapodik yang dinyatakan layak PIP oleh satuan pendidikan semakin valid.

Sedangkan faktor penyebab kegagalan pencapaian target kinerja antara lain:

- 1) Masih terdapat data siswa hasil pemadanan antara siswa Dapodik dengan DTKS yang memiliki NIK belum valid dukcapil, tanggal lahir belum valid, nama ibu kandung belum valid, dan NISN belum valid.
- 2) Masih terdapat data usulan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan pemangku kepentingan yang memiliki NIK belum valid dukcapil, tanggal lahir belum valid, nama ibu kandung belum valid, dan NISN belum valid.

Hambatan

Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja antara lain:

- 1) Satuan pendidikan belum optimal dalam melakukan pemutakhiran data NIK, NISN, nama ibu kandung dan tanggal lahir siswa sehingga mempengaruhi penetapan calon siswa penerima PIP.
- 2) Dinas pendidikan belum optimal dalam mendorong satuan pendidikan untuk melakukan pemutakhiran data NIK, NISN, nama ibu kandung, dan tanggal lahir siswa. Karakteristik DTKS yang dinamis dan selalu berubah.
- 3) Karakteristik Dapodik yang dinamis dan selalu berubah.
- 4) Keterlambatan sekolah dalam melakukan updating data Siswa dan sinkronisasi Dapodik.
- 5) Masih ditemukannya data NIK Siswa yang tidak valid dukcapil pada Dapodik.
- 6) Kondisi geografis jarak yang jauh dalam mengakses layanan perbankan.
- 7) Pembatasan aktivasi rekening secara kolektif hanya kepada siswa yang memenuhi kondisi persyaratan sesuai persesjen, sehingga menyebabkan antrian yang ramai di bank penyalur.
- 8) Beberapa Satuan Pendidikan tidak aktif mengakses SiPintar sehingga melewatkan informasi SK PIP atau terlambat mengetahui informasi SK.
- 9) Beberapa Satuan Pendidikan tidak aktif menyampaikan informasi SK kepada Siswa penerima, sehingga Siswa telat mengetahui informasi SK.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain:

- 1) Aktif melaksanakan sosialisasi kewajiban penggunaan NIK kepada satuan pendidikan dan dinas pendidikan.
- 2) Berkoordinasi dengan Setditjen Dukcapil Kemendagri tentang mekanisme pembuatan atau pembaharuan NIK.
- 3) Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan satuan pendidikan terkait mekanisme pembuatan atau pembaharuan NIK.
- 4) Aktif melaksanakan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan satuan pendidikan terkait kewajiban penyaluran dana PIP kepada siswa yang memiliki NISN valid dan NIK valid dukcapil, tanggal lahir valid, nama ibu kandung valid.
- 5) Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan satuan pendidikan terkait mekanisme pembaharuan data NISN dan NIK pada laman verval pd.

- 6) Berkoordinasi dengan Pusdatin untuk mendapatkan data hasil padanan Dapodik dengan DTKS valid dan terbaru.
- 7) Berkoordinasi secara rutin dan intensif dengan Pusdatin Kemendikbud untuk mendapatkan data pokok pendidikan valid dan terbaru.
- 8) Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan, satuan pendidikan dan pemangku kepentingan terkait kebijakan pelaksanaan PIP tahun 2023.
- 9) Menginformasikan kepada dinas pendidikan agar menghimbau satuan pendidikan untuk melakukan pemutakhiran data di Dapodik sebelum cut off pemutakhiran data dapodik dalam rangka persiapan usulan dinas pendidikan dan pemangku kepentingan.
- 10) Menampilkan keterisian data siswa di Dapodik (NIK valid Dukcapil, DTKS, status kelayakan PIP) pada aplikasi SiPintar sebagai kontrol kualitas keterisian data siswa di Dapodik.
- 11) Melakukan koordinasi dengan bank penyalur untuk melakukan langkah-langkah percepatan proses aktivasi rekening SimPel siswa calon penerima PIP sesuai ketentuan.
- 12) Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan satuan pendidikan untuk mengakses SiPintar secara berkala.
- 13) Menjadikan akses SiPintar oleh satuan pendidikan sebagai salah satu indikator penilaian dalam pemberian apresiasi dinas pendidikan, guna mendorong akses SiPintar oleh satuan pendidikan.
- 14) Menginformasikan SK Nominasi kepada siswa penerima melalui SMS Blast.
- 15) Mensosialisasikan SiPintar kepada siswa terkait fitur pencarian penerima PIP di beranda SiPintar, agar siswa bisa mengetahui informasi SK tanpa harus login di SiPintar

Strategi

Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja antara lain:

- 1) Melakukan penetapan kebijakan-kebijakan strategis untuk mengakomodir pelaksanaan PIP yang sesuai dengan kondisi lapangan.
- 2) Melakukan koordinasi yang rutin dengan instansi yang menjadi sumber data calon penerima bantuan PIP Dikdasmen.
- 3) Melakukan koordinasi yang rutin dan intens dengan dinas pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya baik ditingkat pusat maupun daerah untuk memastikan ketepatan sasaran, jumlah, waktu dan guna dari dana yang akan disalurkan.

- 6) Berkoordinasi dengan Pusdatin untuk mendapatkan data hasil padanan Dapodik dengan DTKS valid dan terbaru.
- 7) Berkoordinasi secara rutin dan intensif dengan Pusdatin Kemendikbud untuk mendapatkan data pokok pendidikan valid dan terbaru.
- 8) Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan, satuan pendidikan dan pemangku kepentingan terkait kebijakan pelaksanaan PIP tahun 2023.
- 9) Menginformasikan kepada dinas pendidikan agar menghimbau satuan pendidikan untuk melakukan pemutakhiran data di Dapodik sebelum cut off pemutakhiran data dapodik dalam rangka persiapan usulan dinas pendidikan dan pemangku kepentingan.
- 10) Menampilkan keterisian data siswa di Dapodik (NIK valid Dukcapil, DTKS, status kelayakan PIP) pada aplikasi SiPintar sebagai kontrol kualitas keterisian data siswa di Dapodik.
- 11) Melakukan koordinasi dengan bank penyalur untuk melakukan langkah-langkah percepatan proses aktivasi rekening SimPel siswa calon penerima PIP sesuai ketentuan.
- 12) Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan satuan pendidikan untuk mengakses SiPintar secara berkala.
- 13) Menjadikan akses SiPintar oleh satuan pendidikan sebagai salah satu indikator penilaian dalam pemberian apresiasi dinas pendidikan, guna mendorong akses SiPintar oleh satuan pendidikan.
- 14) Menginformasikan SK Nominasi kepada siswa penerima melalui SMS Blast.
- 15) Mensosialisasikan SiPintar kepada siswa terkait fitur pencarian penerima PIP di beranda SiPintar, agar siswa bisa mengetahui informasi SK tanpa harus login di SiPintar

Strategi

Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja antara lain:

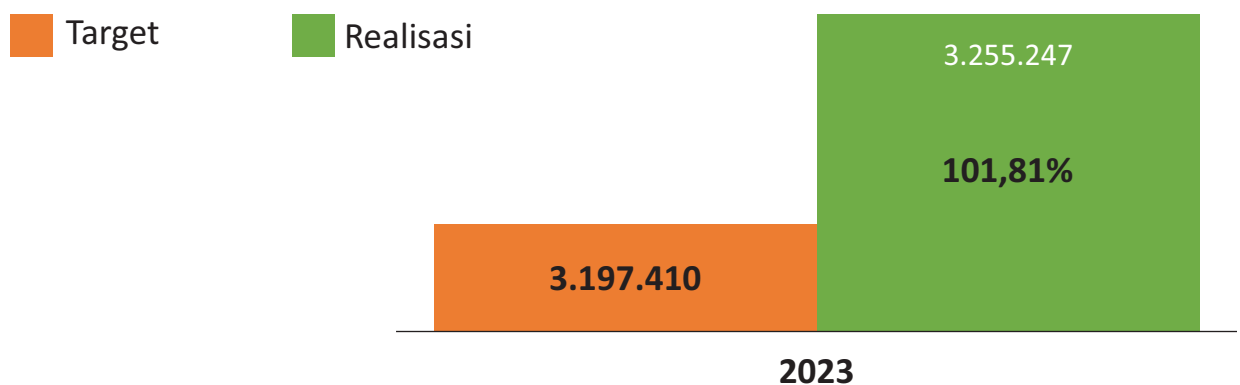
- 1) Melakukan penetapan kebijakan-kebijakan strategis untuk mengakomodir pelaksanaan PIP yang sesuai dengan kondisi lapangan.
- 2) Melakukan koordinasi yang rutin dengan instansi yang menjadi sumber data calon penerima bantuan PIP Dikdasmen.
- 3) Melakukan koordinasi yang rutin dan intens dengan dinas pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya baik ditingkat pusat maupun daerah untuk memastikan ketepatan sasaran, jumlah, waktu dan guna dari dana yang akan disalurkan.

- 4) Melakukan kebijakan tambahan dan/atau penjelasan teknis yang dibutuhkan untuk memudahkan proses verifikasi, validasi, pemrosesan, penetapan dan penyaluran dana PIP Dikdasmen kepada siswa.
- 5) Menerbitkan SK pemberian relaksasi bagi siswa calon penerima yang belum melakukan aktivasi dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyaluran dana PIP, sehingga penyaluran dana PIP dapat dilakukan bersamaan dengan aktivasi rekening.

Sasaran Kegiatan 2

Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat menengah

Capaian Sasaran Kegiatan terkait ketersediaan layanan pembiayaan pendidikan tingkat menengah (SK 2) melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian SK 2 dapat dilihat pada gambar berikut.



IKK 2.1

Jumlah siswa SMA/SMK/SMLB/Sederajat yang memperoleh PIP

Dana bantuan PIP jenjang SMA/SMK/SMLB/Sederajat disalurkan kepada siswa berusia 6 s.d 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin/rentan miskin yang tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota dan Pemangku Kepentingan untuk membantu biaya personal Pendidikan dalam rangka meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sekolah dasar sampai tamat satuan pendidikan sekolah dasar untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Penerima PIP Jenjang SMA/SMK/SMLB/Sederajat dihitung berdasarkan hasil pemadanan antara siswa jenjang tersebut di Dapodik dengan anak dari keluarga miskin/rentan miskin di DTKS Penerima Bantuan Sosial dan P3KE Desil 1-2, ditambah dengan usulan dari Dinas Pendidikan Provinsi/kab/kota dan Pemangku Kepentingan dalam bentuk rekomendasi untuk ditetapkan sebagai penerima PIP jenjang SMA/SMK/SMLB/Sederajat.

	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
SMA/SMK/SMLB/Sederajat	3.197.410	3.251.004	101,68%
Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)	3.048	4.243	139,21%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2023		Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Target Renstra (2024)
			Target	Realisasi			
1	Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat menengah	Jumlah siswa SMA/SMK/SMLB/Sederajat yang memperoleh PIP	3.197.410	3.255.247	3.271.717	3.222.686	3.197.410

Pada tahun 2023, 2022 dan 2021, realisasi penyaluran dana PIP kepada siswa SMA/SMK/SMLB/Sederajat melebihi target yang direncanakan. Hal ini disebabkan karena realisasi siswa SMA/SMK/SMLB/Sederajat pada kelas awal dan kelas akhir melebihi target yang direncanakan, dimana untuk siswa penerima PIP kelas awal dan kelas akhir diberikan dana bansos untuk 1 semester atau setengah dari biaya satuan bansos yang ditetapkan, sehingga jumlah penerima bisa melebihi target yang direncanakan sebanyak 53.594 siswa atau 1,68 % dari target yang direncanakan pada tahun 2023, pada tahun 2022 sebanyak 25.276 Siswa atau 0,79% dari target yang direncanakan tahun 2022 dan pada tahun 2021 sebanyak 74.307 siswa atau sebesar 2,32% dari target yang direncanakan tahun 2021.

Selain itu pada tahun 2023 Puslapdik mendapatkan penugasan baru untuk menyalurkan bantuan Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM). Di tahun 2023 ADEM ditargetkan sebanyak 3.048, akan tetapi dapat tersalurkan sebanyak 4.243 orang atau 139,21% dari target.

Hali ini bisa terjadi karena perencanaan di satker sebelumnya menghitung siswa kelas baru sebanyak 1 orang, karena perhitungan biaya untuk 1 tahun (12 bulan), sedangkan pelaksanaannya untuk 2 orang dengan masing-masing di bayar 1 semester (6 bulan), sehingga bisa menambah realisasi.

Program Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan dalam mendukung pencapaian target kinerja antara lain:

- 1) Pengolahan data hasil pemadanan antara siswa Dapodik dengan DTKS serta data P3KE.
- 2) Pengolahan data usulan dinas pendidikan dan pemangku kepentingan.
- 3) Penetapan SK Nominasi PIP yang ditindaklanjuti dengan pengaktifasian rekening secara maksimal.
- 4) Penetapan SK Pemberian PIP kepada siswa yang sudah memiliki rekening aktif.
- 5) Pelaksanaan koordinasi dengan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan pemangku kepentingan.
- 6) Pelaksanaan penyaluran dana PIP melalui bank penyalur yang diatur dalam perjanjian kerja sama.
- 7) Penyiapan perangkat TIK dan sistem informasi yang mendukung pelaksanaan PIP

Faktor Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja antara lain:

- 1) Kondisi data siswa hasil pemadanan antara siswa Dapodik dengan DTKS semakin valid dari tahun-tahun sebelumnya.
- 2) Kondisi data usulan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan pemangku kepentingan sesuai dengan target sasaran.
- 3) Kondisi data siswa di Dapodik yang dinyatakan layak PIP oleh satuan pendidikan semakin valid.

Sedangkan faktor penyebab kegagalan pencapaian target kinerja antara lain:

- 1) Masih terdapat data siswa hasil pemadanan antara siswa Dapodik dengan DTKS yang memiliki NIK belum valid dukcapil, tanggal lahir belum valid, nama ibu kandung belum valid, dan NISN belum valid.
- 2) Masih terdapat data usulan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan pemangku kepentingan yang memiliki NIK belum valid dukcapil, tanggal lahir belum valid, nama ibu kandung belum valid, dan NISN belum valid.

Hambatan

Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja antara lain:

- 1) Satuan pendidikan belum optimal dalam melakukan pemutakhiran data NIK, NISN, nama ibu kandung dan tanggal lahir siswa sehingga mempengaruhi penetapan calon siswa penerima PIP.
- 2) Dinas pendidikan belum optimal dalam mendorong satuan pendidikan untuk melakukan pemutakhiran data NIK, NISN, nama ibu kandung, dan tanggal lahir siswa. Karakteristik DTKS yang dinamis dan selalu berubah.
- 3) Karakteristik Dapodik yang dinamis dan selalu berubah.
- 4) Keterlambatan satuan pendidikan dalam melakukan updating data Siswa dan sinkronisasi Dapodik.
- 5) Masih ditemukannya data NIK Siswa yang tidak valid dukcapil pada Dapodik.
- 6) Kondisi geografis jarak yang jauh dalam mengakses layanan perbankan.
- 7) Pembatasan aktivasi rekening secara kolektif hanya kepada siswa yang memenuhi kondisi persyaratan sesuai persesjen, sehingga menyebabkan antrian yang ramai di bank penyalur.
- 8) Beberapa Satuan pendidikan tidak aktif mengakses SiPintar sehingga melewatkan informasi SK PIP atau terlambat mengetahui informasi SK.
- 9) Beberapa Satuan pendidikan tidak aktif menyampaikan informasi SK kepada Siswa penerima, sehingga Siswa telat mengetahui informasi SK.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain:

- 1) Aktif melaksanakan sosialisasi kewajiban penggunaan NIK kepada satuan pendidikan dan dinas pendidikan.
- 2) Berkoordinasi dengan Setditjen Dukcapil Kemendagri tentang mekanisme pembuatan atau pembaharuan NIK.
- 3) Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan satuan pendidikan terkait mekanisme pembuatan atau pembaharuan NIK.
- 4) Aktif melaksanakan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan satuan pendidikan terkait kewajiban penyaluran dana PIP kepada siswa yang memiliki NISN valid dan NIK valid dukcapil, tanggal lahir valid, nama ibu kandung valid.
- 5) Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan satuan pendidikan terkait mekanisme pembaharuan data NISN dan NIK pada laman verval pd.

Hambatan

- 6) Berkoordinasi dengan Pusdatin untuk mendapatkan data hasil padanan Dapodik dengan DTKS valid dan terbaru.
- 7) Berkoordinasi secara rutin dan intensif dengan Pusdatin Kemendikbud untuk mendapatkan data pokok pendidikan valid dan terbaru.
- 8) Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan, satuan pendidikan dan pemangku kepentingan terkait kebijakan pelaksanaan PIP tahun 2023.
- 9) Menginformasikan kepada dinas pendidikan agar menghimbau satuan pendidikan untuk melakukan pemutakhiran data di Dapodik sebelum cut off pemutakhiran data dapodik dalam rangka persiapan usulan dinas pendidikan dan pemangku kepentingan.
- 10) Menampilkan keterisian data siswa di Dapodik (NIK valid Dukcapil, DTKS, status kelayakan PIP) pada aplikasi SiPintar sebagai kontrol kualitas keterisian data siswa di Dapodik.
- 11) Melakukan koordinasi dengan bank penyalur untuk melakukan langkah-langkah percepatan proses aktivasi rekening SimPel siswa calon penerima PIP sesuai ketentuan.
- 12) Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan satuan pendidikan untuk mengakses SiPintar secara berkala.
- 13) Menjadikan akses SiPintar oleh satuan pendidikan sebagai salah satu indikator penilaian dalam pemberian apresiasi dinas pendidikan, guna mendorong akses SiPintar oleh sekolah.
- 14) Menginformasikan SK Nominasi kepada siswa penerima melalui SMS Blast.
- 15) Mensosialisasikan SiPintar kepada siswa terkait fitur pencarian penerima PIP di beranda SiPintar, agar siswa bisa mengetahui informasi SK tanpa harus login di SiPintar

Strategi

Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja antara lain:

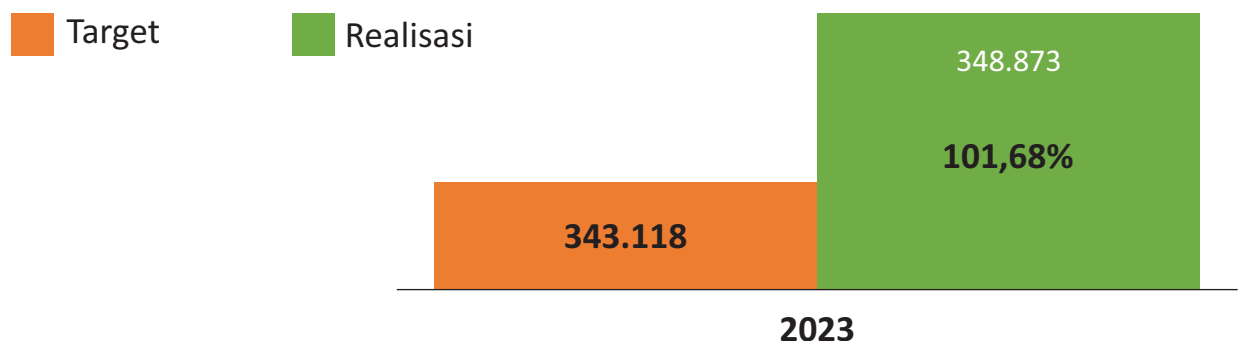
- 1) Melakukan penetapan kebijakan-kebijakan strategis untuk mengakomodir pelaksanaan PIP yang sesuai dengan kondisi lapangan.
- 2) Melakukan koordinasi yang rutin dengan instansi yang menjadi sumber data calon penerima bantuan PIP Dikdasmen.

- 3) Melakukan koordinasi yang rutin dan intensif dengan dinas pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya baik di tingkat pusat maupun daerah untuk memastikan ketepatan sasaran, jumlah, waktu dan guna dari dana yang akan disalurkan.
- 4) Melakukan kebijakan tambahan dan/atau penjelasan teknis yang dibutuhkan untuk memudahkan proses verifikasi, validasi, pemrosesan, penetapan dan penyaluran dana PIP Dikdasmen kepada siswa.
- 5) Menerbitkan SK pemberian relaksasi bagi siswa calon penerima yang belum melakukan aktivasi dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyaluran dana PIP, sehingga penyaluran dana PIP dapat dilakukan bersamaan dengan aktivasi rekening.

Sasaran Kegiatan 3

Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional

Capaian Sasaran Kegiatan terkait ketersediaan layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional (SK 3) melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian SK 3 dapat dilihat pada gambar berikut.



IKK 3.1

Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang memperoleh tunjangan/bantuan

Tunjangan Profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus.

Bantuan insentif adalah bantuan pemerintah yang diberikan untuk menambah penghasilan di luar gaji/upah dan sebagai penambah kesejahteraan pendidik Non ASN dalam melaksanakan tugasnya.

Tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan bantuan insentif diberikan kepada guru dan pendidik sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan dan berlaku di tahun berjalan. Calon penerima tunjangan profesi, tunjangan khusus, bantuan insentif yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan diusulkan oleh Dinas Pendidikan dan diverifikasi oleh Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Kemudian Puslapdik menerbitkan Surat Keputusan penerima tunjangan dan bantuan tersebut sesuai hasil verifikasi dan validasi yang disampaikan oleh Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, serta menyalurkan langsung ke rekening penerima.

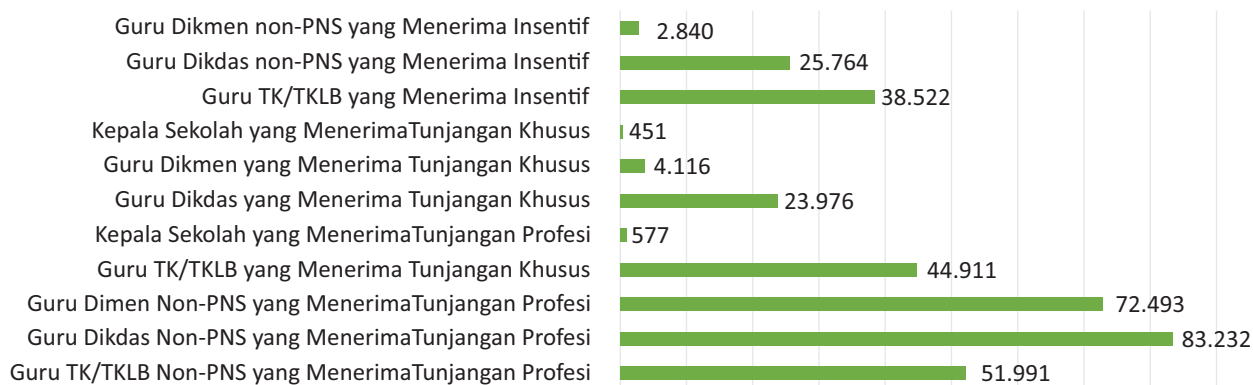
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2023		Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Target Renstra (2024)
			Target	Realisasi			
1	Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional	Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang memperoleh tunjangan/bantuan	343.118	348.873 (101,68%)	346.622 (107,97%)	371.007 (104,36%)	341.599

Secara keseluruhan, capaian IKK 3.1 melebihi target yang telah ditetapkan. Penyaluran tunjangan profesi pada tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini terjadi karena guru Non ASN yang telah lulus PPPK pada tahun 2022 baru menerima tunjangan profesi mereka dari pemerintah daerah mulai semester II tahun 2023. Di sisi lain, tunjangan khusus untuk guru Non ASN mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir. Bantuan insentif pada tahun 2023 mengalami peningkatan jumlah penerima jika dibandingkan dengan tahun 2022. Peningkatan ini terjadi karena jumlah nominasi penerima insentif pada tahun 2023 juga meningkat dibandingkan dengan tahun 2022.

Jika dibandingkan dengan target renstra, capaian tahun 2023 telah dapat memenuhi target yang telah ditetapkan pada renstra. Meskipun target sasaran penerima pada tahun 2023 lebih besar daripada tahun 2024,

anggaran yang dialokasikan lebih kecil dibandingkan tahun 2024. Hal ini dikarenakan terjadi kenaikan anggaran pada tahun 2024, yang disebabkan oleh kenaikan gaji pokok sebesar 8%. Kenaikan gaji pokok ini berdampak pada guru Non ASN yang telah memperoleh SK Inpassing/penyetaraan.

Rekap Penerima Tunjangan/Insentif Tahun 2023



Realisasi penyaluran tunjangan profesi untuk guru Non ASN pada tahun 2023 melebihi target yang telah ditetapkan. Target awal penyaluran sebanyak 245.269 orang berhasil tercapai dengan jumlah aktual mencapai 252.627 orang atau mencapai 102,99%. Hal ini terjadi karena pembayaran tunjangan profesi pada guru Non ASN yang telah lulus PPPK dilakukan melalui pemerintah daerah pada semester II tahun 2023.

Penyaluran tunjangan khusus untuk guru Non ASN pada tahun 2023 berhasil direalisasikan kepada 29.120 individu, melebihi target yang awalnya ditetapkan sebanyak 28.140 orang. Keberhasilan ini dapat dijelaskan oleh efektifnya sosialisasi Kepmendikbudristek Nomor 160 Tahun 2021 selama tahun 2023 sehingga Dinas Pendidikan mampu mengusulkan nominasi penerima tunjangan khusus di wilayahnya secara efisien.

Penyaluran bantuan insentif untuk guru Non ASN dan pendidik lainnya tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Realisasi sasaran bantuan insentif hanya tercapai untuk 67.126 orang dari target semula sebanyak 69.709 orang (96,29%). Kegagalan mencapai target penyaluran bantuan insentif disebabkan oleh beberapa faktor, seperti beberapa daerah yang tidak mengusulkan insentif untuk pendidik Paud non formal (pendidik KB/TPA) karena mereka sudah menerima insentif dari APBD.

Selain itu, beberapa daerah juga tidak mengusulkan karena nominasi guru yang terdaftar di Dapodik tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima insentif pendidik Paud Non Formal.

Program/Kegiatan

Capaian IKK 3.1 secara keseluruhan melebihi target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini didukung oleh kompetensi yang memadai dari Sumber Daya Manusia (SDM) pada Tim Kerja Aneka Tunjangan, kedisiplinan, kecermatan, ketelitian, serta ketaatan Tim Pengelola Aneka Tunjangan terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu, koordinasi yang baik antara Tim dengan unit kerja terkait yang menangani berbagai tunjangan, baik secara internal maupun eksternal di Kemendikbudristek, turut berkontribusi dalam mencapai hasil tersebut.

Faktor Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja antara lain:

- 1) terciptanya koordinasi internal antar unit kerja di lingkungan Kemdikbudristek (Ditjen GTK dan ULT Kemdikbudristek)
- 2) koordinasi eksternal antar unit kerja di luar Kemdikbudristek (Dinas Pendidikan dan Bank Penyalur)
- 3) Rekon data dengan Dinas Pendidikan seluruh Indonesia
- 4) Layanan dalam penyaluran aneka tunjangan dilakukan secara maksimal, dan
- 5) permasalahan penyaluran dapat diselesaikan dengan cepat.

Sedangkan faktor penyebab kegagalan pencapaian target kinerja antara lain:

- 1) Terdapat daerah yang tidak mengusulkan insentif bagi pendidik PAUD non-Formal (KB/TPA) karena telah mendapatkan insentif dari pemerintah daerah.
- 2) Terdapat daerah yang tidak mengusulkan insentif bagi pendidik PAUD non-Formal karena nominasi guru yang terdapat pada Dapodik tidak memenuhi syarat penerima insentif.

Hambatan

Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja antara lain:

- 1) Terdapat guru Non ASN yang masih terlambat dalam memperbaharui Dapodiknya, sehingga berdampak pada keterlambatan pengusulan SK calon penerima tunjangan, terutama guru di wilayah timur

- 1) Beberapa jadwal penerbitan SK Penerima Aneka Tunjangan Guru Non ASN yang belum bisa tepat waktu sehingga mengakibatkan penyaluran aneka tunjangan guru Non ASN belum bisa tepat waktu.
- 2) Perpindahan status guru Non PNS ke guru PPPK menyebabkan keterlambatan pencairan tunjangan di semester II tahun 2023
- 3) Ada beberapa Dinas Pendidikan yang menolak pemberian tunjangan khusus dengan alasan karena kuota terbatas sehingga tidak semua guru bisa diusulkan sebagai penerima tunjangan khusus
- 4) Ada beberapa Dinas Pendidikan yang menolak bantuan insentif karena guru di wilayah tersebut sudah mendapatkan tunjangan insentif dari APBD

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain:

- 1) Tim pengelola Aneka Tunjangan melakukan sosialisasi Petunjuk Teknis Pengelolaan Aneka Tunjangan dan menghimbau Dinas Pendidikan agar guru di wilayahnya memperbaharui Dapodik secara berkala jika ada perubahan data diri guru
- 2) Menghimbau Dinas Pendidikan agar segera mengusulkan calon penerima aneka tunjangan jika info gtk dan persyaratan guru sudah valid
- 3) Melakukan rekon data guru Non ASN yang beralih ke guru PPPK dengan Ditjen GTK dan Dinas Pendidikan
- 4) Melakukan supervisi dan evaluasi penyaluran aneka tunjangan secara berkala
- 5) Berkoordinasi dengan Bank penyalur untuk memverifikasi rekening yang tercantum dalam SK, dan penyelesaian permasalahan penyaluran tunjangan/bantuan insentif secara cepat dan tuntas
- 6) Menghimbau agar Dinas Pendidikan yang menolak pemberian tunjangan khusus dan bantuan insentif bersurat ke Puslapdik

Strategi

Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja antara lain:

- 1) melakukan koordinasi dan komunikasi dengan unit kerja internal Kemdikbudristek dan eksternal Kemdikbudristek
- 2) memberikan pelayanan maksimal terhadap stakeholder aneka tunjangan
- 3) menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi secara cepat dengan membuka layanan di ULT baik daring maupun luring

- 4) penyelesaian masalah secara online pada pengaduan lapor.go.id
- 5) mengembangkan aplikasi yang mampu memonitoring pergerakan penyaluran secara aneka tunjangan secara real time

Sasaran Kegiatan 4

Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat Pendidikan tinggi

Capaian Sasaran Kegiatan terkait ketersediaan layanan pembiayaan pendidikan tingkat Pendidikan Tinggi (SK 4) melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian SK 4 dapat dilihat pada gambar berikut.

IKK 4.1

Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP - Kuliah/ Afirmasi/ Prestasi

Penyediaan layanan pembiayaan tingkat Pendidikan Tinggi pada Puslapdik berupa KIP - Kuliah, Beasiswa Unggulan dan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik). Penerima KIP - Kuliah merupakan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin/rentan miskin yang memenuhi persyaratan sesuai regulasi dalam bentuk Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek tentang Pentunjuk Pengelolaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi. Penerima Beasiswa Unggulan adalah mahasiswa putra putri terbaik bangsa Indonesia dan mahasiswa asing terpilih pada perguruan tinggi. Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) adalah mahasiswa yang mengalami kesulitan dan keterjangkauan akses pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.

Pengukuran capaian IKK 4.1 dihitung berdasarkan jumlah mahasiswa penerima bantuan pendidikan tinggi seperti berikut:

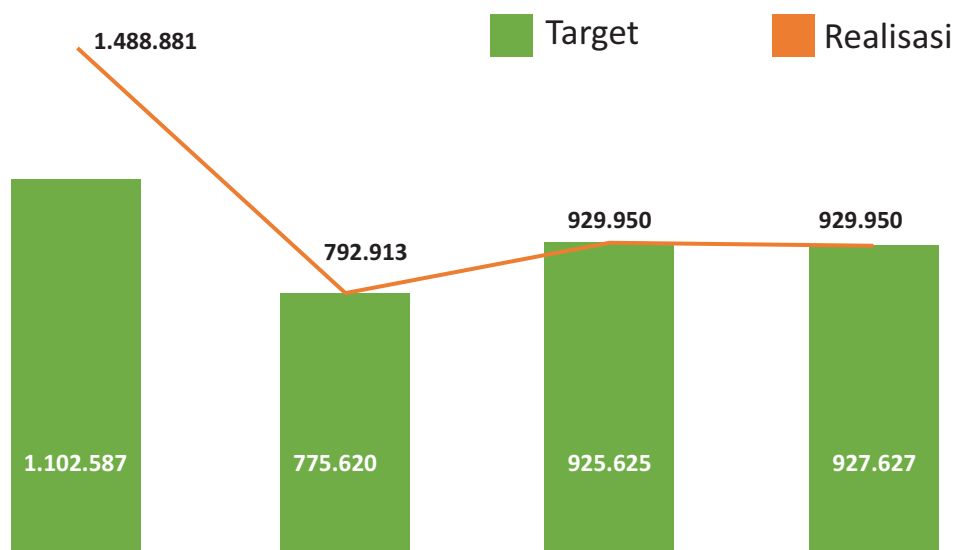
<i>Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP- Kuliah/ Afirmasi/ Prestasi*</i>	=	Jumlah Penerima KIP Kuliah + Penerima Beasiswa ADik + Penerima Beasiswa Unggulan (BU)
--	----------	--

*) Penerima KIP Kuliah termasuk mahasiswa ongoing program yang sebelumnya Bidikmisi. Penerima KIP Kuliah, ADik, dan BU terdiri dari mahasiswa ongoing dan mahasiswa baru.

Satuan: Orang

Tipe perhitungan: Kumulatif

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2023		Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Target Renstra (2024)
			Target	Realisasi			
1.	Tersedianya layanan pembiayaan Pendidikan di Tingkat Pendidikan Tinggi	Jumlah mahasiswa yang memperoleh Beasiswa KIPKuliah/ Afirmasi/ Prestasi	816.271	929.950	1.488.881	792.913	927.627



Pada tahun 2023, jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi mencapai 929.950 mahasiswa, atau setara dengan 113,93% dari target. Capaian ini diperoleh dari 3 (tiga) Rincian Output (RO) yang mendukung IKK 4.1 sebagai berikut:

- Mahasiswa penerima KIP Kuliah = 916.827 mahasiswa
- Mahasiswa penerima Afirmasi = 7.614 mahasiswa
- Mahasiswa penerima Prestasi/Beasiswa Unggulan = 5.509 mahasiswa

Mahasiswa Penerima Beasiswa	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
KIP-Kuliah	913.636	916.827	100.35%
Adik	7.417	7.614	102.66%
Beasiswa Unggulan	4.572	5.509	120.49%

Capaian capaian tahun 2023 lebih tinggi dari capaian 2022, namun lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 2021, Puslapdik mendapatkan tugas tambahan untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam bentuk Bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT)/SPP dengan realisasi capaian sebanyak 347.113 mahasiswa;
- 2) Penurunan kuota penerima KIP Kuliah di tahun 2022, yang semula mendapatkan kuota sebanyak 200.000 mahasiswa di tahun 2021 turun menjadi 185.475 mahasiswa di tahun 2022;
- 3) Pada tahun 2023, KIP Kuliah kembali mendapatkan kuota sebanyak 200.000 mahasiswa yang terbagi menjadi 115.000 kuota KIP Kuliah yang mendapatkan biaya pendidikan dan biaya hidup serta 85.000 kuota KIP Kuliah yang hanya mendapatkan biaya pendidikan. Peningkatan capaian kinerja pada tahun ini juga disebabkan karena Puslapdik mendapatkan tambahan pergeseran anggaran dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sebesar Rp196.000.000.000 yang dikonversi menjadi kuota tambahan sebanyak 20.631 mahasiswa penerima KIP Kuliah yang mendapatkan biaya pendidikan dan biaya hidup.

Target jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP Kuliah/Afirmasi/Prestasi di tahun 2024 sebanyak 927.627 orang, dengan kondisi penerima saat ini dan kuota penerima KIP Kuliah di tahun 2024 yang direncanakan sebesar 985.577 diharapkan dapat mendukung pencapaian target di tahun selanjutnya.

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan dalam mendukung pencapaian target kinerja antara lain:

- 1) Rapat Koordinasi bersama pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi untuk menyampaikan berbagai kebijakan baru KIP Kuliah dan Beasiswa Unggulan sekaligus mendapatkan masukan terkait kebijakan pengelolaan program KIP Kuliah dan Beasiswa Unggulan yang akan dilaksanakan di tahun berjalan.
- 2) Sosialisasi Program kepada operator/pengelola Perguruan Tinggi, LLDIKTI, Pemerintah Daerah, dan calon penerima baik secara luring maupun secara daring melalui teleconference dan media sosial untuk memperluas jangkauan informasi.
- 3) Bimbingan Teknis bagi Pengelola/Operator Perguruan Tinggi Program KIP Kuliah dan Beasiswa Unggulan yang bertujuan agar Pengelola/Operator Perguruan Tinggi dapat memahami Kebijakan dan mekanisme KIP Kuliah dan Beasiswa Unggulan dalam penyelenggaraan program mulai dari Proses Pendaftaran, seleksi, penetapan, pencairan sampai dengan evaluasi.
- 4) Pendampingan Percepatan Pencairan Bidikmisi dan KIP Kuliah Merdeka di semester Genap 2022/2023 dan semester Gasal 2023/2024 dengan mengundang operator PDDikti di setiap Perguruan Tinggi Negeri dan LLDIKTI untuk percepatan koordinasi pemadanan data KIP Kuliah dengan PDDIKTI.
- 5) Supervisi pengelolaan KIP Kuliah dan Beasiswa Unggulan ke Perguruan Tinggi terpilih untuk meningkatkan pengelolaan program di Perguruan Tinggi.

Faktor Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja antara lain:

- 1) Pada pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2023, Puslapdik mendapat tambahan pergeseran anggaran yang berasal dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan ditujukan untuk pembiayaan Mahasiswa Baru KIP Kuliah sehingga dapat membantu capaian melebihi target Renstra 2023.
- 2) Koordinasi dan pelibatan secara aktif berbagai satuan kerja internal Kemendikbudristek yang berperan penting dalam proses pengelolaan program terutama terkait sumber data seperti Pusdatin Kemendikbudristek yang mengelola Data Potensi Pendidikan (Dapodik) serta Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
- 3) Koordinasi dan pelibatan aktif berbagai stakeholder eksternal Perguruan Tinggi dan LLDIKTI yang menjadi ujung tombak pengelolaan program terutama dalam menjamin pelaksanaan pengelolaan sesuai regulasi yang berlaku.

Sedangkan faktor penyebab kegagalan pencapaian target kinerja antara lain:

- 1) Berbagai faktor eksternal yang tidak dapat dikontrol seperti masih banyaknya data siswa hasil pemadanan yang NIK dan NISN nya belum valid. Faktor ini diupayakan terus agar semakin berkurang melalui koordinasi dengan Pusdatin,
- 2) Masih terdapat data mahasiswa yang belum sinkron dengan PDDikti karena keterlambatan Perguruan Tinggi dalam melakukan pemutakhiran data aktif mahasiswa.

Hambatan

Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja antara lain:

KIP Kuliah

- 1) Calon mahasiswa penerima tidak terverifikasi atau tidak valid terutama untuk NIK, NISN dan NPSN dan Dapodik
- 2) Masih adanya operator sekolah yang tidak melaporkan status keaktifan siswa di Dapodik sehingga tidak dapat dilakukan sinkronisasi data pada SIM KIP Kuliah untuk melakukan pendaftaran. Hal ini terjadi baik untuk calon penerima KIP Kuliah maupun bantuan Biaya Pendidikan on going serta pengganti yang belum terdata di Dapodik.
- 3) Kapasitas penyimpanan atau storage serta memory pada server yang masih terbatas, sehingga sistem KIP Kuliah dan Bidikmisi mengalami overload sehingga mengalami perlambatan bahkan tidak bisa diakses. Permasalahan ini mengakibatkan terhambatnya proses pendaftaran dan pengajuan pencairan.
- 4) Perguruan Tinggi perlu membuat kertas kerja perhitungan rata-rata Biaya Pendidikan sebelum melakukan penetapan mahasiswa penerima KIP Kuliah sesuai dengan regulasi, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk mengajukan pencairan
- 5) Keterlambatan Perguruan Tinggi dalam melakukan pemutakhiran data mahasiswanya di PDDikti karena hal ini merupakan kebijakan baru dimana mahasiswa penerima KIP Kuliah harus terdata di PDDikti sebelum mengajukan pencairan.
- 6) Akreditasi Program Studi tidak terdata pada sistem BAN PT yang umumnya dikarenakan masa akreditasi sudah kadaluarsa, masih dalam proses re-akreditasi, merupakan prodi baru, dan prodi upgrading. Hal ini menyebabkan Perguruan Tinggi tidak dapat menetapkan mahasiswa penerima KIP Kuliah di prodi tersebut.

- 7) Perubahan data perguruan tinggi berupa Perguruan Tinggi Swasta yang merger, berubah bentuk, dan ditutup (salah satunya karena menerima hukuman) sehingga masih membutuhkan waktu untuk proses migrasi
- 8) Terhambatnya pembuatan rekening yang dilakukan secara terpusat dan di masing-masing Cabang oleh bank mitra penyalur dalam hal ini Bank Himbara.
- 9) Masih ada PTS yang meminta tambahan biaya pendidikan maupun biaya lainnya seperti biaya seminar, biaya gedung dll ke mahasiswa melalui pemotongan biaya hidup.
- 10) Keterbatasan atau tidak adanya dana pengelolaan untuk verifikasi atau visitasi mahasiswa calon penerima KIP Kuliah oleh operator Perguruan Tinggi.

Beasiswa Unggulan

- 1) Mahasiswa belum melaporkan perkembangan studi/akademik
- 2) Beberapa mahasiswa masih belum memahami kesalahan pengunggahan laporan perkembangan studi/akademik pada sistem pelaporan
- 3) Mengundang seluruh penerima Beasiswa Unggulan On Going yang belum melaporkan laporan perkembangan akademik sampai dengan batas waktu yang ditentukan secara daring.
- 4) Setelah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap mahasiswa yang belum melaporkan laporan perkembangan akademik, didapatkan bahwa banyak mahasiswa yang baru selesai studi di tahun 2024
- 5) Terlambatnya laporan mahasiswa semester akhir yang seharusnya sudah menyampaikan ijazah atau SKL sehingga pelunasan Beasiswa tidak dapat disalurkan
- 6) Terlambatnya laporan mahasiswa dikarenakan nilai salah satu mata kuliah belum didapat dari dosen pengajarnya
- 7) Bukti bayar biaya pendidikan atau hasil studi gagal upload, karena jaringan serta masih banyak mahasiswa yang salah dalam menepatkan untuk mengupload bukti bayar dan laporan perkembangan studi pada sistem
- 8) Kurangnya informasi dari setiap mahasiswa terhadap kemajuan pendidikannya
- 9) Beberapa operator perguruan tinggi telah di undang untuk melaksanakan sosialisasi dan koordinasi terkait pemberitahuan penerima Beasiswa Unggulan oleh Puslapdik, namun operator perwakilan Perguruan Tinggi tidak hadir sehingga beberapa mahasiswa yang berstatus studi di Perguruan Tinggi tersebut mengalami kendala dalam proses penyaluran dana dikarenakan perlunya verval Perguruan Tinggi terlebih dahulu
- 10) Adanya mahasiswa penerima Beasiswa Unggulan angkatan tahun 2022 yang perguruan tingginya belum mengetahui informasi mengenai tatacara verifikasi laporan perkembangan studi mahasiswa.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain:

KIP Kuliah

- 1) Meningkatkan integrasi dan koordinasi dengan Pusdatin (Dapodik) dan PDDikti secara berkala terkait pemadanan data dan pengadaan server

- 1) Memberikan layanan untuk menerima komplain dan mengatasi berbagai permasalahan KIP Kuliah mulai dari pendaftaran hingga penyaluran melalui berbagai kanal pengaduan, seperti ULT, Lapor.go.id serta meningkatkan sosialisasi melalui media sosial dan Pemuda Pelajar Merdeka
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan Perguruan Tinggi dan LLDikti dalam hal:
 - (a) Monitoring dan pembinaan bagi mahasiswa penerima KIP Kuliah
 - (b) Menindaklanjuti progres penyelesaian masalah yang dihadapi Perguruan Tinggi
 - (c) Melakukan supervisi pelaksanaan program KIP Kuliah Merdeka Tahun 2023 ke beberapa PTS yang terdapat aduan
- 4) Melaksanakan pendampingan perhitungan rata-rata biaya pendidikan kepada seluruh PTN dan LLDIKTI penerima KIP Kuliah
- 5) Meningkatkan koordinasi bersama dengan PDDikti untuk percepatan pencairan dan pemadanan data mahasiswa penerima KIP Kuliah di PDDIKTI
- 6) Melibatkan operator PDDIKTI Perguruan Tinggi dan LLDIKTI untuk memprioritaskan pelaporan mahasiswa penerima KIP Kuliah di PDDIKTI
- 7) Melakukan pendampingan khusus bagi Perguruan Tinggi yang belum mengusulkan pencairan
- 8) Menghimbau Perguruan Tinggi untuk lebih memperhatikan masa kadaluarsa akreditasi tiap program studinya dan segera melakukan re-akreditasi sebelum masa berlaku akreditasi habis
- 9) Menghimbau Perguruan Tinggi berkoordinasi dengan BAN-PT atau LAM untuk mempercepat keluarnya akreditasi baru
- 10) Terus berkoordinasi dengan Perguruan Tinggi dan LLDIKTI yang merger, berubah bentuk, dan ditutup untuk mempercepat proses migrasi
- 11) Membuat grup koordinasi antara Bank Himbara, Perguruan Tinggi yang dimonitor oleh Puslapdik untuk memantau update hasil pembuatan rekening
- 12) Menghimbau mahasiswa untuk melakukan verval lulusan secara mandiri dan berkoordinasi dengan Pusdatin untuk percepatan verval lulusan mahasiswa penerima KIP Kuliah

Beasiswa Unggulan

- 1) Melaksanakan monitoring ke perguruan tinggi terpilih dan mengundang mahasiswa yang belum melakukan pelaporan pada sistem aplikasi pelaporan (Provider)
- 2) Memberikan catatan perbaikan data pelaporan yang diunggah oleh mahasiswa agar penyaluran tahap selanjutnya dapat diproses
- 3) Menghubungi pengelola di perguruan tinggi terkait user dan password untuk dapat mengakses sistem pelaporan beasiswa unggulan
- 4) Melakukan pemutusan beasiswa bagi seluruh penerima Beasiswa Unggulan yang melebihi batas waktu perjanjian kontrak Kerjasama dengan Puslapdik
- 5) Mengundang, memberikan informasi secara daring seluruh penerima Beasiswa Unggulan yang masih aktif dan yang akan berakhir masa kontrak kerjasamanya di Bulan Oktober 2023, mahasiswa aktif yang belum dibayarkan pelunasan tahap akhir
- 6) Koordinasi dengan operator Perguruan Tinggi untuk melakukan verifikasi dan validasi laporan perkembangan studi penerima Beasiswa Unggulan
- 7) Memberikan catatan pada akun beasiswa Unggulan pada sistem pelaporan perkembangan studi apabila terjadi kendala gagal unggah, salah unggah data dan sebagainya

Strategi

Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja antara lain:

Kip Kuliah

- 1) Koordinasi secara intensif dengan Kementerian Sosial terkait dengan update DTKS Kemensos dan Kemenko PMK terkait data P3KE;
- 2) Meningkatkan integrasi data dengan BAN PT melalui PDDikti dan mendorong BAN PT untuk dapat melakukan update status akreditasi secara rutin dan juga melakukan integrasi data dengan Dapodik Kemendikbud dan Pusdatin Kemensos;
- 3) Melakukan sosialisasi dan menjalin komunikasi lebih intensif dengan Perguruan Tinggi untuk mendorong proses verifikasi dan validasi data usulan mahasiswa penerima dan update NIK mahasiswa supaya pengusulan yang dilakukan tepat sasaran, efektif dan efisien;
- 4) Memberikan arahan dan pembekalan kepada semua mahasiswa penerima baru KIP Kuliah bahwa program ini bertujuan membentuk mereka menjadi manusia berpotensi di masyarakat dan negara butuh mereka untuk mengimplementasikan ilmu yang mereka peroleh dan berguna bagi negara dan mensosialisasikan hak dan kewajiban mahasiswa penerima.
- 5) Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Bank Penyalur terkait pembukaan rekening dan penyaluran dana bantuan KIP Kuliah

Beasiswa Unggulan

- 1) Bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam hal:
 - Verifikasi dan validasi mahasiswa penerima beasiswa unggulan angkatan tahun 2021
 - Penyaluran biaya pendidikan mahasiswa penerima Beasiswa Unggulan angkatan tahun 2023 langsung ke rekening Perguruan Tinggi yang bersedia, agar dapat di monitoring oleh perguruan tinggi sehingga dapat dikontrol dan tidak ada keterlambatan dalam hal pembayaran biaya pendidikan mahasiswa
- 2) Sinkronisasi data dengan PDDikti dalam proses seleksi mengenai validitas status keaktifan mahasiswa di Perguruan Tinggi tersebut sebagai penerima dan menyamakan data NIK agar tidak terjadi double funding dengan beasiswa lain yang diselenggarakan oleh pemerintah
- 3) Melakukan pengecekan pada website PDDikti saat proses seleksi beasiswa unggulan untuk memastikan kembali apakah mahasiswa yang mendaftar tersebut berprofesi sebagai dosen atau tidak.

Sasaran Kegiatan 5

Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

Sasaran Kegiatan terkait peningkatan tata Kelola Puslapdik (SK 5) dapat terlaksana dengan baik. Hal ini dapat terlihat pada capaian yang sesuai dengan target. Ringkasan capaian SK 5 tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut.

	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Predikat SAKIP	A	A	100%
Nilai Kinerja Anggaran	88	93.29	106.01%

Beasiswa Unggulan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. (Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014)

Penerapan akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah merujuk pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan akuntabilitas kinerja mencakup berbagai tingkatan, mulai dari tingkat Kementerian, Unit Kerja, dan satuan kerja (Unit Kerja Mandiri) yang dilakukan pada proses perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja.

No.	Komponen	Bobot Penilaian
1.	Perencanaan Kinerja	30%
2.	Pengukuran Kinerja	30%
3.	Pelaporan Kinerja	15%
4.	Evaluasi Internal	25%
Total Nilai		100%

Kemudian, kategori hasil penilaian SAKIP dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (Memadai)
>30-50	C	Kurang
>0-30	D	Sangat Kurang

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2023		Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Target Renstra (2024)
			Target	Realisasi			
1	Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB	A	A (87,15)	A (81,17)	A (85,15)	A

Pada tahun 2023 Puslapdik mendapat predikat A dengan nilai 87,15. Puslapdik telah mendapat predikat A selama 3 (tiga) tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan sebesar 2 poin dari nilai tahun 2022 dan 5,98 poin dari nilai tahun 2021. Pencapaian predikat A pada SAKIP telah sesuai dengan target IKK 5.1 pada renstra.

Program Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan dalam mendukung pencapaian target kinerja antara lain:

- 1) Melakukan reuiu Renstra dan evaluasi setiap triwulan
- 2) Menginput capaian secara berkala pada aplikasi SAKTI dan SPASIKITA, dan melakukan kegiatan lain dalam melengkapi data dukung dalam penilaian SAKIP.

Faktor Penyebab Keberhasilan

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja antara lain: Berupaya memenuhi setiap indikator yang terdapat dalam proses Penilaian SAKIP, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Upaya pemenuhan indikator tersebut dilaksanakan sepanjang tahun, dengan memastikan ketersediaan dokumen-dokumen pendukung. Dengan demikian, saat penilaian dilakukan, dokumen-dokumen pendukung tersebut telah tersedia secara lengkap.

Hambatan

Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja antara lain:

- 1) Masih terdapat beberapa catatan dalam Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Puslapdik Tahun 2023
- 2) Perubahan pada Renstra Kemendikbudristek mengakibatkan adanya penyesuaian pada Renstra Puslapdik sehingga terdapat perubahan pada sasaran kegiatan dan indikatornya.
- 3) Padatnya kegiatan pada masing-masing Tim Kerja yang menyebabkan koordinasi untuk evaluasi terhambat.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain:

- 1) Menyusun revisi Renstra untuk mengakomodir perubahan pada Renstra Kemendikbudristek.
- 2) Menyusun kebijakan untuk melakukan pertemuan di kantor dalam rangka evaluasi.

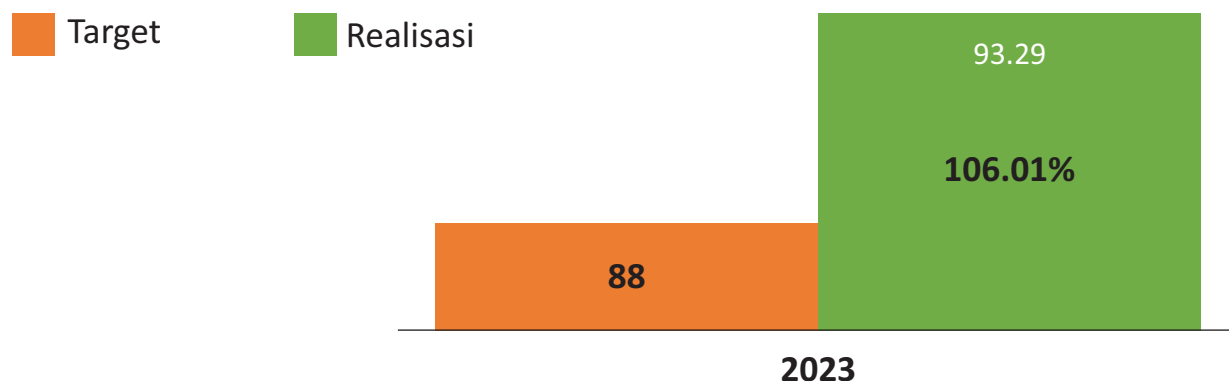
Strategi

Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja antara lain:

- 1) Memenuhi catatan yang tertera di hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk peningkatan akuntabilitas di Puslapdik
- 2) Melaporkan capaian kinerja secara berkala dan tepat waktu.
- 3) Berkoordinasi secara internal dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja satker.

IKK 5.2

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85



Faktor Penyebab Keberhasilan

Rencana Kerja Anggaran-Kementerian/Lembaga (RKA-KL) merupakan dokumen perencanaan yang mendetailkan rencana kerja dan alokasi anggaran untuk setiap kegiatan atau program di tingkat Kementerian atau Lembaga. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah evaluasi terhadap efisiensi, efektivitas, dan dampak suatu program atau kegiatan, dengan mempertimbangkan alokasi anggaran yang telah dialokasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. NKA berfungsi sebagai alat pengukuran sejauh mana organisasi atau entitas pemerintah berhasil mencapai hasil yang diinginkan melalui penggunaan anggaran yang dimilikinya.

Secara umum, NKA berperan sebagai alat evaluasi kinerja, sementara RKA-KL merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman pelaksanaan dan pemantauan anggaran di tingkat Kementerian atau Lembaga pemerintah. Kedua konsep ini saling terkait dalam upaya optimalisasi penggunaan anggaran untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023, pengukuran NKA dilakukan dengan menggunakan komponen berikut:

- 1) Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dengan bobot 50%
- 2) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot 50%

Pada tahun 2023, Puslapdik mendapat NKA 93,29 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Nilai EKA sebesar 89,96
- 2) Nilai IKPA sebesar 96,62

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2023		Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Target Renstra (2024)
			Target	Realisasi			
1	Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA -K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85	88	93,29 (106,01%)	86,16 (100,19%)	87,45 (101,69%)	90

Secara umum, NKA Puslapdik tahun 2023 merupakan nilai tertinggi dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan melampaui target yang telah ditetapkan. NKA Puslapdik telah mengalami peningkatan 5,84 poin dari tahun 2022 dan 7,13 poin dari tahun 2021. Jika dibandingkan dengan target renstra, maka NKA tahun 2023 telah mencapai 103,65% dari target renstra. Hal ini bisa terjadi karena perubahan dari bobot aspek penilaian. Jika sebelumnya bobot penilaian terdiri dari 60% untuk EKA dan 40% untuk IKPA, maka mulai tahun 2023 bobot penilaian menjadi 50% untuk EKA dan 50% untuk IKPA. Sehingga nilai NKA akhirnya bisa melebihi target, bahkan target Renstra.

Program Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan dalam mendukung pencapaian target kinerja antara lain:

- 1) Melakukan penginputan capaian output secara berkala dan tepat waktu.
- 2) Melakukan evaluasi secara berkala, setiap triwulan.
- 3) Melakukan revisi halaman III DIPA
- 4) Melakukan pemantauan deviasi antara rencana penarikan dana dengan realisasi setiap bulan dan setiap jenis belanja.

Faktor Penyebab Keberhasilan

Faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja antara lain:

- 1) Secara rutin memonitor nilai dari setiap indikator.
- 2) Menerapkan kebijakan apabila terdapat indikator yang memperoleh nilai rendah, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tersebut di bulan berikutnya

Hambatan

Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja antara lain:

- 1) Mendapatkan indikator efisiensi yang tinggi di Puslapdik menjadi suatu tantangan karena Rincian Output (RO) bersifat bantuan dengan satuan harga yang tetap per orang penerima bantuan. Oleh karena itu, mencapai nilai kinerja di atas 120% menjadi sangat sulit, sehingga nilai efisiensi sulit untuk meningkat secara signifikan.
- 2) Sifat dari Rincian Output (RO) di Puslapdik bergantung pada pihak luar, sehingga pencapaiannya juga bergantung pada usulan dari pihak eksternal.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain:

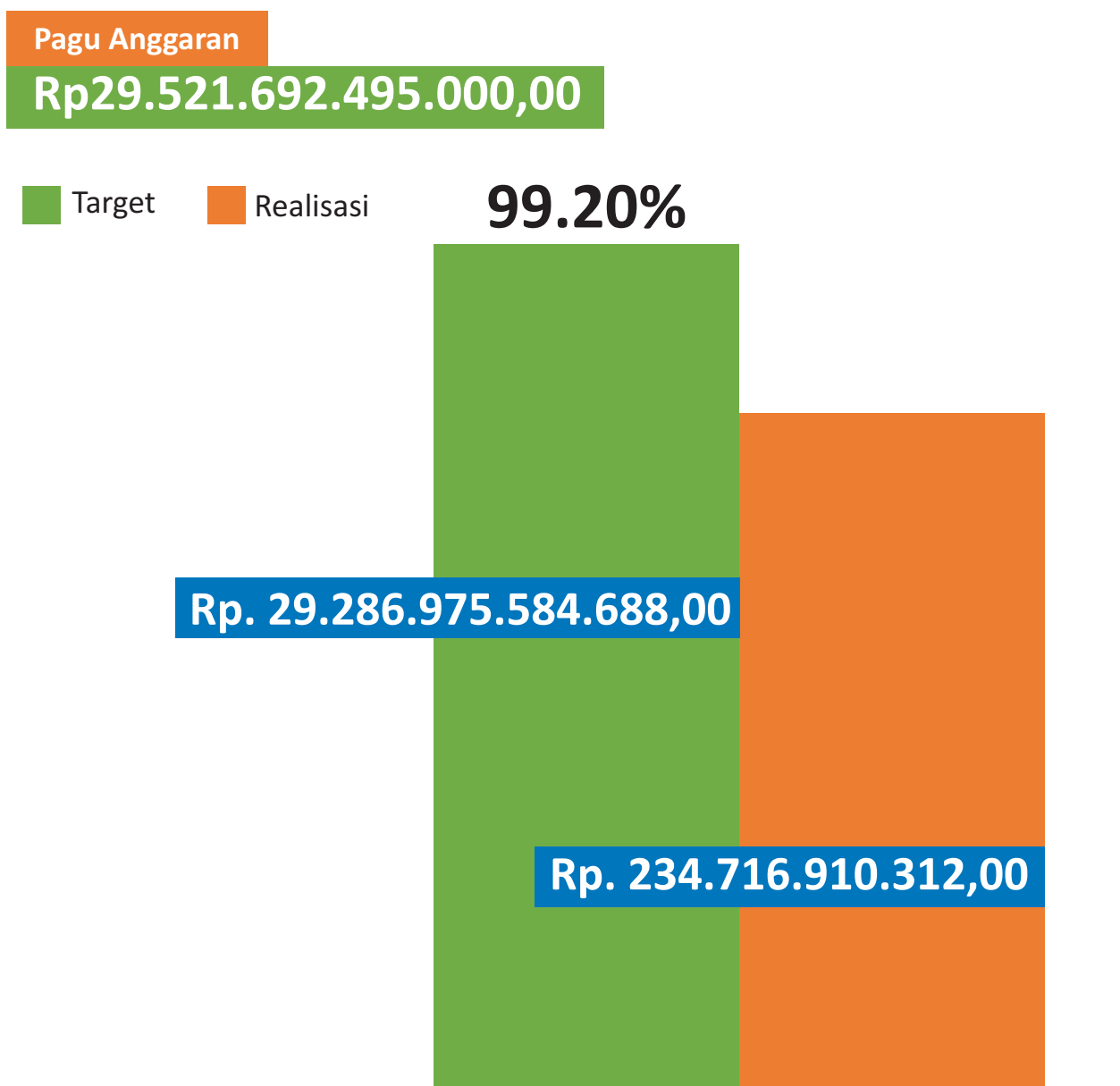
- 1) Melakukan revisi pergeseran sasaran program.
- 2) Melakukan evaluasi setiap triwulan guna merumuskan kebijakan untuk triwulan berikutnya.

Strategi

Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja antara lain:

- 1) Terus berupaya mencapai minimal 100% pada capaian RO agar dapat mempertahankan nilai pada indikator efisiensi, sambil meningkatkan nilai pada indikator lainnya guna memastikan pencapaian NKA sesuai dengan target yang ditetapkan.
- 2) Memastikan pelaksanaan setiap indikator berjalan dengan baik, serta capaian dilaporkan pada system yang tersedia.
- 3) Melakukan perbaikan perencanaan dalam penentuan target dan melakukan revisi target RO pada tengah tahun jika target tidak bisa dicapai.

B. Realisasi Anggaran Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan



NO	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Pagu	Realisasi	%
1	[SK 1] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar	[IKK 1.1] Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang memperoleh PIP	Rp 4.223.762.199.000,00	Rp 4.222.619.686.700,00	99,97
		[IKK 1.2] Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat yang memperoleh PIP	Rp 2.726.502.381.000,00	Rp 2.725.633.078.400,00	99,97
2	[SK 2] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat menengah	[IKK 2.1] Jumlah siswa SMA/SMK/SMLB/Sederajat yang memperoleh PIP	Rp 2.829.670.367.000,00	Rp 2.826.429.879.972,00	99,89
3	[SK 3] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional	[IKK 3.1] Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang memperoleh tunjangan/bantuan	Rp 7.606.586.446.000,00	Rp 7.523.838.397.027,00	98,91
4	[SK 4] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi	[IKK 4.1] Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi	Rp 12.111.682.425.000,00	Rp 11.965.519.364.479,00	98,79
5	[SK 5] Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	[IKK 5.1] Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB	Rp 8.731.598.000,00	Rp 8.584.446.514,00	98,31
		[IKK 5.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85	Rp 14.757.079.000,00	Rp 14.350.731.596,00	97,25

C. Efisiensi Anggaran Pendidikan

Pada tahun 2023 terjadi perubahan pagu di Puslapdik, perubahan tersebut bisa merupakan pergeseran baik di internal maupun penambahan dari luar. Pergeseran anggaran per SK – IKK dapat di lihat pada gambar di bawah ini:

NO	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	PERUBAHAN PAGU	KETERANGAN PERUBAHAN PAGU
1	[SK 1] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar	[IKK 1.1] Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang memperoleh PIP	Rp 2.830.649.949.000,00	Rp 4.223.762.199.000,00	Rp1.393.112.250.000,00	Tambahan anggaran untuk penambahan sasaran dengan rincian: 1. Efisiensi internal dari Program ADIK sebesar Rp145.200.580.000,00 2. Tambahhan dari luar satker sebesar Rp1.247.911.670.000,00
		[IKK 1.2] Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat yang memperoleh PIP	Rp 2.726.502.381.000,00	Rp 2.726.502.381.000,00	Rp -	
2	[SK 2] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat menengah	[IKK 2.1] Jumlah siswa SMA/SMK/SMLB/Sederajat yang memperoleh PIP	Rp 2.829.670.367.000,00	Rp 2.829.670.367.000,00	Rp -	
3	[SK 3] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional	[IKK 3.1] Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang memperoleh tunjangan/bantuan	Rp 8.027.879.624.000,00	Rp 7.606.586.446.000,00	- Rp 421.293.178.000,00	Dikembalikan ke Kementerian Keuangan (BA BUN) sebesar Rp421.293.178.000,00
4	[SK 4] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi	[IKK 4.1] Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi	Rp 12.068.883.005.000,00	Rp 12.111.682.425.000,00	Rp 42.799.420.000,00	A. Pengurangan/pengalihan anggaran: 1. Pengalihan ke Balai Pembiayaan Pendidikan tinggi sebesar Rp7.000.000.000,00 2. Dialihkan ke PIP jenjang SD/ sederajat sebesar Rp145.200.580.000,00 3. Dialihkan ke Biro Umum sebesar Rp1.000.000.000,00 B. Penambahan Anggaran: 1. Penambahan anggaran untuk menambah sasaran 20.631 orang mahasiswa baru Program KIP Kuliah sebesar Rp196.000.000.000,00
5	[SK 5] Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	[IKK 5.1] Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB	Rp 8.731.598.000,00	Rp 8.731.598.000,00	Rp -	

D. Inovasi, Penghargaan, dan Program Crosscutting/Collaborative

1. Inovasi

Pada tahun 2023, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan melakukan inovasi sebagai berikut:

a. Penggunaan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) melalui pepadanan dengan Kemenko PMK

Pada tahun 2023 salah satu sumber data yang dipakai dalam penetapan penerima PIP adalah data P3KE. Penggunaan data P3KE ini dilakukan sebagai salah satu upaya agar penetapan penerima PIP lebih tepat sasaran dengan memperhatikan kondisi keluarga dalam kategori

b. Pengembangan Fitur Pengusulan PIP yang lebih memudahkan pengusul melakukan verifikasi usulan

Siswa	Kelas	NISN	Keterangan...	Flag Drop	Layak PIP	P3KE Desil	DTKS PKH
AHMAD FATHIHUL IHSAN							
Sedang Diusulkan							
Layak PIP							
Valid NISN							
Valid Dukcapil							
P3KE NIK							
	12	0053724583			1	6	0

Pada tahun 2023 Puslapdik mengembangkan fitur usulan PIP dengan tampilan dan menu baru untuk lebih memudahkan pengusul dalam melakukan verifikasi usulan. Pengembangan fitur ini secara umum memudahkan pengusul dalam menentukan siswa yang akan diverifikasi untuk ditetapkan sebagai penerima PIP, sehingga dalam penetapan penerima PIP lebih tepat sasaran.

C. Koordinasi dengan Kementerian Agama untuk meningkatkan ketepatan sasaran

Puslapdik melaksanakan koordinasi dengan pengelola PIP di madrasah dan pondok pesantren di Kementerian Agama untuk mengetahui kondisi data penerima PIP yang ditetapkan di masing-masing Kementerian. Koordinasi ini juga menghasilkan prosedur yang dapat mengurangi kemungkinan Siswa ditetapkan ganda di kedua Kementerian.

Koordinasi ini dilaksanakan oleh Pusdatin Kemdikbudristek dan EMIS Kementerian Agama untuk kemudian disampaikan ke masing-masing pengelola PIP di kedua Kementerian.

d. Pengembangan menu Cetak Surat keterangan dan Rekap Per Sekolah pada aplikasi Sipintar

- Cetak Surat keterangan

- Rekap Per sekolah

Sekolah	SK	Aktivasi	%
SD N SEUNEUBOK TEUNGOH			
Siswa	27	18	66,67%
Rp	9.225.000	6.075.000	65,85%
SD NEGERI ALUE BATEE			
Siswa	6	4	66,67%
Rp	2.700.000	1.800.000	66,67%
SD NEGERI ALUE SUNDAK			
Siswa	8	0	0,00%
Rp	2.250.000	0	0,00%
SD NEGERI ARONGAN WOYLA			
Siswa	28	16	57,14%
Rp	11.250.000	6.525.000	58,00%

Pada tahun 2023 dilakukan pengembangan menu pada aplikasi SiPintar untuk menunjang pelaksanaan PIP yang lebih cepat dan lebih baik. Menu yang dikembangkan adalah cetak surat keterangan aktivasi dan rekap per sekolah yang bertujuan untuk memudahkan sekolah untuk membuat surat keterangan aktivasi rekening sesuai daftar siswa SK Nominasi. Menu Rekap per Sekolah juga disediakan untuk memudahkan publik dalam memantau penyaluran PIP pada tahun berjalan.

e. Menjalin Kolaborasi dengan UPT Kemdikbudristek dalam pelaksanaan PIP

Puslapdik menjalin kolaborasi bersama dengan UPT Kemdikbudristek yang tersebar di wilayah Indonesia dalam rangka turut menyukseskan program-program prioritas nasional termasuk PIP di dalamnya. UPT yang dimaksud antara lain Balai Besar Guru Penggerak (BBGP), Balai Guru Penggerak (BGP), Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP), Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), bersama dengan Sekolah penggerak dan Guru Penggerak. Kolaborasi ini menjadi langkah positif untuk mendorong pelaksanaan PIP di masing-masing wilayah menjadi lebih baik, khususnya dalam mendorong proses aktivasi rekening dan pemantauannya.

f. Pengembangan Aplikasi Survei Hambatan Aktivasi Rekening

Puslapdik mengembangkan aplikasi survei yang bertujuan untuk mengumpulkan data kendala aktivasi rekening hasil identifikasi oleh satuan pendidikan sebagai representasi populasi satuan pendidikan se-Indonesia, yaitu yang memiliki siswa penerima PIP yang tidak mengaktivasi rekening cukup banyak dan besar kemungkinan memiliki variasi jawaban paling banyak. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya diolah berikut dengan data terkait lainnya untuk mengetahui keberkaitan antar data sehingga dapat dianalisis untuk keperluan penyampaian informasi yang lebih bermakna.

g. KIP Kuliah Bantuan Biaya Pendidikan

Pada tahun 2023, Kemendikbudristek mengeluarkan skema Bantuan Biaya Pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi untuk melengkapi program KIP

Program Bantuan Biaya Pendidikan berupa bantuan yang diberikan kepada mahasiswa baru dan mahasiswa on going aktif yang berasal dari keluarga miskin/rentan miskin dan sedang melaksanakan Pendidikan di Perguruan Tinggi tidak melebihi semester V untuk program S1/D4 atau semester III untuk program D3 untuk pembiayaan uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan mahasiswa. Program ini diterbitkan dalam upaya mendorong pemerataan pendidikan tinggi dan diberikan kepada mahasiswa dengan sasaran penerima Program KIP Kuliah namun tidak dapat diprioritaskan sebagai penerima KIP Kuliah karena keterbatasan kuota penerima KIP Kuliah di perguruan tinggi.

h. Tracer Study Alumni KIP Kuliah/Bidikmisi

Tracer study ini ditujukan untuk alumni KIP Kuliah/Bidikmisi pada perguruan tinggi di bawah Kemendikbudristek yang bertujuan untuk

- Mendapatkan data dan sebaran alumni penerima KIP Kuliah/Bidikmisi
 - Pemutakhiran basis data untuk mendukung pembangunan basis data alumni KIP Kuliah/Bidikmisi nasional
- Mendapatkan masukan dan evaluasi dan pelaksanaan atas keberlanjutan program KIP Kuliah Pelaksanaan tracer study ini melibatkan Permadani Diksi dan alumni Bidikmisi/KIP Kuliah yang berpengaruh untuk mempeluas jangkauan penerima informasi dan responden tracer. Akses untuk tracer study dilakukan melalui tautan <https://tracerkipk.puslapdik.id/>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | KIPK Kuliah Website



Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



[Beranda](#)

TRACER STUDY

Tracer Study Lulusan Penerima KIP Kuliah

Kemendikbudristek sangat mengharapkan partisipasi dari alumni untuk mengisi instrumen ini dengan benar dan seksama sebagai kontribusi alumni terhadap bangsa dan negara, dan mengajak rekan alumni lainnya untuk berpartisipasi



Kartu Indonesia Pintar Kuliah

Andrie Ramadhan
066400993
Ilmu Komputer
Institut Pertanian Bogor

KIPK: A2B4C6K
1 Agustus 2022

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Hotline: 177

Program Bantuan Biaya Pendidikan berupa bantuan yang diberikan kepada mahasiswa baru dan mahasiswa on going aktif yang berasal dari keluarga miskin/rentan miskin dan sedang melaksanakan Pendidikan di Perguruan Tinggi tidak melebihi semester V untuk program S1/D4 atau semester III untuk program D3 untuk pembiayaan uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan mahasiswa. Program ini diterbitkan dalam upaya mendorong pemerataan pendidikan tinggi dan diberikan kepada mahasiswa dengan sasaran penerima Program KIP Kuliah namun tidak dapat diprioritaskan sebagai penerima KIP Kuliah karena keterbatasan kuota penerima KIP Kuliah di perguruan tinggi.

i. Kertas Kerja Perhitungan Besaran Biaya Pendidikan

Sesuai dengan regulasi yang berlaku, besaran biaya pendidikan penerima KIP Kuliah dihitung berdasarkan rata-rata besaran biaya pendidikan mahasiswa non penerima KIP Kuliah dan non-penerima ADik di program studi yang sama. Mulai semester Gasal Tahun Akademik 2023/2024, Puslapdik menyediakan kertas kerja formulasi perhitungan besaran usulan biaya pendidikan dari perguruan tinggi bagi penerima KIP Kuliah agar terjadi keseragaman dan mendorong kedisiplinan perguruan tinggi dalam menetapkan besaran usulan biaya pendidikan sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga dapat meminimalisir kesalahan pengajuan biaya pendidikan yang diusulkan.

j. Sinkronisasi Data Penerima KIP Kuliah dengan PDDikti

Mulai semester Gasal 2023/2024, proses pencairan penerima di SIM KIP Kuliah hanya dapat dilakukan jika data mahasiswa penerima KIP Kuliah sudah terdata di PDDikti sehingga dapat dilakukan sinkronisasi data SIM KIP Kuliah dan data PDDikti sebagai syarat diajukan pencairan KIP Kuliahnya. Dengan sinkronisasi ini diharapkan dapat meningkatkan keakuratan data dan keaktifan studi penerima KIP Kuliah di SIM KIP Kuliah, sehingga dapat meminimalisir peluang kesalahan operator dalam menetapkan maupun mengajukan mahasiswa yang sudah tidak aktif.

k. Penyaluran biaya Pendidikan Beasiswa Unggulan langsung ke Perguruan Tinggi

Untuk penerima Beasiswa Unggulan Angkatan tahun 2023, Puslapdik bekerja sama dengan Perguruan Tinggi yang bersedia untuk menyalurkan biaya Pendidikan mahasiswa penerima Beasiswa Unggulan langsung ke rekening Perguruan Tinggi, sedangkan untuk biaya buku dan biaya hidup beasiswa tetap disalurkan ke rekening mahasiswa. Nominal biaya pendidikan disalurkan berdasarkan invoice tagihan biaya pendidikan Perguruan Tinggi, bukan dari rerata pada kontrak perjanjian Kerjasama Beasiswa unggulan.

l. Pengembangan aplikasi SIM-ANDIK

Pokja Aneka Tunjangan telah mengembangkan aplikasi SIM-ANDIK, aplikasi tersebut masih bersifat internal yang digunakan untuk (1) Generate/penerbitan SK penerima tunjangan profesi dan Sk penerima tunjangan khusus, (2) Untuk mendeteksi jika terjadi dalam pembayaran nominal inpassing, (3) Untuk mendeteksi jika nomor rekening guru tidak sesuai, dan (4) memonitoring pergerakan penyaluran tunjangan secara real time

2. Penghargaan

Pada tahun 2023 Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan mendapatkan penghargaan sebagai unit kerja peringkat Pertama dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia / SDM Award Kategori Wilayah Sekretariat Jenderal Tahun 2023.



3. Program Crosscutting/Collaborative

Pada tahun 2023, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan melakukan program crosscutting /collaborative berupa pemberian beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) yang merupakan program kolaborasi antara Kemendikbudristek melalui Puslapdik dengan LPDP, Kementerian Keuangan.



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi



lembaga pengelola dana pendidikan

Pembagian Peran Puslapdik dengan LPDP:

 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	 lembaga pengelola dana pendidikan
Mengalokasikan anggaran administrasi dan Operasional masing-masing Program Beasiswa yang akan digunakan untuk Kegiatan sosialisasi, rekrutmen, seleksi, pemantauan dan evaluasi, penetapan Penerima Pendanaan ataupun kegiatan lainnya guna keberhasilan pelaksanaan Program	Mengalokasikan anggaran Pendanaan Beasiswa sesuai usulan yang disampaikan oleh Kemendikbudristek dengan jumlah total sebagaimana disebutkan pada perjanjian kerjasama
Melakukan rekrutmen atau seleksi kepada calon Penerima Pendanaan termasuk melakukan verifikasi atas rincian anggaran program berdasarkan pedoman/panduan/petunjuk teknis penyelenggaraan Pendanaan Beasiswa serta memegang prinsip kompetisi yang sehat dan transparan	Menyalurkan Pendanaan Beasiswa dalam bentuk uang tunai sesuai komponen biaya beasiswa
Melakukan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana dari Penerima Pendanaan sebelum disampaikan kepada LPD	Melakukan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana dari Penerima Pendanaan sebelum disampaikan kepada LPDP
Mengalokasikan anggaran pendamping untuk Manajemen Pelaksana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemendikbudristek	
Menyelenggarakan Program Beasiswa sesuai dengan pedoman/Panduan/Petunjuk teknis penyelenggaraan Pendanaan Beasiswa yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek	

Menggunakan sistem informasi atau saluran resmi yang disampaikan oleh PIHAK KESATU untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Beasiswa	
Menyampaikan usulan Penerima Pendanaan berdasarkan hasil seleksi kepada LPDP	
Menyampaikan surat permintaan pembayaran Pendanaan Beasiswa kepada LPDP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian	
Menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK KESATU apabila terdapat perubahan identitas dan/atau nomor rekening Penerima Pendanaan	
Melaporkan dan mengembalikan sisa dana yang tidak digunakan atau tidak direalisasikan oleh Penerima Pendanaan melalui mekanisme pemindahbukuan/transfer ke rekening yang ditunjuk oleh LPDP	
Memberikan layanan komunikasi kepada Penerima Pendanaan terkait pelaksanaan Program Beasiswa	
Mengelola dokumen keuangan dan arsip pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kearsipan	
Menyampaikan laporan pelaksanaan Program Beasiswa kepada LPDP	
Melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi Program Beasiswa	

Menggunakan sistem informasi atau saluran resmi yang disampaikan oleh PIHAK KESATU untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Beasiswa	
Menyampaikan usulan Penerima Pendanaan berdasarkan hasil seleksi kepada LPDP	
Menyampaikan surat permintaan pembayaran Pendanaan Beasiswa kepada LPDP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian	
Menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK KESATU apabila terdapat perubahan identitas dan/atau nomor rekening Penerima Pendanaan	
Melaporkan dan mengembalikan sisa dana yang tidak digunakan atau tidak direalisasikan oleh Penerima Pendanaan melalui mekanisme pemindahbukuan/transfer ke rekening yang ditunjuk oleh LPDP	
Memberikan layanan komunikasi kepada Penerima Pendanaan terkait pelaksanaan Program Beasiswa	
Mengelola dokumen keuangan dan arsip pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kearsipan	
Menyampaikan laporan pelaksanaan Program Beasiswa kepada LPDP	
Melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi Program Beasiswa	

Dampak Manfaat

RINCIAN OUTPUT	SEMULA		MENJADI		EFISIENSI APBN
	SASARAN	APBN	SASARAN	APBN	
Mahasiswa Yang mendapatkan Basiswa Afiriasi Pendidikan Tinggi (ADIK)	7.417	Rp 153.000.000.000,00	7.417	Rp 7.799.420.000,00	Rp 145.200.580.000,00

Dengan melakukan program crosscutting / collaborative terkait beasiswa ADik, terdapat efisiensi APBN yang bisa dimanfaatkan untuk Kegiatan Prioritas lainnya

BUKTI KERJASAMA



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PROGRAM PENDANAAN BEASISWA KEMENTERIAN PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2023

NOMOR: PRJ- 11 /LPDP/2023
NOMOR: 04/III/PKS/2023

Pada hari ini tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh tiga (03-03-2023), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. ANDIN HADIYANTO** : Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPDP, yang berkedudukan di Gedung Danadyaksa, Jl. Cikini Raya No. 91 A-D, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. SUHARTI** : Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berkedudukan di Gedung C Komplek Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Jalan Jenderal Sudirman Pintu 1 Senayan Jakarta Pusat 10270, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Halaman 1 dari 18

PASAL 22

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



ANDIN HADIYANTO

PIHAK KEDUA



SIHARTI

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Halaman 15 dari 18



BAB IV

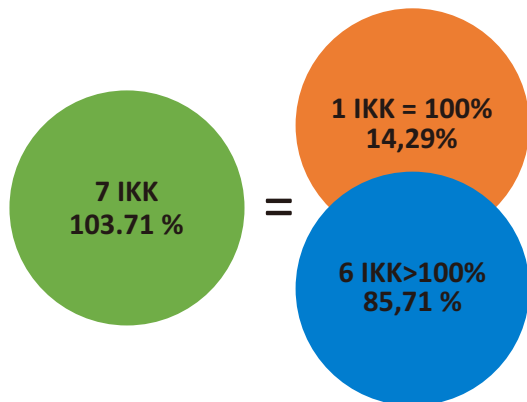
PENUTUP

PENUTUP

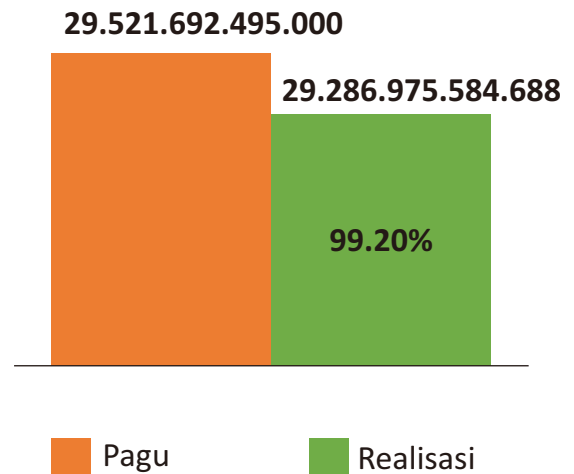
A. Ringkasan Kinerja

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	%
1	[SK 1] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar	[IKK 1.1] Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang memperoleh PIP	Orang	10.360.614	10.386.997	100,25
	[SK 2] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat menengah	[IKK 1.2] Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat yang memperoleh PIP	Orang	4.369.968	4.471.118	102,31
2	[SK 3] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional	[IKK 2.1] Jumlah siswa SMA/SMK/SMLB/Sederajat yang memperoleh PIP	Orang	3.197.410	3.255.247	101,81
3	[SK 4] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi	[IKK 3.1] Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang memperoleh tunjangan/bantuan	Orang	343.118	348.873	101,68
4	[SK 5] Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	[IKK 4.1] Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi	Orang	816.271	929.950	113,93
5		[IKK 5.1] Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB	Predikat	A	A	100
		[IKK 5.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85	Nilai	88	93	106,01
					Rata-rata %	103,71

Capaian Kinerja



Penyerapan Anggaran



Kinerja Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) tahun 2023 dinyatakan berhasil karena capaian rata-ratanya mencapai 103,71% dari tujuh (7) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah diteapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023. Dari 7 IKK tersebut, sebanyak enam (6) IKK mendapatkan capaian lebih dari 100% dan satu (1) IKK yang mendapat angka 100%, yaitu “Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB”. Meskipun secara nilai ada peningkatan dari capaian tahun sebelumnya, akan tetapi masih tetap di predikat yang sama, yaitu “A”. Capaian Kinerja tersebut didukung kinerja keuangan di tahun 2023 dengan penggunaan anggaran sebesar Rp29.286.975.584.688,00 atau 99,20% dari total pagu sebesar Rp29.521.692.495.000,00.

B. Langkah Kerja ke Depan

Untuk memastikan perbaikan pencapaian di tahun yang akan datang Pusat Layanan Pembiayaan (Puslapdik) akan melakukan langkah-langkah berikut:



melakukan pengembangan aplikasi (sistem informasi) yang digunakan untuk melayani penerima manfaat dari Puslapdik, yaitu Sipintar (aplikasi PIP) dan SIM KIP Kuliah



melakukan monitoring dan evaluasi internal secara berkala atas progress capaian Rincian Output (RO) dan hasil evaluasi tersebut menjadi sumber data dalam melaporkan capaian RO bulanan pada aplikasi SAKTI (Kementerian Keuangan)



melakukan monitoring dan evaluasi internal secara berkala atas progress capaian target Perjanjian Kinerja dan hasil evaluasi tersebut menjadi sumber data dalam melaporkan pengukuran kinerja pada aplikasi SPASIKITA (Kemendikbudristek)



menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya untuk perbaikan implementasi SAKIP



melakukan perbaikan berkelanjutan atas mekanisme perencanaan program dan Kegiatan untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja yang diperjanjikan



LAMPIRAN



**Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Dengan
Sekretaris Jenderal**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Abdul Kahar

Jabatan : Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Suharti

Jabatan : Sekretaris Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 26 Januari 2023

Sekretaris Jenderal,

**Kepala Pusat Layanan Pembiayaan
Pendidikan,**



Suharti



Abdul Kahar

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[SK 1] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar	[IKK 1.1] Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang memperoleh PIP	10360614
		[IKK 1.2] Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat yang memperoleh PIP	4369968
2	[SK 2] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat menengah	[IKK 2.1] Jumlah siswa SMA/SMK/SMLB/Sederajat yang memperoleh PIP	3197410
3	[SK 3] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional	[IKK 3.1] Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang memperoleh tunjangan/bantuan	343118
4	[SK 4] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi	[IKK 4.1] Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi	816271
5	[SK 5] Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	[IKK 5.1] Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB	A
		[IKK 5.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85	88

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4269	Layanan Pembiayaan Pendidikan	Rp. 29.975.079.000
2	4464	Layanan Pembiayaan Pendidikan Kesejahteraan Guru Non PNS	Rp. 8.027.879.624.000
3	4465	Layanan Pembiayaan Pendidikan Dasar Menengah	Rp. 8.386.822.697.000
4	4469	Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi	Rp. 12.062.396.603.000
		TOTAL	Rp. 28.507.074.003.000

Jakarta, 26 Januari 2023

Sekretaris Jenderal,

**Kepala Pusat Layanan Pembiayaan
Pendidikan,**



Suharti



Abdul Kahar



**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Dengan
Sekretaris Jenderal**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Abdul Kahar

Jabatan : Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Suharti

Jabatan : Sekretaris Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 18 Desember 2023

Sekretaris Jenderal,

**Kepala Pusat Layanan Pembiayaan
Pendidikan,**



Suharti



Abdul Kahar

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[SK 1.0] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar	[IKK 1.1] Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang memperoleh PIP	10360614
		[IKK 1.2] Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat yang memperoleh PIP	4369968
2	[SK 2.0] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat menengah	[IKK 2.1] Jumlah siswa SMA/SMK/SMLB/Sederajat yang memperoleh PIP	3197410
3	[SK 3.0] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional	[IKK 3.1] Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang memperoleh tunjangan/bantuan	343118
4	[SK 4.0] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi	[IKK 4.1] Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi	816271
5	[SK 5.0] Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	[IKK 5.1] Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB	A
		[IKK 5.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85	88

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4269	Layanan Pembiayaan Pendidikan	Rp. 29.975.079.000
2	4469	Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi	Rp. 12.105.196.023.000
3	4465	Layanan Pembiayaan Pendidikan Dasar Menengah	Rp. 9.779.934.947.000
4	4464	Layanan Pembiayaan Pendidikan Kesejahteraan Guru Non PNS	Rp. 7.606.586.446.000
		TOTAL	Rp. 29.521.692.495.000

Jakarta, 18 Desember 2023

Sekretaris Jenderal,

**Kepala Pusat Layanan Pembiayaan
Pendidikan,**



Suharti



Abdul Kahar



**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN 1
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
TAHUN 2023**

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN s.d Bulan Mei Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN 1

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[SK 1.0] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar	[IKK 1.1] Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang memperoleh PIP	Orang	10360614	TW1 : 3605959	TW1 : 3276813
1	[SK 1.0] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar	[IKK 1.2] Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat yang memperoleh PIP	Orang	4369968	TW1 : 2920504	TW1 : 2103550
1	[SK 2.0] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat menengah	[IKK 2.1] Jumlah siswa SMA/SMK/SMLB/Sederajat yang memperoleh PIP	Orang	3197410	TW1 : 1326247	TW1 : 1054907
1	[SK 3.0] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional	[IKK 3.1] Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang memperoleh tunjangan/bantuan	Orang	343118	TW1 : 5829	TW1 : 9166
1	[SK 4.0] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi	[IKK 4.1] Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi	Orang	816271	TW1 : 355133	TW1 : 656010
1	[SK 5.0] Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	[IKK 5.1] Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB	predikat	A	TW1 : -	TW1 : -
1	[SK 5.0] Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	[IKK 5.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85	nilai	88	TW1 : 0	TW1 : 0

2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN 1

a). PENYERAPAN ANGGARAN

Pagu Anggaran sebesar **Rp.28.500.074.003.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 19 Mei 2023 sebesar **Rp. 8.996.434.155.713** atau **31.57%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 19 Mei 2023 **Rp. 19.503.639.847.287**

b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN

A . SK 1.0 Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar

- IKK 1.1 Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang memperoleh PIP

Progress / Kegiatan :

a. Capaian: Terselurkannya dana manfaat PIP kepada 3.276.813 peserta didik jenjang SD dan sederajat dari keluarga miskin/rentan miskin yang tercatat pada : (1) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan/atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), (2) Data Pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan Ekstrem (P3KE) Desil 1 yang beririsan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) b. Kegiatan yang sudah dilakukan: (1) Cleansing data hasil padanan antara DTKS dan DAPODIK (2) Cleansing data hasil padanan antara P3KE dan DAPODIK (3) Pengolahan data hasil padanan antara DTKS dan DAPODIK (4) Pengolahan data hasil padanan antara P3KE dan DAPODIK (5) Penetapan data peserta didik penerima PIP yang tercatat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan/atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). (6) Penetapan ata peserta didik penerima PIP yang tercatat pada Data Pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan Ekstrem (P3KE) Desil 1 yang beririsan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Kendala / Permasalahan :

1. Masih terdapat Sekolah Dasar dan Lembaga Paket A belum melakukan pemutahiran dan sinkronisasi pada Dapodik terutama bagi sekolah yang dilakukan penggabungan dari beberapa sekolah menjadi satu sekolah. 2. Masih terdapat data anomali pada Dapodik diantaranya : a. NIK Invalid c. NIK Tidak Valid Dukcapil d. NISN Invalid e. Inkonsistensi informasi kelayakan PIP f. Inkonsistensi informasi pekerjaan orang tua g. Inkonsistensi informasi poenghasilan orang tua h. Peserta didik terdaftar di lebih dari 1 sekolah i. Nama ibu kandung tidak valid 3. Perubahan pada DTKS : a. DTKS tidak memiliki Desil b. DTKS tidak hanya berisi keluarga miskin dan rentan

miskin c. DTKS hanya memiliki flag bantuan penerima PKH dan BPNT saja. 4. Data P3KE a. Data keluarga miskin hanya diyakini pada Desil 1 saja. b. Terdapat data P3KE desil 1 yang tidak beririsan dengan data DTKS

Strategi / Tindak Lanjut :

- Berkoordinasi dengan Pusdatin, Setditjen PAUD Dikdas Dikmen dan Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota dalam melakukan sosialisasi pemutahiran data dan sinkronisasi Dapodik Sekolah, serta kewajiban peserta didik memiliki NIK Valid Dukcapil serta terkait data anomali pada Dapodik, untuk melakukan langkah-langkah perbaikan data peserta didik pada Dapodik pengambilan keputusan. - Berkoordinasi dengan Pusdatin terkait data hasil padanan antara DTKS dan DAPODIK. - Melakukan cleansing data Dapodik untuk proses pengambilan keputusan - Melakukan hold data terhadap data anomali. - Berkoordinasi dengan Kemenko PMK terkait data P3KE Desil 1 yang tidak beririsan dengan DTKS untuk langkah tindak lanjut yang akan diambil

B . SK 1.0 Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar

- IKK 1.2 Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat yang memperoleh PIP

Progress / Kegiatan :

a. Capaian: Tersalurkannya dana manfaat PIP kepada 2.103.550 peserta didik jenjang SMP dan sederajat dari keluarga miskin/rentan miskin yang tercatat pada : (1) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan/atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), (2) Data Pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan Ekstrem (P3KE) Desil 1 yang beririsan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) b. Kegiatan yang sudah dilakukan: (1) Cleansing data hasil padanan antara DTKS dan DAPODIK (2) Cleansing data hasil padanan antara P3KE dan DAPODIK (3) Pengolahan data hasil padanan antara DTKS dan DAPODIK (4) Pengolahan data hasil padanan antara P3KE dan DAPODIK (5) Penetapan data peserta didik penerima PIP yang tercatat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan/atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). (6) Penetapan ata peserta didik penerima PIP yang tercatat pada Data Pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan Ekstrem (P3KE) Desil 1 yang beririsan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Kendala / Permasalahan :

1. Masih terdapat Sekolah Menengah Pertama dan Lembaga Paket B belum melakukan pemutahiran dan sinkronisasi pada Dapodik terutama bagi sekolah yang dilakukan penggabungan dari beberapa sekolah menjadi satu sekolah. 2. Masih terdapat data anomali pada Dapodik diantaranya : a. NIK Invalid c. NIK Tidak Valid Dukcapil d. NISN Invalid e. Inkonsistensi informasi kelayakan PIP f. Inkonsistensi informasi pekerjaan orang tua g. Inkonsistensi informasi penghasilan orang tua h. Peserta didik terdaftar di lebih dari 1 sekolah i. Nama ibu kandung tidak valid 3. Perubahan pada DTKS : a. DTKS tidak memiliki Desil b. DTKS tidak hanya berisi keluarga miskin dan rentan miskin c. DTKS hanya memiliki flag bantuan penerima PKH dan BPNT saja. 4. Data P3KE a. Data keluarga miskin hanya diyakini pada Desil 1 saja. b. Terdapat data P3KE desil 1 yang tidak beririsan dengan data DTKS

Strategi / Tindak Lanjut :

- Berkoordinasi dengan Pusdatin, Setditjen PAUD Dikdas Dikmen dan Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota dalam melakukan sosialisasi pemutahiran data dan sinkronisasi Dapodik Sekolah, serta kewajiban peserta didik memiliki NIK Valid Dukcapil serta terkait data anomali pada Dapodik, untuk melakukan langkah-langkah perbaikan data peserta didik pada Dapodik pengambilan keputusan. - Berkoordinasi dengan Pusdatin terkait data hasil padanan antara DTKS dan DAPODIK. - Melakukan cleansing data Dapodik untuk proses pengambilan keputusan - Melakukan hold data terhadap data anomali. - Berkoordinasi dengan Kemenko PMK terkait data P3KE Desil 1 yang tidak beririsan dengan DTKS untuk langkah tindak lanjut yang akan diambil

C . SK 2.0 Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat menengah

- IKK 2.1 Jumlah siswa SMA/SMK/SMLB/Sederajat yang memperoleh PIP

Progress / Kegiatan :

IKK ini didukung dengan program PIP jenjang SMA/SMK/ sederajat dan bantuan Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM). PIP SMA/SMK/ Sederajat: a. Capaian Tersalurkannya dana manfaat PIP kepada 461.283 peserta didik jenjang SMA dan sederajat serta tersalurkannya dana manfaat PIP kepada 590.815 peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin yang tercatat pada : (1) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan/atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), (2) Data Pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan Ekstrem (P3KE) Desil 1 yang beririsan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) b. Kegiatan yang sudah dilakukan: (1) Cleansing data hasil padanan antara DTKS dan DAPODIK (2) Cleansing data hasil padanan antara P3KE dan DAPODIK (3) Pengolahan data hasil padanan antara DTKS dan DAPODIK (4) Pengolahan data hasil padanan antara P3KE dan DAPODIK (5) Penetapan data peserta didik penerima PIP yang tercatat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan/atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). (6) Penetapan ata peserta didik penerima PIP yang tercatat pada Data Pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan Ekstrem (P3KE) Desil 1 yang beririsan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Program ADEM: a. Capaian: Pada Bulan Maret sudah tersalurkan sebanyak 2.809 Siswa Lanjutan dengan Total Anggaran yang sudah tersalur sebesar Rp.53.232.000.000,- b. Kegiatan yang sudah dilakukan: 1). Penyusunan NSPK Program ADEM 2). Bimbingan Teknis Sekolah Penyelenggara Program ADEM 3). Sosialisasi Pelaksanaan Program ADEM Tahun 2023.

Kendala / Permasalahan :

1. Masih terdapat Sekolah belum melakukan pemutahiran dan sinkronisasi pada Dapodik terutama bagi sekolah yang dilakukan penggabungan dari beberapa sekolah menjadi satu sekolah. 2. Masih terdapat data anomali pada Dapodik diantaranya : a. NIK Invalid c. NIK Tidak Valid Dukcapil d. NISN Invalid e. Inkonsistensi informasi kelayakan PIP f. Inkonsistensi informasi pekerjaan orang tua g. Inkonsistensi informasi penghasilan orang tua h. Peserta didik terdaftar di lebih dari 1 sekolah i. Nama ibu kandung tidak valid 3. Perubahan pada DTKS : a. DTKS tidak memiliki Desil b. DTKS tidak hanya berisi keluarga miskin dan rentan miskin c. DTKS hanya memiliki flag bantuan penerima PKH dan BPNT saja. 4. Data P3KE a. Data keluarga miskin hanya diyakini pada Desil 1 saja. b. Terdapat data P3KE desil 1 yang tidak beririsan dengan data DTKS

Strategi / Tindak Lanjut :

- Berkoordinasi dengan Pusdatin, Setditjen PAUD Dikdas Dikmen dan Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota dalam melakukan sosialisasi pemutahiran data dan sinkronisasi Dapodik Sekolah, serta kewajiban peserta didik memiliki NIK Valid Dukcapil serta terkait data anomali pada Dapodik, untuk melakukan langkah-langkah perbaikan data peserta didik pada Dapodik pengambilan keputusan. - Berkoordinasi dengan Pusdatin terkait data hasil padanan antara DTKS dan DAPODIK. - Melakukan cleansing data Dapodik untuk proses



pengambilan keputusan - Melakukan hold data terhadap data anomali. - Berkoordinasi dengan Kemenko PMK terkait data P3KE Desil 1 yang tidak beririsan dengan DTKS untuk langkah tindak lanjut yang akan diambil

D . SK 3.0 Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional

- IKK 3.1 Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang memperoleh tunjangan/bantuan

Progress / Kegiatan :

a. Capaian: Penyaluran Kurang Bayar (Carry Over) Tahun 2022 dengan total yang sudah disalurkan sebanyak 9.166 orang pada TW 1 b. Kegiatan yang sudah dilakukan: Melakukan Verifikasi data dan melakukan Rekon dengan Dinas Pendidikan terkait

Kendala / Permasalahan :

Kekurangan Pembayaran Tahun 2022 (Carry Over) disebabkan oleh Peralihan Guru Non PNS menjadi Guru PPPK yang beralih juga Pembayaran TPGnya yang semula beban pembayaran oleh kementerian/pusat menjadi beban pemerintah daerah.

Strategi / Tindak Lanjut :

Melakukan Rekon data pembayaran dengan dinas pendidikan di daerah agar tersalurkan sesuai hak nya guru.

E . SK 4.0 Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi

- IKK 4.1 Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi

Progress / Kegiatan :

IKK ini di dukung oleh program KIP Kuliah, Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) dan Beasiswa Unggulan. Capaian ketiga program tersebut pada TW 1 sudah 656.010 orang. KIP Kuliah: a. Capaian: - Penyaluran Bantuan Sosial KIP Kuliah bulan Januari - Maret 2023 dengan total capaian 73,45% b. Kegiatan yang sudah dilakukan: - Review Panduan KIP Kuliah Tahun 2023 - Rapat Koordinasi Integrasi Data dan Sistem Pendaftaran KIP Kuliah Merdeka Tahun 2023 - Pengembangan Sistem Monev dan Pendaftaran Mahasiswa KIP Kuliah Merdeka Tahun 2023 - FGD Skema KIP Kuliah Tahun 2023 - Sinkronisasi dan Migrasi Data Mahasiswa KIP Kuliah - Finalisasi Sistem Pendaftaran KIP Kuliah Merdeka Tahun 2023 - Verifikasi dan Validasi Data Pencairan KIP Kuliah Merdeka On Going Semester Genap Tahun 2023 - Percepatan Pencairan KIP Kuliah On Going Semester Genap 2023 - Rapat Koordinasi KIP Kuliah Merdeka Tahun 2023 dan Evaluasi Pelaksanaan KIP Kuliah Merdeka Tahun 2022 ADIK: a. Capaian: Belum ada yang disalurkan karena proses pengalihan untuk di biayai dari LPDP. b. Kegiatan yang sudah dilakukan: 1). Penyusunan NSPK Program ADIK

2). Sinkronisasi dan Validasi Data ADIK On Going

3). Koordinasi Pelaksanaan Program ADEM dengan PT Penyelenggara. Beasiswa Unggulan: a. Capaian: Penyaluran Beasiswa Unggulan bulan Januari - Maret 2023 dengan total capaian 95 orang b. Kegiatan yang sudah dilakukan: - Evaluasi dan Revisi Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beasiswa Unggulan - Desain Pengembangan Sistem Pelaporan Beasiswa Unggulan On Going Tahun 2023 dan Koordinasi Pencairan KIP Kuliah On Going Tahun 2023 - Analisis Dokumen Laporan Penerima Beasiswa Unggulan Guna Pencairan On Going Semester Genap Tahun 2022/2023 - Desain Pengembangan Sistem Pendaftaran Beasiswa Unggulan Tahun 2023 dan Penyusunan Instrumen Tracer Study Penerima KIP Kuliah - Rekonsiliasi terhadap Penyaluran Dana dengan Bank Penyalur dan Pembahasan Pelaksanaan Pembekalan Bagi Penerima Beasiswa Unggulan - Finalisasi Panduan Beasiswa Unggulan dan Review Panduan Seleksi Beasiswa Unggulan Tahun 2023 - Evaluasi dan Revisi Instrumen Monitoring dan Evaluasi Program Beasiswa Unggulan pada Perguruan Tinggi Tahun 2023 - Penelaahan Data Perencanaan Anggaran dan Unit Cost Beasiswa Unggulan TA 2023 - Finalisasi Instrumen Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Beasiswa Unggulan Tahun 2023 - Pendalaman Materi Narasumber Acara Kegiatan Pembekalan Studi Penerima Beasiswa Unggulan - Pembekalan Studi Penerima Beasiswa Unggulan

Kendala / Permasalahan :

- Kekurangan server, sehingga sistem KIP Kuliah dan Bidikmisi tidak bisa diakses yang mengakibatkan terhambatnya pengajuan pencairan dan pendaftaran
- Calon penerima yang tidak terdata DTKS banyak mengajukan komplain karena harus membayar biaya UTBK
- Rencana pengalihan dana penyaluran ADIK ke LPDP belum selesai
- Sistem pelaporan Beasiswa Unggulan masih dalam masa perbaikan untuk angkatan tahun 2021 dan 2022 dan banyak mahasiswa yang belum melaporkan sehingga menghambat proses pencairan

Strategi / Tindak Lanjut :

- Koordinasi dengan Pusdatin secara berkala: - Melayani setiap komplain melalui berbagai kanal pengaduan, meningkatkan sosialisasi melalui media sosia dan Pemuda Pelajar Merdeka
- Sinkronisasi data dengan Perguruan Tinggi dan LPDP untuk persiapan penyaluran dana bantuan
- Berkoordinasi dengan bagian IT terkait sistem supaya dapat dengan mudah di gunakan
- Komunikasi dengan operator PT untuk verval data atau dokumen awardee Basiswa Unggulan.

F . SK 5.0 Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

- IKK 5.1 Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB

Progress / Kegiatan :

Indikator ini ditargetkan di akhir tahun, sehingga di TW 1 memang belum ada realisasi. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung IKK ini adalah dengan melakukan reviu terhadap capaian renstras tahun 2022, menyusun Perjanjian Kinerja (PK) 2023, Penyusunan RKT 2024, dan Penyusunan Rencana Aksi.

Kendala / Permasalahan :

Di Dalam LHE SAKIP 2022 terdapat catatan: 1. Dokumen pendukung dalam rangka pelaksanaan rapat pengukuran kinerja, belum dilengkapi dengan surat undangan dan dokumentasi pelaksanaan rapat pengukuran kinerja 2. Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian dari seluruh pegawai.

Strategi / Tindak Lanjut :

Melengkapi catatan LHE SAKIP 2022 untuk peningkatan nilai SAKIP 2023

G . SK 5.0 Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

- IKK 5.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85

Progress / Kegiatan :

Melakukan monitoring nilai EKA dan IKPA secara berkala

Kendala / Permasalahan :

Beberapa indikator di IKPA masih ada yang nilainya rendah. Misalkan Deviasi Halaman III DIPA

Strategi / Tindak Lanjut :

Melakukan evaluasi kesesuaian antara Rencana Penarikan Dana dengan realisasi SP2D setiap bulannya.

3. REKOMENDASI PIMPINAN

Pastikan capaian sesuai target yang sudah tertera di Perjanjian Kinerja 2023. Evaluasi secara berkala capaian masing-masing Indikator dari Sasaran Kinerja.

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan I tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Jakarta, 19 Mei 2023

Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan



Abdul Kahar



**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN II
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
TAHUN 2023**

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN s.d Bulan Juli Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[SK 1.0] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar	[IKK 1.1] Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang memperoleh PIP	Orang	10360614	TW2 : 312994	TW2 : 1614457
1	[SK 1.0] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar	[IKK 1.2] Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat yang memperoleh PIP	Orang	4369968	TW2 : 404560	TW2 : 655419
1	[SK 2.0] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat menengah	[IKK 2.1] Jumlah siswa SMA/SMK/SMLB/Sederajat yang memperoleh PIP	Orang	3197410	TW2 : 328032	TW2 : 452569
1	[SK 3.0] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional	[IKK 3.1] Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang memperoleh tunjangan/bantuan	Orang	343118	TW2 : 265679	TW2 : 257885
1	[SK 4.0] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi	[IKK 4.1] Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi	Orang	816271	TW2 : 333409	TW2 : 16812
1	[SK 5.0] Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	[IKK 5.1] Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB	predikat	A	TW2 : -	TW2 : -
1	[SK 5.0] Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	[IKK 5.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85	nilai	88	TW2 : 0	TW2 : 0

2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II

a). PENYERAPAN ANGGARAN

Pagu Anggaran sebesar **Rp.28.500.074.003.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 17 Juli 2023 sebesar **Rp. 13.183.560.866.544** atau **46.26%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 17 Juli 2023 **Rp. 15.316.513.136.456**

b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN

A . SK 1.0 Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar

- IKK 1.1 Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang memperoleh PIP

Progress / Kegiatan :

a. Capaian: Terselurkannya dana manfaat PIP kepada 4.891.270 peserta didik jenjang SD dan sederajat dari keluarga miskin/rentan miskin yang tercatat pada : (1) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan/atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), (2) Data Pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan Ekstrem (P3KE) Desil 1 yang beririsan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) (3) Usulan dari pemangku kepentingan b. Kegiatan yang sudah dilakukan: (1) Cleansing data hasil padanan antara DTKS dan DAPODIK (2) Cleansing data hasil padanan antara P3KE dan DAPODIK (3) Cleansing data usulan pemangku kepentingan (4) Pengolahan data hasil padanan antara DTKS dan DAPODIK (5) Pengolahan data hasil padanan antara P3KE dan DAPODIK (6) Pengolahan data hasil usulan pemangku kepentingan (7) Penetapan data peserta didik penerima PIP yang tercatat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan/atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). (8) Penetapan data peserta didik penerima PIP yang tercatat pada Data Pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan Ekstrem (P3KE) Desil

Kendala / Permasalahan :

1. Masih terdapat Sekolah Dasar dan Lembaga Paket A belum melakukan pemutahiran dan sinkronisasi pada Dapodik terutama bagi sekolah yang dilakukan penggabungan dari beberapa sekolah menjadi satu sekolah. 2. Masih terdapat data anomali pada Dapodik diantaranya : a. NIK Invalid c. NIK Tidak Valid Dukcapil d. NISN Invalid e. Inkonsistensi informasi kelayakan PIP f. Inkonsistensi informasi pekerjaan orang tua g. Inkonsistensi informasi penghasilan orang tua h. Peserta didik terdaftar di lebih dari 1 sekolah i. Nama ibu

kandung tidak valid 3. Perubahan pada DTKS : a. DTKS tidak memiliki Desil b. DTKS tidak hanya berisi keluarga miskin dan rentan miskin c. DTKS hanya memiliki flag bantuan penerima PKH dan BPNT saja. 4. Data P3KE a. Data keluarga miskin hanya diyakini pada Desil 1 saja. b. Terdapat data P3KE desil 1 yang tidak beririsan dengan data DTKS 5. Masa pengusulan PIP Dikdasmen diperpanjang, hal ini dikarenakan terjadi kendala pada server sehingga mempengaruhi proses pengusulan

Strategi / Tindak Lanjut :

- Berkoordinasi dengan Pusdatin, Setditjen PAUD Dikdas Dikmen dan Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota dalam melakukan sosialisasi pemutahiran data dan sinkronisasi Dapodik Sekolah, serta kewajiban peserta didik memiliki NIK Valid Dukcapil serta terkait data anomali pada Dapodik, untuk melakukan langkah-langkah perbaikan data peserta didik pada Dapodik pengambilan keputusan. - Berkoordinasi dengan Pusdatin terkait data hasil padanan antara DTKS dan DAPODIK. - Melakukan cleansing data Dapodik untuk proses pengambilan keputusan - Melakukan hold data terhadap data anomali. - Berkoordinasi dengan Kemenko PMK terkait data P3KE Desil 1 yang tidak beririsan dengan DTKS untuk langkah tindak lanjut yang akan diambil - Berkoordinasi dengan Kemenko PMK terkait validasi data P3KE Desil 1, 2, 3, dan 4 untuk penetapan penerima PIP selanjutnya - Berkoordinasi dengan bank penyalur terkait data siswa yang belum melakukan aktivasi SK Nominasi

B . SK 1.0 Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar

- IKK 1.2 Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat yang memperoleh PIP

Progress / Kegiatan :

a. Capaian: Tersalurkannya dana manfaat PIP kepada 2.758.969 peserta didik jenjang SD dan sederajat dari keluarga miskin/rentan miskin yang tercatat pada : (1) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan/atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), (2) Data Pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan Ekstrem (P3KE) Desil 1 yang beririsan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) (3) Usulan dari pemangku kepentingan b. Kegiatan yang sudah dilakukan: (1) Cleansing data hasil padanan antara DTKS dan DAPODIK (2) Cleansing data hasil padanan antara P3KE dan DAPODIK (3) Cleansing data usulan pemangku kepentingan (4) Pengolahan data hasil padanan antara DTKS dan DAPODIK (5) Pengolahan data hasil padanan antara P3KE dan DAPODIK (6) Pengolahan data hasil usulan pemangku kepentingan (7) Penetapan data peserta didik penerima PIP yang tercatat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan/atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). (8) Penetapan data peserta didik penerima PIP yang tercatat pada Data Pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan Ekstrem (P3KE) Desil 1 yang beririsan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) (9) Penetapan data peserta didik penerima PIP dari usulan pemangku kepentingan

Kendala / Permasalahan :

1. Masih terdapat Sekolah Menengah Pertama dan Lembaga Paket B belum melakukan pemutahiran dan sinkronisasi pada Dapodik terutama bagi sekolah yang dilakukan penggabungan dari beberapa sekolah menjadi satu sekolah. 2. Masih terdapat data anomali pada Dapodik diantaranya : a. NIK Invalid c. NIK Tidak Valid Dukcapil d. NISN Invalid e. Inkonsistensi informasi kelayakan PIP f. Inkonsistensi informasi pekerjaan orang tua g. Inkonsistensi informasi penghasilan orang tua h. Peserta didik terdaftar di lebih dari 1 sekolah i. Nama ibu kandung tidak valid 3. Perubahan pada DTKS : a. DTKS tidak memiliki Desil b. DTKS tidak hanya berisi keluarga miskin dan rentan miskin c. DTKS hanya memiliki flag bantuan penerima PKH dan BPNT saja. 4. Data P3KE a. Data keluarga miskin hanya diyakini pada Desil 1 saja. b. Terdapat data P3KE desil 1 yang tidak beririsan dengan data DTKS 5. Masa pengusulan PIP Dikdasmen diperpanjang, hal ini dikarenakan terjadi kendala pada server sehingga mempengaruhi proses pengusulan

Strategi / Tindak Lanjut :

- Berkoordinasi dengan Pusdatin, Setditjen PAUD Dikdas Dikmen dan Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota dalam melakukan sosialisasi pemutahiran data dan sinkronisasi Dapodik Sekolah, serta kewajiban peserta didik memiliki NIK Valid Dukcapil serta terkait data anomali pada Dapodik, untuk melakukan langkah-langkah perbaikan data peserta didik pada Dapodik pengambilan keputusan. - Berkoordinasi dengan Pusdatin terkait data hasil padanan antara DTKS dan DAPODIK. - Melakukan cleansing data Dapodik untuk proses pengambilan keputusan - Melakukan hold data terhadap data anomali. - Berkoordinasi dengan Kemenko PMK terkait data P3KE Desil 1 yang tidak beririsan dengan DTKS untuk langkah tindak lanjut yang akan diambil - Berkoordinasi dengan Kemenko PMK terkait validasi data P3KE Desil 1, 2, 3, dan 4 untuk penetapan penerima PIP selanjutnya - Berkoordinasi dengan bank penyalur terkait data siswa yang belum melakukan aktivasi SK Nominasi

C . SK 2.0 Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat menengah

- IKK 2.1 Jumlah siswa SMA/SMK/SMLB/Sederajat yang memperoleh PIP

Progress / Kegiatan :

a. Capaian: Tersalurkannya dana manfaat PIP dan ADEM kepada 1.507.476 peserta didik jenjang SMA/SMK dan sederajat dari keluarga miskin/rentan miskin yang tercatat pada : (1) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan/atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), (2) Data Pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan Ekstrem (P3KE) Desil 1 yang beririsan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) (3) Usulan dari pemangku kepentingan b. Kegiatan yang sudah dilakukan: (1) Cleansing data hasil padanan antara DTKS dan DAPODIK (2) Cleansing data hasil padanan antara P3KE dan DAPODIK (3) Cleansing data usulan pemangku kepentingan (4) Pengolahan data hasil padanan antara DTKS dan DAPODIK (5) Pengolahan data hasil padanan antara P3KE dan DAPODIK (6) Pengolahan data hasil usulan pemangku kepentingan (7) Penetapan data peserta didik penerima PIP yang tercatat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan/atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). (8) Penetapan data peserta didik penerima PIP yang tercatat pada Data Pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan Ekstrem (P3KE) Desil 1 yang beririsan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) (9) Penetapan data peserta didik penerima PIP dari usulan pemangku kepentingan

Kendala / Permasalahan :

1. Masih terdapat Sekolah Menengah Atas dan Lembaga Paket C belum melakukan pemutahiran dan sinkronisasi pada Dapodik terutama bagi sekolah yang dilakukan penggabungan dari beberapa sekolah menjadi satu sekolah. 2. Masih terdapat data anomali pada Dapodik diantaranya : a. NIK Invalid c. NIK Tidak Valid Dukcapil d. NISN Invalid e. Inkonsistensi informasi kelayakan PIP f. Inkonsistensi informasi pekerjaan orang tua g. Inkonsistensi informasi penghasilan orang tua h. Peserta didik terdaftar di lebih dari 1 sekolah i. Nama ibu kandung tidak valid 3. Perubahan pada DTKS : a. DTKS tidak memiliki Desil b. DTKS tidak hanya berisi keluarga miskin dan rentan miskin c. DTKS hanya memiliki flag bantuan penerima PKH dan BPNT saja. 4. Data P3KE a. Data keluarga miskin hanya diyakini pada Desil 1 saja. b. Terdapat data P3KE desil 1 yang tidak beririsan dengan data DTKS" 5. Masa pengusulan PIP

Dikdasmen diperpanjang, hal ini dikarenakan terjadi kendala pada server sehingga mempengaruhi proses pengusulan

Strategi / Tindak Lanjut :

- Berkoordinasi dengan Pusdatin, Setditjen PAUD Dikdas Dikmen dan Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota dalam melakukan sosialisasi pemutakhiran data dan sinkronisasi Dapodik Sekolah, serta kewajiban peserta didik memiliki NIK Valid Dukcapil serta terkait data anomali pada Dapodik, untuk melakukan langkah-langkah perbaikan data peserta didik pada Dapodik pengambilan keputusan. - Berkoordinasi dengan Pusdatin terkait data hasil padanan antara DTKS dan DAPODIK. - Melakukan cleansing data Dapodik untuk proses pengambilan keputusan - Melakukan hold data terhadap data anomali. - Berkoordinasi dengan Kemenko PMK terkait data P3KE Desil 1 yang tidak beririsan dengan DTKS untuk langkah tindak lanjut yang akan diambil - Berkoordinasi dengan Kemenko PMK terkait validasi data P3KE Desil 1, 2, 3, dan 4 untuk penetapan penerima PIP selanjutnya - Berkoordinasi dengan bank penyalur terkait data siswa yang belum melakukan aktivasi SK Nominasi

D . SK 3.0 Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional

- IKK 3.1 Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang memperoleh tunjangan/bantuan

Progress / Kegiatan :

IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang memperoleh tunjangan/bantuan didukung dengan penyaluran aneka tunjangan. Sampai dengan akhir TW 2, Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) yang sudah tersalurkan sebanyak 267.051 orang. Selama periode TW 2, kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya adalah: (1) Pengembangan Sistem Aplikasi Pengolahan Data Penerbitan SK Aneka Tunjangan (2) Cleansing data hasil padanan antara data siap usul dari GTK dengan DAPODIK (3) Pegolahan data hasil padanan antara data siap usul dari GTK dengan DAPODIK (4) Penetapan data calon penerima Tunjangan Profesi Guru Non-PNS Semester 1 (5) Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Khusus Guru Non-PNS Pada Triwulan 1 (6) Penyusunan draft petunjuk teknis penyaluran Bantuan Insentif Guru NonPNS (7) Perhitungan data calon penerima Bantuan Insentif Guru NonPNS

Kendala / Permasalahan :

Masih terdapat data tidak Valid pada Dapodik diantaranya : a. Nomor NUPTK double Pemilik b. NIK Tidak Valid dengan Dukcapil c. Data Inpassing yang tidak Valid karena berbeda Nama

Strategi / Tindak Lanjut :

- Berkoordinasi dengan Pengelola DAPODIK, Setditjen GTK dan Dinas Pendidikan untuk Perbaikan permasalahan data - Berkoordinasi dengan Bank Penyalur terkait nomor Rekening dan NIK yang berbeda

E . SK 4.0 Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi

- IKK 4.1 Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi

Progress / Kegiatan :

IKK ini didukung dengan bantuan beasiswa KIP Kuliah, Beasiswa Unggulan dan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK). Sampai dengan akhir Triwulan 2 sudah tersalurkan bantuan/beasiswa di jenjang pendidikan tinggi kepada 672.822 orang mahasiswa. Kegiatan yang sudah dilakukan pada periode TW 2 diantaranya adalah: - Penyusunan Petunjuk Teknis Uji Coba Penyaluran Bantuan Sosial KIP Kuliah Merdeka Menggunakan Layanan Keuangan Digital - Sosialisasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Merdeka Tahun 2023 ke beberapa sentra - Pembahasan Addendum Perjanjian Kerjasama KIP Kuliah Tahun 2023 dengan Bank Himbara - Supervisi Program KIP Kuliah Merdeka Tahun 2023 - Pengembangan Sistem Pendaftaran Beasiswa Unggulan Tahun 2023 - Konsinyering Data Status SK Tugas Belajar Pegawai Penerima Beasiswa Unggulan - Pemutakhiran Data Penerima Beasiswa Unggulan Penghargaan KRI Nanggala dan Koordinasi Kebijakan Bagi Penerima Kategori Difabel - Percepatan Pencairan Program Beasiswa Unggulan On Going Triwulan 2 - Supervisi Mahasiswa Penerima Bantuan Pemerintah Program Beasiswa Unggulan Tahun 2023 - Bimbingan Teknis Pelaporan Penerima Beasiswa Penghargaan KRI Nanggala 402 pada Sistem Pelaporan Beasiswa Unggulan

Kendala / Permasalahan :

KIP KULIAH: 1. Kekurangan server, sehingga sistem KIP Kuliah dan Bidikmisi tidak bisa diakses yang mengakibatkan terhambatnya pengajuan pencairan dan pendaftaran 2. Calon penerima yang tidak terdata DTKS banyak mengajukan komplain karena harus membayar biaya UTBK 3. Rendahnya penyerapan anggaran bantuan sosial, dikarenakan: a. Banyak mahasiswa on going yang tidak aktif dan mengundurkan diri sehingga tidak diSK kan kembali dan tidak diajukan pencairan b. Banyak perguruan Tinggi khususnya Perguruan Tinggi Swasta dan prodi yang bermasalah sehingga mahasiswa belum bisa melanjutkan perkuliahan dan tidak bisa dicairkan dana KIP Kuliahnya BEASISWA UNGGULAN: - Terlambatnya laporan mahasiswa semester akhir yang seharusnya sudah menyampaikan ijazah atau SKL sehingga pelunasan Beasiswanya tidak dapat disalurkan - Terlambatnya laporan mahasiswa dikarenakan nilai salah satu mata kuliah belum didapat dari dosen pengajarnya - Bukti bayar biaya pendidikan atau hasil studi gagal upload, karena jaringan serta masih banyak mahasiswa yang salah dalam menepatkan untuk mengupload bukti bayar dan laporan perkembangan studi pada sistem - Kurangnya informasi dari setiap mahasiswa terhadap kemajuan pendidikannya - Beberapa operator perguruan tinggi telah di undang untuk melaksanakan sosialisasi dan koordinasi terkait pemberitahuan penerima Beasiswa Unggulan oleh Puslapdik, namun operator perwakilan Perguruan Tinggi tidak hadir sehingga beberapa mahasiswa yang berstatus studi di Perguruan Tinggi tersebut mengalami kendala dalam proses penyaluran dana dikarenakan perlunya verval Perguruan Tinggi terlebih dahulu - Adanya mahasiswa penerima Beasiswa Unggulan angkatan tahun 2022 yang perguruan tingginya belum mengetahui informasi mengenai tatacara verifikasi laporan perkembangan studi mahasiswa.

Strategi / Tindak Lanjut :

KIP KULIAH: 1. Koordinasi dengan Pusdatin secara berkala untuk menanggulangi kebutuhan mendesak dalam media penyimpanan data 2. Melayani setiap komplain melalui berbagai kanal pengaduan, meningkatkan sosialisasi melalui media sosia dan Pemuda Pelajar Merdeka 3. Meningkatkan koordinasi dengan Perguruan Tinggi dan LLDikti dalam hal: a. Monitoring dan pembinaan bagi mahasiswa penerima KIP Kuliah b. Menindaklanjuti progress penyelesaian masalah yang dihadapi Perguruan Tinggi c. Melakukan supervisi pelaksanaan program KIP Kuliah Merdeka Tahun 2023 ke beberapa PTS yang terdapat aduan BEASISWA UNGGULAN: - Mengundang, memberikan informasi secara daring seluruh penerima Beasiswa Unggulan yang masih aktif dan yang akan berakhir masa kontrak kerjasamanya di Bulan Oktober 2023, mahasiswa aktif yang belum dibayarkan pelunasan tahap akhir - Koordinasi dengan operator Perguruan Tinggi untuk melakukan verifikasi dan validasi laporan perkembangan studi penerima Beasiswa Unggulan - Memberikan catatan pada akun beasiswa Unggulan pada sistem pelaporan perkembangan studi apabila terjadi kendala gagal upload, salah upload data dan sebagainya

F . SK 5.0 Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

- IKK 5.1 Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB

Progress / Kegiatan :

Dalam mendukung target capaian, kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah dengan melakukan evaluasi triwulanan serta melengkapi data dukung seperti dokumentasi, daftar hadir, notulensi, surat undangan, dan dokumen lainnya berkaitan dengan proses pelaksanaan triwulanan.

Kendala / Permasalahan :

Terdapat beberapa kebutuhan SAKIP yang belum bisa dilampirkan karena berkaitan dengan pihak luar, misalkan SKP Pegawai yang masih belum dilampirkan karena terjadi keterlambatan penyelesaian sistem oleh unit yang menangani SKP tersebut

Strategi / Tindak Lanjut :

Membuat SKP Pegawai di format microsoft excel sambil menunggu penyelesaian sistem SKP Pegawai secara online

G . SK 5.0 Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

- IKK 5.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85

Progress / Kegiatan :

Untuk menjaga Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang merupakan gabungan dari nilai EKA dan IKPA, selama TW 1 dan 2 indikator yang mendapat nilai cukup rendah adalah indikator deviasi halaman III DIPA. Sehingga setiap bulan dilaksanakan pemantauan terhadap Rencana dan Realisasi SP2D sesuai jenis belanja di masing-masing pokja

Kendala / Permasalahan :

Realisasi SP2D sangat bergantung erat dengan pihak luar, sehingga cukup kesulitan untuk memastikan serapan sesuai dengan rencana. Misalkan belanja bantuan bansos KIP Kuliah yang tidak sesuai rencana karena terdapat beberapa perguruan tinggi swasta yang ditutup oleh Ditjen Diktiristek, sehingga mahasiswa yang menerima KIP Kuliah di perguruan tinggi swasta tersebut belum bisa disalurkan dan diproses kemudian.

Strategi / Tindak Lanjut :

Mencoba melakukan revisi RPD halaman III DIPA untuk Triwulan III (Juli - September) dan memperbaiki RPD untuk TW 1 dan 2 supaya mendapat nilai konsistensi yang lebih baik

3. REKOMENDASI PIMPINAN

Anggaran yang di blokir, segera koordinasikan untuk dibuka, karena sudah memasuki semester 2 TA 2023. Upayakan seluruh RO tercapai minimal 100%, akan lebih baik jika mampu lebih dari 100% akan tetapi untuk bantuan yang menjadi on going (KIP Kuliah, Beasiswa Unggulan, ADIK) pastikan ketersediaan anggaran di tahun 2024. Mohon untuk selalu memperhatikan rencana penyerapan anggaran yang sudah tertera di Halaman III DIPA, karena itu sangat penting untuk mendapatkan NKA yang lebih baik. Jika di TW 3 akan ada perbaikan di RPD, segera lakukan revisi DIPA sebelum batas akhir perbaikan RPD TW 3 (14 Juli 2023). Jika TU membutuhkan data/penjelasan mohon untuk dipenuhi, karena berkaitan dengan pihak luar.

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan II tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Jakarta, 17 Juli 2023

Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan



Abdul Kahar



**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN III
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
TAHUN 2023**

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN s.d Bulan Oktober Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[SK 1.0] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar	[IKK 1.1] Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang memperoleh PIP	Orang	10360614	TW3 : 5303401	TW3 : 5471416
2	[SK 1.0] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar	[IKK 1.2] Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat yang memperoleh PIP	Orang	4369968	TW3 : 3669262	TW3 : 3020557
3	[SK 2.0] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat menengah	[IKK 2.1] Jumlah siswa SMA/SMK/SMLB/Sederajat yang memperoleh PIP	Orang	3197410	TW3 : 2208459	TW3 : 2073435
4	[SK 3.0] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional	[IKK 3.1] Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang memperoleh tunjangan/bantuan	Orang	343118	TW3 : 341508	TW3 : 277183
5	[SK 4.0] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi	[IKK 4.1] Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi	Orang	816271	TW3 : 701972	TW3 : 674758
6	[SK 5.0] Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	[IKK 5.1] Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB	predikat	A	TW3 : -	TW3 : -
6	[SK 5.0] Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	[IKK 5.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85	nilai	88	TW3 : 0	TW3 : 0

2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III

a). PENYERAPAN ANGGARAN

Pagu Anggaran sebesar **Rp.29.522.692.495.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 31 Oktober 2023 sebesar **Rp. 21.516.824.556.475** atau **72.88%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 31 Oktober 2023 **Rp. 8.005.867.938.525**

b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN

A . SK 1.0 Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar

- IKK 1.1 Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang memperoleh PIP

Progress / Kegiatan :

a. Progres Capaian : Total sudah tersalurkan sebanyak 5.471.416 orang dari mulai Januari s.d September, sementara total untuk penyaluran TW 3 sebanyak 580.016 orang dengan rincian: 1. Penetapan SK pemberian di bulan Juli terhadap 108.755 peserta didik SD/Paket A dengan Nilai Rp43.536.825.000,- 2. Penetapan SK pemberian di bulan Agustus terhadap 274.703 peserta didik SD/Paket A dengan Nilai Rp119.223.900.000,- 3. Penetapan SK pemberian di bulan September terhadap 196.688 peserta didik SD/Paket A dengan Nilai Rp88.509.375.000- b. Kegiatan yang sudah dilakukan: 1. Sinkronisasi data laporan aktivasi rekening dari bank penyalur periode bulan Juni, Juli dan Agustus 2. Penetapan SK Pemberian bagi peserta didik SD/Paket A yang telah melakukan aktivasi rekening SimPel dengan cut off aktivasi periode 30 Juni, 31 Juli, 31 Agustus 2023.

Kendala / Permasalahan :

1. Masih Banyak Sekolah Dasar dan Lembaga Paket A belum melakukan pemutahiran dan Sinkronisasi Dapodik 2. Masih terdapat data anomali pada Dapodik diantaranya : a. NIK Invalid b. NIK digunakan beberapa Peserta Didik c. NIK Tidak Valid Dukcapil d. NISN Invalid e. NISN ganda pada Dapodik f. PDID ganda pada Dapodik g. Inkonsistensi Kelayakan PIP 3. Perubahan pada DTKS : a. DTKS tidak memiliki Desil b. DTKS tidak hanya berisi keluarga miskin dan rentan miskin 4. Masih terdapat banyak peserta didik dari keluarga miskin, rentan miskin yang tidak memiliki NIK. 5. Munculnya Issue storage Server PIP Penuh dan adanya troubleshooting ketika koneksi dengan PDN

Strategi / Tindak Lanjut :

- Berkoordinasi dengan Pusdatin, Setditjen PAUD Dikdas Dikmen dan Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota dalam melakukan sosialisasi

pemutahiran data dan sinkronisasi Dapodik Sekolah, serta kewajiban peserta didik memiliki NIK Valid Dukcapil. - Melakukan cleansing data Dapodik untuk proses pengusulan. - Melakukan hold data terhadap data anomali agar tidak bisa dipilih pada aplikasi pengusulan sehingga tidak bisa diusulkan. - Berkoordinasi dengan Pusdatin dan Setditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen terkait data anomali pada Dapodik, untuk melakukan langkah-langkah perbaikan data peserta didik pada Dapodik. - Berkoordinasi dengan Pusdatin untuk setting dan konfigurasi Switch Infra Server Puslapdik.

B . SK 1.0 Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar

- IKK 1.2 Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat yang memperoleh PIP

Progress / Kegiatan :

a. Progres Capaian : Total sudah tersalurkan sebanyak 3.020.557 orang dari mulai Januari s.d September, sementara total untuk penyaluran TW 3 sebanyak 261.588 orang dengan rincian: 1. Penetapan SK pemberian di bulan Juli terhadap 47.998 peserta didik SMP/Paket B dengan Nilai Rp26.648.250.000,- 2. Penetapan SK pemberian di bulan Agustus terhadap 136.157 peserta didik SMP/Paket B dengan Nilai Rp96.406.125.000,- 3. Penetapan SK pemberian di bulan September terhadap 77.433 peserta didik SMP/Paket B dengan Nilai Rp58.074.750.000- b. Kegiatan yang sudah dilakukan: 1. Sinkronisasi data laporan aktivasi rekening dari bank penyalur periode bulan Juni, Juli dan Agustus 2. Penetapan SK Pemberian bagi peserta didik SMP/Paket B yang telah melakukan aktivasi rekening SimPel dengan cut off aktivasi periode 30 Juni, 31 Juli, 31 Agustus 2023.

Kendala / Permasalahan :

1. Masih Banyak Sekolah Menengah Pertama dan Lembaga Paket B belum melakukan pemutahiran dan Sinkronisasi Dapodik 2. Masih terdapat data anomali pada Dapodik diantaranya : a. NIK Invalid b. NIK digunakan beberapa Peserta Didik c. NIK Tidak Valid Dukcapil d. NISN Invalid e. NISN ganda pada Dapodik f. PDID ganda pada Dapodik g. Inkonsistensi Kelayakan PIP 3. Perubahan pada DTKS : a. DTKS tidak memiliki Desil b. DTKS tidak hanya berisi keluarga miskin dan rentan miskin 4. Masih terdapat banyak peserta didik dari keluarga miskin, rentan miskin yang tidak memiliki NIK. 5. Munculnya Issue storage Server PIP Penuh dan adanya troubleshooting ketika koneksi dengan PDN

Strategi / Tindak Lanjut :

- Berkoordinasi dengan Pusdatin, Setditjen PAUD Dikdas Dikmen dan Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota dalam melakukan sosialisasi pemutahiran data dan sinkronisasi Dapodik Sekolah, serta kewajiban peserta didik memiliki NIK Valid Dukcapil. - Melakukan cleansing data Dapodik untuk proses pengusulan. - Melakukan hold data terhadap data anomali agar tidak bisa dipilih pada aplikasi pengusulan sehingga tidak bisa diusulkan. - Berkoordinasi dengan Pusdatin dan Setditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen terkait data anomali pada Dapodik, untuk melakukan langkah-langkah perbaikan data peserta didik pada Dapodik - Berkoordinasi dengan Pusdatin untuk setting dan konfigurasi Switch Infra Server Puslapdik.

C . SK 2.0 Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat menengah

- IKK 2.1 Jumlah siswa SMA/SMK/SMLB/Sederajat yang memperoleh PIP

Progress / Kegiatan :

a. Progres Capaian : Total capaian program bantuan yang mendukung IKK ini dari mulai Januari s.d September sebanyak 2.073.435 orang, sementara capaian di TW 3 sebanyak 565.959 orang. b. Kegiatan yang sudah dilakukan: Program Indonesia Pintar (PIP): 1. Sinkronisasi data laporan aktivasi rekening dari bank penyalur periode bulan Juni, Juli dan Agustus 2. Penetapan SK Pemberian bagi peserta didik SMK yang telah melakukan aktivasi rekening SimPel dengan cut off aktivasi periode 30 Juni, 31 Juli, 31 Agustus 2023. Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM): 1. Dilaksanakan kegiatan penjemputan Siswa Baru ADEM Wil. Papua 2. Dilaksanakan kegiatan Wawasan Kebangsaan untuk Siswa Baru ADEM Papua dan Daerah Khusus.

Kendala / Permasalahan :

Program Indonesia Pintar (PIP): 1. Masih Banyak Sekolah Menengah Kejuruan belum melakukan pemutahiran dan Sinkronisasi Dapodik 2. Masih terdapat data anomali pada Dapodik diantaranya : a. NIK Invalid b. NIK digunakan beberapa Peserta Didik c. NIK Tidak Valid Dukcapil d. NISN Invalid e. NISN ganda pada Dapodik f. PDID ganda pada Dapodik g. Inkonsistensi Kelayakan PIP 3. Perubahan pada DTKS : a. DTKS tidak memiliki Desil b. DTKS tidak hanya berisi keluarga miskin dan rentan miskin 4. Masih terdapat banyak peserta didik dari keluarga miskin, rentan miskin yang tidak memiliki NIK. 5. Munculnya Issue storage Server PIP Penuh dan adanya troubleshooting ketika koneksi dengan PDN Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM): Masih terdapat calon penerima ADEM Wilayah Papua yang mengundurkan diri secara tiba-tiba sesaat sebelum keberangkatan ke Provinsi tujuan, sehingga tidak memungkinkan untuk mengganti siswa yang mundur tersebut.

Strategi / Tindak Lanjut :

Program Indonesia Pintar (PIP): - Berkoordinasi dengan Pusdatin, Setditjen PAUD Dikdas Dikmen dan Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota dalam melakukan sosialisasi pemutahiran data dan sinkronisasi Dapodik Sekolah, serta kewajiban peserta didik memiliki NIK Valid Dukcapil. - Melakukan cleansing data Dapodik untuk proses pengusulan. - Melakukan hold data terhadap data anomali agar tidak bisa dipilih pada aplikasi pengusulan sehingga tidak bisa diusulkan. - Berkoordinasi dengan Pusdatin dan Setditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen terkait data anomali pada Dapodik, untuk melakukan langkah-langkah perbaikan data peserta didik pada Dapodik - Berkoordinasi dengan Pusdatin untuk setting dan konfigurasi Switch Infra Server Puslapdik. Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM): Meminta Dinas Pendidikan Kab/Kota/Provinsi untuk memastikan bahwa dalam masa yang akan datang, siswa yang diajukan sebagai Calon Penerima Beasiswa ADEM tersebut benar-benar mempunyai keinginan yang kuat untuk melanjutkan pendidikan jenjang menengah diluar pulau Papua, sehingga meminimalisir adanya siswa yang mengundurkan diri sesaat sebelum keberangkatan.

D . SK 3.0 Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional

- IKK 3.1 Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang memperoleh tunjangan/bantuan

Progress / Kegiatan :

a. Progres Capaian: saat ini sedang membayarkan untuk Triwulan ke 3 untuk TPG dan TKG, sementara untuk insentif masih dalam tahap verifikasi dan validasi data, karena hanya disalurkan 1 kali dalam 1 tahun. Dalam mendukung IKK ini sudah tersalurkan sebanyak 277.183 orang. b. Kegiatan yang sudah dilakukan: 1. Verifikasi dan Validasi Data 2. Penerbitan SK pemberian tunjangan (TPG, TKG, Insentif) 3. Pembayaran Triwulan ke 3 untuk TPG dan TKG

Kendala / Permasalahan :

Dinas terlambat mengajukan status siap usul di aplikasi Dapodik

Strategi / Tindak Lanjut :

Menghubungi dinas agar cepat mengusulkan data guru di DAPODIK

E . SK 4.0 Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi

- IKK 4.1 Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi

Progress / Kegiatan :

a. Progres Capaian : Total capaian program bantuan yang mendukung IKK ini dari mulai Januari s.d September sebanyak 674.758 orang, sementara capaian di TW 3 sebanyak 1.936 orang. b. Kegiatan yang sudah dilakukan: KIP Kuliah: 1. Telaah Revisi Persesjen Juklak KIP Kuliah Merdeka Tahun 2023 2. Supervisi Program KIP Kuliah Merdeka Tahun 2023 3. Sosialisasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Merdeka Tahun 2023 Purwakarta 4. Sosialisasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Merdeka Tahun 2023 Kendari 5. Sosialisasi KIP Kuliah Merdeka Tahun 2023 bagi Pemangku Kepentingan (Komisi X DPR RI) 6. Sosialisasi Bantuan Biaya Pendidikan Tahun 2023 7. Sosialisasi KIP Kuliah Merdeka Tahun 2023 bagi Pemangku Kepentingan (DPD RI) 8. Bimbingan Teknis Pengelolaan Program KIP Kuliah Tahun 2023 (PTN Wilayah Barat) 9. Koordinasi Pengadaan Layanan Keuangan Digital untuk Uji Coba Penyaluran KIP Kuliah Merdeka Tahun 2023 10. Koordinasi Penyelenggara Layanan Keuangan Digital terkait Uji Coba Pelaksanaan Penyaluran KIP Kuliah Merdeka Tahun 2023 11. Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terkait KIP Kuliah Merdeka Tahun 2022 12. Bimbingan Teknis Pengelolaan KIP Kuliah Merdeka Tahun 2023 untuk LLDikti, PTN Wilayah Tengah, dan PTN Wilayah Timur 13. Verifikasi dan Validasi Data Pencairan KIP Kuliah Merdeka On Going Semester Ganjil Tahun 2023 14. Analisis Data Tracer Alumni KIP Kuliah Merdeka/Bidikmisi Tahun 2023 15. Rekonsiliasi Data Realisasi Pencairan Bantuan Bulan Agustus pada Pokja Beasiswa Pendidikan Tinggi 16. Verifikasi dan Validasi Data Pencairan KIP Kuliah Merdeka On Going Semester Gasal Tahun 2023 Tahap II. 17. Koordinasi dan Penyusunan Perjanjian Kerja Sama dengan Lembaga Keuangan Digital pada Uji Coba Layanan Keuangan Digital Bantuan Sosial KIP Kuliah Tahun 2023. 18. Pembahasan PKS Penyaluran KIP Kuliah melalui Fintech dengan LinkAja 19. Pembahasan Revisi Akhir Persesjen KIP Kuliah Tahun 2023 20. Koordinasi Pendampingan Pengelolaan Program KIP Kuliah kepada PTS dan PTN Penyelenggara KIP Kuliah 21. Pendampingan Pengelolaan KIP Kuliah Merdeka Tahun 2023 ke 16 LLDIKTI Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik): Sudah dilaksanakan seleksi dan koordinasi dengan Perguruan Tinggi Penyelenggara ADIK. Beasiswa Unggulan: 1. Supervisi Mahasiswa BU 2. Persiapan Penyelenggaraan Kick-off Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM berat di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh 3. Pelaksanaan Beasiswa Unggulan Penghargaan KRI Nanggala 402 Tahun 2023 4. Kick Off Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM berat 5. Pengembangan Sistem Tahun 2023 6. Finalisasi Panduan Pendaftaran dan Seleksi BU Tahun 2023 7. Penyusunan SK KPA tentang Standar Biaya Beasiswa Unggulan Tahun Anggaran 2023 8. Reviu dan Revisi Persesjen Nomor 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beasiswa Unggulan 9. Validasi data Korban/Anak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Aceh. 9. Finalisasi Revisi Persesjen Nomor 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beasiswa Unggulan 10. Pembahasan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai Bank Penyalur Beasiswa Unggulan. 11. Pembahasan Rancangan Kontrak Beasiswa Unggulan Masyarakat Berprestasi dan Pegawai Kemendikbudristek Tahun 2023. 12. Seleksi Tahap I Pendaftar Program Beasiswa Unggulan Tahun 2023 13. Seleksi Tahap I Pendaftar Program Beasiswa Unggulan Tahun 2023 Sesi II. 14. Persiapan Seleksi Tahap II dan Penyamaan Persepsi Fasilitator Beasiswa Unggulan Tahun 2023 15. Seleksi Tahap II Calon Penerima Beasiswa Unggulan Tahun 2023 Batch I 16. Seleksi Tahap II Calon Penerima Beasiswa Unggulan Tahun 2023 Batch II 17. Seleksi Tahap II Calon Penerima Beasiswa Unggulan Tahun 2023 Batch III 18. Seleksi Tahap II Calon Penerima Beasiswa Unggulan Tahun 2023 Batch IV 19. Finalisasi Kontrak Beasiswa Unggulan Tahun 2023 dan Pembahasan Rancangan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Perguruan Tinggi guna Penyaluran Biaya Pendidikan Beasiswa Unggulan Tahun 2023 20. Seleksi Beasiswa Unggulan Non Degree Tahun 2023 21. Verifikasi Data Rekening dan Biaya Pendidikan Penerima Beasiswa Unggulan Tahun 2023 Guna Persiapan Kontrak Batch I 22. Tindak Lanjut Mahasiswa Penerima Beasiswa Unggulan Belum Laporan

Kendala / Permasalahan :

KIP Kuliah: Terhambatnya pencairan Mahasiswa Baru KIP Kuliah pada semester Gasal 2023 karena: 1. Perguruan Tinggi perlu membuat kertas kerja perhitungan rata-rata Biaya Pendidikan sebelum melakukan penetapan mahasiswa penerima KIP Kuliah sesuai dengan regulasi 2. Adanya persyaratan baru dimana Mahasiswa Penerima KIP Kuliah harus terdata di PDDikti sebelum mengajukan pencairan, dan masih banyak Perguruan Tinggi yang belum melakukan pendataan mahasiswanya di PDDikti 3. Tidak terakreditasinya program studi pada Perguruan Tinggi dikarenakan masa akreditasi sudah kadaluarsa, masih dalam proses re-akreditasi, merupakan prodi baru, dan prodi upgrading, sehingga Perguruan Tinggi tidak dapat menetapkan mahasiswa penerima KIP Kuliah di prodi tersebut 4. Ada beberapa Perguruan Tinggi Swasta yang merger, berubah bentuk, dan ditutup sehingga masih membutuhkan waktu untuk proses migrasi . Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik): Masih banyak Perguruan Tinggi yang belum mengajukan proses pencairan untuk Mahasiswa Baru, sehingga masih banyak Mahasiswa yang belum dicairkan. Beasiswa Unggulan: 1. Mahasiswa belum melaporkan perkembangan studi/akademik 2. Beberapa mahasiswa masih belum memahami kesalahan penguploadan laporan perkembangan studi/akademik pada sistem pelaporan 3. Tim verval pusat perlu memverval ulang karena data yang di upload mahasiswa masih salah 4. Tim verval perguruan tinggi agak lambat dalam melakukan verifikasi dan validasi laporan perkembangan studi pada sistem pelaporan 5. Tim beasiswa unggulan masih mengerjakan data kontrak calon penerima Beasiswa Unggulan sebagai penanggung jawab/pic sejumlah lebih dari 2000 kontrak sehingga pada saat yang sama harus mengerjakan pekerjaan yang lainnya. 6. Tim verval perguruan tinggi belum memahami cara memvalidasi laporan perkembangan studi 7. Tim verval perguruan tinggi tidak mengetahui user dan password untuk mengakses sistem pelaporan beasiswa unggulan

Strategi / Tindak Lanjut :

KIP Kuliah: 1. Melaksanakan pendampingan perhitungan rata-rata Biaya Pendidikan kepada seluruh PTN dan LLDIKTI penerima KIP Kuliah 2. Meningkatkan koordinasi bersama dengan PDDikti untuk percepatan pencairan dan pemadanan data mahasiswa penerima KIP Kuliah di PDDIKTI 3. Melibatkan operator PDDIKTI Perguruan Tinggi dan LLDIKTI untuk memprioritaskan pelaporan mahasiswa penerima KIP

Kuliah di PDDIKTI 4. Melakukan pendampingan khusus bagi Perguruan Tinggi yang belum mengusulkan pencairan 5. Menghimbau Perguruan Tinggi untuk lebih memperhatikan masa kadaluarsa akreditasi tiap program studinya dan segera melakukan re-akreditasi sebelum masa berlaku akreditasi habis 6. Menghimbau Perguruan Tinggi berkoordinasi dengan BAN-PT atau LAM untuk mempercepat keluarnya akreditasi baru 7. Menyarankan kepada Perguruan Tinggi untuk mengalihkan kuota penerima KIP Kuliah di prodi yang tidak terakreditasi ke prodi lain yang sudah terakreditasi 8. Terus berkoordinasi dengan Perguruan Tinggi dan LLDIKTI yang merger, berubah bentuk, dan ditutup untuk mempercepat proses migrasi Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik): Melakukan koordinasi dengan PT penyelenggara dan menginstruksikan untuk segera mengajukan proses pencairan, dan memberikan batas waktu maksimal pengajuan pencairan. Beasiswa Unggulan: 1. Melaksanakan monitoring ke perguruan tinggi terpilih dan mengundang mahasiswa yang belum melakukan pelaporan pada sistem aplikasi pelaporan 2. Memberikan catatan perbaikan data pelaporan yang di upload oleh mahasiswa agar penyaluran tahap selanjutnya dapat diproses 3. Memberikan informasi kepada pengelola beasiswa di perguruan tinggi melalui whatsapp/telepon gara memverval penerima beasiswa unggulan yang sudah melaporkan perkembangan studi pada sistem pelaporan 4. Menghubungi pengelola diperguruan tinggi terkait user dan password untuk dapat mengakses sistem pelaporan beasiswa unggulan.

F . SK 5.0 Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

- IKK 5.1 Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB

Progress / Kegiatan :

IKK ini ditargetkan di akhir tahun. Kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung tercapainya IKK ini adalah sudah dilakukannya evaluasi mandiri untuk melengkapi kelengkapan data dalam mendukung evaluasi AKIP.

Kendala / Permasalahan :

Pada saat proses penilaian evaluasi AKIP, tidak diperkenankan dengan tim evaluasi, sehingga tidak ada kesempatan untuk menjelaskan

Strategi / Tindak Lanjut :

Melengkapai setiap dokumen dan data dukung evaluasi AKIP sesuai Lembar Kerja Evaluasi

G . SK 5.0 Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

- IKK 5.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85

Progress / Kegiatan :

Melakukan monitoring nilai EKA dan IKPA secara berkala. Melakukan revisi RPD Halaman 3 DIPA secara berkala sesuai periode revisi. Melakukan revisi lainnya untuk bisa meningkatkan nilai kinerja anggaran, seperti revisi pengembalian anggaran PIP jenjang SD, dan penambahan sasaran KIP Kuliah.

Kendala / Permasalahan :

Terdapat beberapa RO yang kemungkinan tidak dapat dicapai 100%. Sehingga kemungkinan nilai indikator capaian output akan rendah dan mengakibatkan nilai kinerja anggaran menjadi kecil.

Strategi / Tindak Lanjut :

Mengusulkan revisi untuk pergeseran sasaran dan anggaran, sesuai dengan potensi sasaran yang ada sesuai data. Sehingga capaian output bisa tercapai 100%.

3. REKOMENDASI PIMPINAN

1. Pastikan serapan anggaran bisa maksimal dengan tetap menjaga kualitas pelaksanaan program dan anggaran.
2. Pastikan seluruh RO dapat tercapai dengan baik, jika ada potensi tidak tercapai, segera usulkan untuk revisi target dengan penjelasan yang tepat.
3. RPD untuk TW 4 yang sudah dilakukan revisi harap pastikan realisasi sesuai RPD yang di usulkan.
4. Pastikan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dapat tercapai
5. Lakukan revisi Perjanjian Kinerja di akhir tahun 2023 karena terdapat perubahan angggaran di tahun 2023.

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan III tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Jakarta, 31 Oktober 2023

Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan



Abdul Kahar



**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN IV
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
TAHUN 2023**

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN s.d Bulan Desember Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[SK 1.0] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar	[IKK 1.1] Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang memperoleh PIP	Orang	10360614	TW4 : 10360614	TW4 : 10386997
2	[SK 1.0] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar	[IKK 1.2] Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat yang memperoleh PIP	Orang	4369968	TW4 : 4369968	TW4 : 4471118
3	[SK 2.0] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat menengah	[IKK 2.1] Jumlah siswa SMA/SMK/SMLB/Sederajat yang memperoleh PIP	Orang	3197410	TW4 : 3197410	TW4 : 3255247
4	[SK 3.0] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional	[IKK 3.1] Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang memperoleh tunjangan/bantuan	Orang	343118	TW4 : 343118	TW4 : 348873
5	[SK 4.0] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi	[IKK 4.1] Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi	Orang	816271	TW4 : 816271	TW4 : 929950
6	[SK 5.0] Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	[IKK 5.1] Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB	predikat	A	TW4 : A	TW4 : A
6	[SK 5.0] Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	[IKK 5.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85	nilai	88	TW4 : 88	TW4 : 93,29

2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV

a). PENYERAPAN ANGGARAN

Pagu Anggaran sebesar **Rp.29.521.692.495.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 17 Januari 2024 sebesar **Rp. 29.286.975.584.688** atau **99,2%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 17 Januari 2024 **Rp. 234.716.910.312**

b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN

A . SK 1.0 Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar

- IKK 1.1 Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang memperoleh PIP

Progress / Kegiatan :

IKK ini di dukung dengan penyaluran bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Jenjang SD/Paket A/ sederajat. Sampai dengan TW 4 sudah tersalurkan sebanyak 10.386.997 orang siswa atau dapat mencapai 100,25% dari target tahun 2023.

a. Progres Capaian :

Telah tersalurkannya dana PIP sebesar 4.212.276.300.000,- kepada 10.386.997 peserta didik Sekolah Dasar dan Paket A.

b. Kegiatan yang sudah dilakukan:

1. Sinkronisasi data laporan aktivasi rekening dari bank penyalur periode bulan November 2023.
2. Penetapan SK Pemberian Relaksasi bagi peserta didik SD/Paket A.
3. Melakukan Proses Percepatan Aktivasi Rekening bagi peserta didik penerima PIP yang belum melakukan aktivasi rekening di Bank Penyalur.
4. Berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Kemdikbudristek yaitu BBPMP, BBGP, BPMP. dan BGP untuk mendorong percepatan aktivasi rekening penerima PIP.
5. Melibatkan Kepala Sekolah dan Guru Penggerak dalam pelaksanaan Percepatan Aktivasi Rekening

Kendala / Permasalahan :

1. Masih terdapat Sekolah/Lembaga yang belum melakukan sinkronisasi data peserta didik Tahun Pelajaran 2023/2024 pada DAPODIK

s.d 31 Agustus 2023

2. Masih terdapat data anomali (residu) pada Dapodik diantaranya :

a. NIK Invalid

b. NISN Invalid

c. Inkonsistensi Kelayakan PIP hal ini disebabkan masih terdapatnya satuan pendidikan yang belum memperbaiki data peserta didik residu pada DAPODIK Satuan Pendidikan

3. Perubahan pada DTKS :

a. DTKS tidak memiliki Desil

b. DTKS tidak hanya berisi keluarga miskin dan rentan miskin

4. Terbatasnya Layanan Bank Penyalur di berbagai daerah

5. Menumpuknya antrian di Bank Penyalur karena berbarengan dengan penyaluran Bantuan sosial lainnya.

Strategi / Tindak Lanjut :

- Berkoordinasi dengan Pusdatin, Setditjen PAUD Dikdas Dikmen dan Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota dalam melakukan sosialisasi pemutakhiran data dan sinkronisasi Dapodik Sekolah, serta kewajiban peserta didik memiliki NIK Valid Dukcapil.

- Melakukan cleansing data Dapodik untuk proses pengusulan.

- Melakukan hold data terhadap data anomali agar tidak bisa dipilih pada aplikasi pengusulan sehingga tidak bisa diusulkan.

- Berkoordinasi dengan Pusdatin dan Setditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen terkait data anomali pada Dapodik, untuk melakukan langkah-langkah perbaikan data peserta didik pada Dapodik.

- Menyediakan informasi data anomali bagi dinas pendidikan dan satuan pendidikan pada aplikasi SiPintar agar satuan Pendidikan bisa segera memperbaiki data anomali (residu) pada DAPODIK Satuan Pendidikan agar peserta didik dari keluarga tidak mampu bisa diusulkan oleh dinas pendidikan pada periode pengusulan berikutnya.

- Berkoordinasi dengan Bank Penyalur guna melakukan percepatan PIP di berbagai daerah, serta meminta bank penyalur untuk memberikan layanan ekstra di hari sabtu.

B . SK 1.0 Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar

- IKK 1.2 Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat yang memperoleh PIP

Progress / Kegiatan :

IKK ini di dukung dengan penyaluran bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Jenjang SMP/Paket B/ sederajat. Sampai dengan TW 4 sudah tersalurkan sebanyak 4.471.118 orang siswa atau dapat mencapai 102,31% dari target tahun 2023.

a. Progres Capaian :

Telah tersalurkannya dana PIP sebesar 2.711.107.500.000,- kepada 4.471.118 peserta didik Sekolah Menengah Pertama dan Paket B

b. Kegiatan yang sudah dilakukan:

1. Sinkronisasi data laporan aktivasi rekening dari bank penyalur periode bulan November 2023.

2. Penetapan SK Pemberian Relaksasi bagi peserta didik SMP/Paket B.

3. Melakukan Proses Percepatan Aktivasi Rekening bagi peserta didik penerima PIP yang belum melakukan aktivasi rekening di Bank Penyalur.

4. Berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Kemdikbudristek yaitu BBPMP, BBGP, BPMP. dan BGP untuk mendorong percepatan aktivasi rekening penerima PIP.

5. Melibatkan Kepala Sekolah dan Guru Penggerak dalam pelaksanaan Percepatan Aktivasi Rekening.

Kendala / Permasalahan :

1. Masih terdapat Sekolah/Lembaga yang belum melakukan sinkronisasi data peserta didik Tahun Pelajaran 2023/2024 pada DAPODIK s.d 31 Agustus 2023.

2. Masih terdapat data anomali (residu) pada Dapodik diantaranya :

a. NIK Invalid b. NISN Invalid c. Inkonsistensi Kelayakan PIP hal ini disebabkan masih terdapatnya satuan pendidikan yang belum memperbaiki data peserta didik residu pada DAPODIK Satuan Pendidikan.

3. Perubahan pada DTKS :

a. DTKS tidak memiliki Desil

b. DTKS tidak hanya berisi keluarga miskin dan rentan miskin

4. Terbatasnya Layanan Bank Penyalur di berbagai daerah

5. Menumpuknya antrian di Bank Penyalur karena berbarengan dengan penyaluran Bantuan sosial lainnya.

Strategi / Tindak Lanjut :

- Berkoordinasi dengan Pusdatin, Setditjen PAUD Dikdas Dikmen dan Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota dalam melakukan sosialisasi pemutakhiran data dan sinkronisasi Dapodik Sekolah, serta kewajiban peserta didik memiliki NIK Valid Dukcapil.

- Melakukan cleansing data Dapodik untuk proses pengusulan.

- Melakukan hold data terhadap data anomali agar tidak bisa dipilih pada aplikasi pengusulan sehingga tidak bisa diusulkan.

- Berkoordinasi dengan Pusdatin dan Setditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen terkait data anomali pada Dapodik, untuk melakukan langkah-langkah perbaikan data peserta didik pada Dapodik.

- Menyediakan informasi data anomali bagi dinas pendidikan dan satuan pendidikan pada aplikasi SiPintar agar satuan Pendidikan bisa segera memperbaiki data anomali (residu) pada DAPODIK Satuan Pendidikan agar peserta didik dari keluarga tidak mampu bisa diusulkan oleh dinas pendidikan pada periode pengusulan berikutnya.

- Berkoordinasi dengan Bank Penyalur guna melakukan percepatan PIP di berbagai daerah, serta meminta bank penyalur untuk memberikan layanan ekstra di hari sabtu.

C . SK 2.0 Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat menengah

- IKK 2.1 Jumlah siswa SMA/SMK/SMLB/Sederajat yang memperoleh PIP

Progress / Kegiatan :

IKK ini di dukung dengan penyaluran bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Jenjang SMA/SMK/SMLB/Paket C/ sederajat dan program



bantuan Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM). Sampai dengan TW 4 sudah tersalurkan sebanyak 3.255.248 orang siswa atau dapat mencapai 101,81% dari target tahun 2023

a. Progres Capaian :

- Telah tersalurkan dana PIP kepada 1.390.682 peserta didik Sekolah Menengah Atas dan Paket C
- Telah tersalurkan dana PIP kepada 1.860.322 peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan
- Telah tersalurkan dana ADEM kepada 4.244 peserta didik jenjang Sekolah Menengah.

b. Kegiatan yang sudah dilakukan:

1. Sinkronisasi data laporan aktivasi rekening dari bank penyalur periode bulan November 2023.
2. Penetapan SK Pemberian Relaksasi PIP.
3. Melakukan Proses Percepatan Aktivasi Rekening bagi peserta didik penerima PIP yang belum melakukan aktivasi rekening di Bank Penyalur.
4. Berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Kemdikbudristek yaitu BBPMP, BBGP, BPMP. dan BGP untuk mendorong percepatan aktivasi rekening penerima PIP.
5. Melibatkan Kepala Sekolah dan Guru Penggerak dalam pelaksanaan Percepatan Aktivasi Rekening
6. Sudah terlaksana kegiatan Tes Potensi Akademik, kegiatan Pendampingan dan Pengembangan Minat dan Bakat Siswa ADEM.

Kendala / Permasalahan :

1. Masih terdapat Sekolah/Lembaga yang belum melakukan sinkronisasi data peserta didik Tahun Pelajaran 2023/2024 pada DAPODIK s.d 31 Agustus 2023
2. Masih terdapat data anomali (residu) pada Dapodik diantaranya :
 - a. NIK Invalid
 - b. NISN Invalid
 - c. Inkonsistensi Kelayakan PIP hal ini disebabkan masih terdapatnya satuan pendidikan yang belum memperbaiki data peserta didik residu pada DAPODIK Satuan Pendidikan
3. Perubahan pada DTKS :
 - a. DTKS tidak memiliki Desil
 - b. DTKS tidak hanya berisi keluarga miskin dan rentan miskin
4. Terbatasnya Layanan Bank Penyalur di berbagai daerah
5. Menumpuknya antrian di Bank Penyalur karena berbarengan dengan penyaluran Bantuan sosial lainnya.
6. Ada satu sekolah yang tertinggal dalam mengajukan pencairan untuk dua orang siswa on going, sehingga bantuan yang diberikan belum tersalurkan. Setelah ditelusuri, ternyata dua siswa tersebut tidak diajukan oleh sekolah dari awal siswa tersebut ditetapkan sebagai penerima beasiswa ADEM.

Strategi / Tindak Lanjut :

- Berkoordinasi dengan Pusdatin, Setditjen PAUD Dikdas Dikmen dan Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota dalam melakukan sosialisasi pemutahiran data dan sinkronisasi Dapodik Sekolah, serta kewajiban peserta didik memiliki NIK Valid Dukcapil.
- Melakukan cleansing data Dapodik untuk proses pengusulan.
- Melakukan hold data terhadap data anomali agar tidak bisa dipilih pada aplikasi pengusulan sehingga tidak bisa diusulkan.
- Berkoordinasi dengan Pusdatin dan Setditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen terkait data anomali pada Dapodik, untuk melakukan langkah-langkah perbaikan data peserta didik pada Dapodik.
- Menyediakan informasi data anomali bagi dinas pendidikan dan satuan pendidikan pada aplikasi SiPintar agar satuan Pendidikan bisa segera memperbaiki data anomali (residu) pada DAPODIK Satuan Pendidikan agar peserta didik dari keluarga tidak mampu bisa diusulkan oleh dinas pendidikan pada periode pengusulan berikutnya.
- Berkoordinasi dengan Bank Penyalur guna melakukan percepatan PIP di berbagai daerah, serta meminta bank penyalur untuk memberikan layanan ekstra di hari sabtu.
- Melakukan koordinasi dengan Disdik Provinsi dan Sekolah untuk menerbitkan SK penerima bantuanADEM untuk dua orang siswa yang belum disalurkan bantuannya.

D . SK 3.0 Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional

- IKK 3.1 Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang memperoleh tunjangan/bantuan

Progress / Kegiatan :

IKK ini didukung dengan penyaluran aneka tunjangan yang terdiri dari Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Khusus Guru (TKG), dan insentif guru. Sampai dengan TW 4 total sudah tersalurkan aneka tunjangan kepada 347.440 orang guru atau sebesar 101,26% dari target tahun 2023. - Kegiatan yang sudah dilakukan:

1. Verifikasi Data Rekening Calon Penerima TPG
2. Penetapan SK
3. Berkoordinasi dengan Ditjen GTK, Bank Penyalur dan Dinas Pendidikan daerah.

Kendala / Permasalahan :

- Masih Terdapat selisih pembayaran yang dikarekanakan perpindahan status guru NonPNS menjadi guru dengan perjanjian kerja (PPPK) yang mulanya pembayaran dilakukan oleh pusat kemudian menjadi pembayaran di daerah.
- Data pada DAPODIK yang diterima masih belum sinkron dengan keadaan di daerah sehingga mengakibatkan data guru yang diterima tidak sesuai dengan daerah.

Strategi / Tindak Lanjut :

- Berkoordinasi dengan Setditjen GTK dan Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota dalam melakukan sosialisasi pemutahiran data dan sinkronisasi Dapodik Sekolah untuk pengisian TMB kdidata guru yang beralih status.
- Berkoordinasi dengan Setditjen GTK dan Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota dalam melakukan sosialisasi pemutahiran data dan sinkronisasi Dapodik Sekolah untuk pcalon penerima bantuan insentif

E . SK 4.0 Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi

- IKK 4.1 Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi

Progress / Kegiatan :

IKK ini didukung dengan program KIP Kuliah, Beasiswa Unggulan, dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik). Sampai dengan TW 4 seluruh program tersebut bisa menyalurkan bantuan kepada 929.950 orang. Rincian capaian masing-masing program adalah sebagai berikut:

1. KIP Kuliah sebanyak 916.827 orang mahasiswa,
2. ADIK sebanyak 7.614 orang mahasiswa, dan
3. Beasiswa Unggulan sebanyak 5.509 orang mahasiswa.

Kegiatan pada TW 4 dalam mendukung pencapaian ini adalah sebagai berikut:

1. Verifikasi dan validasi Data Usulan Pencairan Mahasiswa Baru Penerima KIP Kuliah Merdeka Semester Gasal Tahun 2023
 2. Rekonsiliasi dan Analisis Data Penelusuran Alumni KIP Kuliah Merdeka/Bidikmisi Tahun 2023
 3. Diskusi Kelompok Terpumpun terkait Hasil Tracer Study Alumni KIP Kuliah Merdeka/Bidikmisi Tahun 2023
 4. Sosialisasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Merdeka Tahun 2023 di Universitas Ichsan Gorontalo
 5. Percepatan Pencairan dan Pemadanan Data PDDIKTI bagi Mahasiswa Baru Penerima KIP Kuliah Tahun 2023 Regional I.
 6. Koordinasi Sosialisasi Uji Coba Penyaluran KIP Kuliah Merdeka melalui LKD bagi Mahasiswa Penerima KIP Kuliah sebagai Peserta Uji Coba Tahun 2023
 7. Percepatan Pencairan dan Pemadanan Data PDDIKTI bagi Mahasiswa Baru Penerima KIP Kuliah Tahun 2023 Regional II.
 8. Sosialisasi Uji Coba Penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Merdeka menggunakan Layanan Keuangan Digital Tahun 2023 di IPB dan UNJ
 9. Percepatan Pencairan Mahasiswa Baru Semester Gasal Tahun 2023 dan Pemadanan Data Mahasiswa Penerima KIP Kuliah dengan PDDikti Regional III
 10. Peliputan Mahasiswa Penerima KIP Kuliah Merdeka Tahun 2023
 11. Verifikasi dan Validasi Data Pencairan Mahasiswa Baru Penerima KIP Kuliah Merdeka Semester Gasal Tahun 2023 Tahap 2
 12. Verifikasi dan Validasi Data Pencarian Mahasiswa Baru Penerima KIP Kuliah Merdeka Peserta Uji Coba Penyaluran melalui LKD Semester Gasal Tahun 2023
 13. Koordinasi dan Sinkronisasi Data Penerima Beasiswa KIP Kuliah dengan Beasiswa Daerah dan Kemenag
 14. Tindak Lanjut Temuan BPK RI Tahun 2022 terkait Double Funding Beasiswa Pendidikan Tinggi
 15. Pembekalan Mahasiswa KIP Kuliah Merdeka Angkatan Tahun 2023
 16. Verifikasi dan Validasi Data Pencairan Mahasiswa Baru Penerima KIP Kuliah Merdeka Semester Gasal Tahun 2023 Tahap 2
 17. Verifikasi dan Validasi Data Pencairan Mahasiswa Baru Penerima KIP Kuliah Merdeka Semester Gasal Tahun 2023 Tahap 2
 18. Pembekalan Mahasiswa Penerima KIP Kuliah Merdeka Angkatan Tahun 2023 Reg 2
 19. Pembekalan Mahasiswa Penerima KIP Kuliah IPB dan UNJ Peserta Uji Coba Penyaluran Bansos KIPK Melalui LKD
 20. Diseminasi Tracer Study Alumni KIP Kuliah Tahun 2023 dan Verval Penyaluran akhir
 21. Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Program KIP Kuliah Merdeka Semester Gasal Tahun 2023 Gel 1
 22. Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran Beasiswa Pendidikan Tinggi
- dan Rencana Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Beasiswa Unggulan dengan Bank Himbara Tahun 2024.

Kendala / Permasalahan :

Kendala utama dalam pencapaian program ini adalah terhambatnya pencairan Mahasiswa Baru KIP Kuliah pada semester Gasal 2023, hal ini terjadi diantaranya karena:

1. Perguruan Tinggi perlu membuat kertas kerja perhitungan rata-rata Biaya Pendidikan sebelum melakukan penetapan mahasiswa penerima KIP Kuliah sesuai dengan regulasi
2. Adanya persyaratan baru dimana Mahasiswa Penerima KIP Kuliah harus terdata di PDDikti sebelum mengajukan pencairan, dan masih banyak Perguruan Tinggi yang belum melakukan pendataan mahasiswanya di PDDikti
3. Tidak terakreditasinya program studi pada Perguruan Tinggi dikarenakan masa akreditasi sudah kadaluarsa, masih dalam proses re-akreditasi, merupakan prodi baru, dan prodi upgrading, sehingga Perguruan Tinggi tidak dapat menetapkan mahasiswa penerima KIP Kuliah di prodi tersebut
4. Ada beberapa Perguruan Tinggi Swasta yang merger, berubah bentuk, dan ditutup sehingga masih membutuhkan waktu untuk proses migrasi
5. Terhambatnya pembuatan rekening secara terpusat oleh salah satu Bank Himbara
6. Calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan on Going dan pengganti belum terdata di DAPODIK

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Melaksanakan pendampingan perhitungan rata-rata Biaya Pendidikan kepada seluruh PTN dan LLDIKTI penerima KIP Kuliah
2. Meningkatkan koordinasi bersama dengan PDDikti untuk percepatan pencairan dan pemadanan data mahasiswa penerima KIP Kuliah di PDDIKTI
3. Melibatkan operator PDDIKTI Perguruan Tinggi dan LLDIKTI untuk memprioritaskan pelaporan mahasiswa penerima KIP Kuliah di PDDIKTI
4. Melakukan pendampingan khusus bagi Perguruan Tinggi yang belum mengusulkan pencairan
5. Menghimbau Perguruan Tinggi untuk lebih memperhatikan masa kadaluarsa akreditasi tiap program studinya dan segera melakukan re-akreditasi sebelum masa berlaku akreditasi habis
6. Menghimbau Perguruan Tinggi berkoordinasi dengan BAN-PT atau LAM untuk mempercepat keluarnya akreditasi baru
7. Menyarankan kepada Perguruan Tinggi untuk mengalihkan kuota penerima KIP Kuliah di prodi yang tidak terakreditasi ke prodi lain yang sudah terakreditasi
8. Terus berkoordinasi dengan Perguruan Tinggi dan LLDIKTI yang merger, berubah bentuk, dan ditutup untuk mempercepat proses migrasi
9. Membuat grup koordinasi antara Bank Himbara, Perguruan Tinggi yang dimonitor oleh Puslapdik untuk memantau update hasil pembuatan rekening
10. Menghimbau mahasiswa untuk melakukan verval lulusan secara mandiri dan berkoordinasi dengan Pusdatin untuk percepatan verval lulusan mahasiswa penerima KIP Kuliah

F . SK 5.0 Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

- IKK 5.1 Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB

Progress / Kegiatan :

Realisasi capaian IKK ini sudah memenuhi target yang tertuang dalam PK Kepala Puslapdik dengan Sekretaris Jenderal. Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Puslapdi pada tahun 2022 mendapat kategori A dengan nilai akuntabilitas kinerja sebesar 87,15. Nilai ini meningkat dari penilaian tahun sebelumnya, yang mendapatkan nilai 85,15.

Kendala / Permasalahan :

Masih terdapat beberapa catatan dalam Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Puslapdik Tahun 2023

Strategi / Tindak Lanjut :

Memenuhi catatan yang tertera di hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk peningkatan akuntabilitas di Puslapdik

G . SK 5.0 Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

- IKK 5.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85

Progress / Kegiatan :

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan gabungan dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dengan bobot 50% dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot 50%. Perubahan bobot penilaian ini tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 62 Tahun 2023. Dengan perubahan aturan ini, Puslapdik sedikit mendapatkan keuntungan, karena pada aturan sebelumnya, bobot EKA adalah sebesar 60% sedangkan IKPA 40%. Berdasarkan pengalaman tahun 2022, nilai EKA Puslapdik cukup rendah, dan sulit untuk di tingkatkan karena terdapat indikator efisiensi yang cukup sulit dicapai karena karakteristik Rincian Output (RO) di Puslapdik yang memberikan bantuan dengan harga satuan (unit cost) yang sudah ditetapkan.

NKA Puslapdik pada tahun 2023 mendapatkan nilai 93,29, dengan rincian sebagai berikut:

1. EKA = 89,96

2. IKPA = 96,62

Nilai tersebut berdasarkan aplikasi SPASIKITA untuk EKA, dan aplikasi MONEV PA untuk nilai IKPA pada tanggal 17 Januari 2024.

Kendala / Permasalahan :

Jika dibandingkan seluruh indikator, baik di EKA maupun di Eka, nilai yang paling kecil adalah nilai efisiensi. Indikator efisiensi di Puslapdik sangat sulit di dapatkan karena karakter Rincian Output (RO) yang bersifat bantuan dengan satuan harga tetap per orang penerima bantuan. Sehingga realisasi kinerja akan sangat sulit untuk mencapai nilai lebih besar dari 120%, yang akhirnya nilai efisiensi tidak bisa meningkat secara signifikan.

Strategi / Tindak Lanjut :

Tetap mengusahakan capaian RO minimal 100% supaya tetap mendapatkan nilai di indikator efisiensi, dengan meningkatkan nilai indikator lain, untuk tetap mendapatkan NKA sesuai target.

3. REKOMENDASI PIMPINAN

Seluruh target dari indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 dapat tercapai, dan bahkan ada beberapa yang malampaui dari target. Capaian tahun 2023, yang memiliki lanjutan di tahun 2024 harus dipastikan ketersediaan anggaran di tahun 2024, seperti program KIP Kuliah, ADIK, dan Beasiswa Unggulan yang menjadi mahasiswa lanjutan di tahun 2024.

Untuk target kinerja pada tahun 2024 harapannya juga dapat dicapai dengan baik. Pastikan target kinerja pada tahun 2024 tersebut sesuai dengan ketersediaan anggaran yang dialokasikan di tahun 2024, target renstra tahun 2024, dan capaian di tahun 2023.

Pastikan penyelesaian admintrasi dan pelaporan-pelaporan di tahun 2023 selesai dengan baik.

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan IV tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Jakarta, 17 Januari 2024

Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan



Abdul Kahar

**PERNYATAAN TELAH DI REVIU
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu laporan kinerja PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN untuk tahun anggaran 2023 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 25 Januari 2024

Ketua Tim Reviu



Mohamad Alipi

196701071992031003



Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

ZI-WBK

 puslapdik.kemdikbud.go.id
 Puslapdik Kemendikbud RI

 Puslapdik
 Puslapdik_dikbud